

Secara historis, pendidikan Islam di negeri Belanda mulai terlihat nyata sejak 1980-an. Bentuk dari pendidikan Islam itu sendiri ada tiga jenis: pendidikan masjid, pendidikan agama Islam di sekolah umum, dan sekolah dasar Islam. Komunitas Muslim berhasil mendirikan sekolah dasar Islam pertama mereka di akhir 1980-an di Rotterdam dan Utrecht. Sekolah-sekolah tersebut sepenuhnya didanai oleh negara. Konstitusi Belanda, yang menjamin kebebasan pendidikan, memungkinkan bagi orang Muslim di negara ini untuk mendirikan sekolah mereka sendiri berdasarkan budaya dan agama mereka (Islam).

Terhadap keberadaan sekolah Islam tersebut masyarakat Belanda menanggapi secara beragam: pro dan kontra. Kelompok yang pro menganggap bahwa lingkungan yang ramah tempat siswa belajar dapat membuat siswa secara bertahap bersosialisasi dengan masyarakat luas dengan memperkuat identitas mereka. Sebaliknya, mereka yang kontra berasumsi bahwa sekolah Islam tersebut tidak memenuhi standar normal dan cenderung memarginalkan siswa Muslim. Inilah tantangan yang dihadapi masyarakat Muslim Belanda saat ini. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah Islam di Belanda. Selain memasukkan *civic education* ke dalam kurikulum sekolah, mereka juga mempromosikan integrasi sosial di dalam *mission statement*-nya agar para siswa dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dan berintegrasi di dalam masyarakat setempat.

Buku ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Belanda, *Penelitian Sabbatical Leave 2016* (didanai oleh Diktis Kemenag RI) dan *Penelitian Kolaborasi dengan Dosen Luar Negeri 2017* (didanai oleh LP2M UIN Walisongo Semarang).

Dr. H. Muslih MZ, M.A. adalah dosen profesional bersertifikat di FITK UIN Walisongo Semarang, Master (S.2) dan Doktor (S.3) dalam Studi Islam di Faculteit der Letteren (Fakultas Sastra) dan Facultiet der Godgefeerheid (Fakultas Teologi), Universiteit Leiden, Belanda.

SEAP
SOUTHEAST ASIAN PUBLISHING

Southeast Asian Publishing
Jl. Purwoyoso Selatan B20-21, Semarang, Indonesia
Telepon +62 24 707 7722, +62-8968-449-7722
contact@seapublication.com, www.seapublication.com

ISBN 978-602-53280-7-7



9 786025 328077

PENDIDIKAN

SEAP
SOUTHEAST ASIAN PUBLISHING

DR. MUSLIH, M.A. PENDIDIKAN ISLAM DI NEGERI BELANDA

DR. MUSLIH, M.A.



PENDIDIKAN ISLAM DI NEGERI BELANDA

Sejarah, Tantangan dan Prospek

SEAP
SOUTHEAST ASIAN PUBLISHING

PENDIDIKAN ISLAM
DI NEGERI BELANDA
SEJARAH, TANTANGAN DAN PROSPEK

DR. MUSLIH, M.A.

PENDIDIKAN ISLAM
DI NEGERI BELANDA
SEJARAH, TANTANGAN DAN PROSPEK

Pendidikan Islam di Negeri Belanda
Sejarah, Tantangan dan Prospek
Karya Dr. Muslih, M.A.

Penyunting: Aqil Luthfan
Penata Aksara dan Perancang Sampul: SeAP Studio

ISBN 978-602-53280-7-7

Cetakan Pertama, Juni 2019

xii + 218 hlm.; 21 cm.

Diterbitkan oleh Southeast Asian Publishing
Jl. Purwoyoso Selatan B20-21, Semarang, Indonesia
Telepon +62 24 707 7722, +62-8968-449-7722
Surel: contact@seapublication.com
Website: seapublication.com

©2019
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi rabbi, Allah SWT Tuhan yang menciptakan alam semesta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan berperadaban.

Buku ini adalah hasil kombinasi dari dua kali penelitian yang penulis lakukan di negeri Belanda, pertama ketika penulis mendapat kesempatan Penelitian *Sabbatical Leave* di Universitas Leiden pada akhir 2016 yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang kedua, ketika penulis mendapatkan *grant* Penelitian *Kolaborasi dengan Dosen Luar Negeri* dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang pada akhir 2017 (September) di Universitas van Amsterdam (UvA). Penulis berterima kasih kepada para pemegang otoritas di lembaga-lembaga yang disebutkan tadi yang telah memungkinkan *rihlah ilmiah* tersebut menjadi kenyataan dan akhirnya penulis dapat menuangkan sebagian dari hasil penelitian, pengamatan dan hasil investigasi tersebut dalam bentuk buku yang kini hadir di tangan para pembaca sekalian.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menghadirkan informasi yang aktual dan faktual berdasarkan data yang *valid* dan *reliable* mengenai keberadaan Islam dan Muslim di salah satu negara Barat, yakni negeri Belanda, yang *notabene* adalah negara sekuler dan bahkan termasuk salah satu bangsa paling

sekuler di dunia. Bagaimana dinamika kaum Muslim imigran di Belanda memperkuat eksistensinya dan memperjuangkan adanya pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat tuan rumah yang sekuler merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikupas. Selain untuk memenuhi kebutuhan *curiosity* akademik kajian ini juga bisa bermanfaat untuk melihat perbandingan antara kondisi nyata mereka (Muslim imigran) sebagai minoritas dengan kondisi kita di Indonesia di mana Muslim bertindak sebagai mayoritas.

Secara historis, pendidikan Islam di Belanda mulai terlihat nyata sejak 1980-an. Bentuk dari pendidikan Islam itu sendiri ada tiga jenis: pendidikan di masjid, pendidikan agama Islam di sekolah umum (negeri), dan pendidikan di sekolah dasar Islam. Komunitas Muslim berhasil membangun sekolah dasar Islam pertama mereka di akhir 1980-an di Rotterdam dan Utrecht. Sekolah-sekolah tersebut sepenuhnya didanai oleh negara. Konstitusi Belanda, yang menjamin kebebasan pendidikan, telah memungkinkan bagi umat Islam di negara ini untuk mendirikan sekolah mereka sendiri berdasarkan budaya dan agama mereka (Islam).

Pendapat masyarakat Belanda sebagai reaksi atas kemunculan sekolah Islam di negeri ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: pro dan kontra. Perdebatan tentang keberadaan sekolah-sekolah Islam di Belanda tidak diragukan lagi terkait dengan ruang lingkup perdebatan yang lebih luas tentang Islam dan Muslim di masyarakat Belanda. Orang-orang yang mendukung sekolah Islam menganggap bahwa lingkungan yang ramah di mana siswa belajar dapat membuat siswa secara bertahap bersosialisasi dengan masyarakat luas dengan memperkuat identitas mereka. Sebaliknya, mereka

yang menentang sekolah Islam berasumsi bahwa sekolah Islam tersebut tidak memenuhi standar normal dan cenderung memarginalkan (atau, dalam kasus terburuk, meradikalisasi) pemuda atau anak-anak Muslim. Sekolah Islam dianggap hanya akan mencegah siswa untuk berintegrasi sosial secara penuh ke dalam masyarakat Belanda. Inilah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat Muslim Belanda saat ini.

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah dasar Islam di Belanda berkenaan dengan upaya mereka menjaga kualitas pendidikan dan mempromosikan integrasi sosial. Usaha tersebut meliputi upaya sekolah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar di Belanda. Mengenai penguatan integrasi sosial ke dalam masyarakat tuan rumah Belanda, kegiatan yang dilakukan termasuk memberikan dukungan kepada posisi komunitas Muslim yang melakukan integrasi ke dalam masyarakat Belanda.

Tentunya, buku ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya bantuan dari banyak pihak yang telah berbaik hati memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semuanya. Pertama-tama, terima kasih kepada istri tercinta (Hj. Karsi Asih) dan anak-anak (Rahma Syarafina Maharani dan Rosyida Hasna Kumala Dewi) yang senantiasa menunjukkan dukungan moril dan kesabarannya ketika penulis harus berada jauh dari mereka karena harus melaksanakan penelitian tersebut di negeri Belanda selama beberapa bulan.

Selanjutnya, teman-teman dan kolega penulis di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri

(UIN) Walisongo Semarang juga berhak mendapatkan ucapan terima kasih atas saran dan motivasi serta kritikan yang mereka berikan sehingga penulis terpacu lagi untuk lebih bersemangat menyelesaikan dan meningkatkan kualitas karya ini. Terima kasih juga untuk bapak Dekan FITK UIN Walisongo atas dorongan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Ketika melakukan aktivitas penelitian tersebut di atas penulis mendapatkan izin dari Rektor UIN Walisongo Semarang untuk sementara waktu boleh meninggalkan tugas di kampus tercinta, untuk itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beliau. Kepala LP2M UIN Walisongo Semarang juga berhak menerima ucapan terima kasih, karena beliau telah memberikan dana bantuan untuk menunjang kegiatan penelitian di luar negeri (2017) bagi penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pejabat atau pemegang otoritas di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta yang telah memberikan dana untuk melakukan kegiatan penelitian *Sabbatical Leave* (2016), yang mana penulis termasuk salah satu di antara beberapa orang dosen PTKIN di Indonesia yang beruntung terpilih mendapatkan *grant* tersebut.

Berikutnya, orang-orang yang telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada penulis selama melakukan kegiatan penelitian di Belanda juga sangat layak untuk diberi ucapan terima kasih. Profesor Dr. Nico J.G. Kaptein di Universiteit Leiden telah memfasilitasi saya dengan *invitation letter* untuk datang ke Universiteit Leiden (2016) dan Profesor Dr. Gerard A. Wiegers dari Department of History, European Studies and Religious Studies, the Faculty of Humanities, Universiteit van Amsterdam (UvA) juga telah memberikan rekomendasi untuk

penelitian di UvA (2017). Mereka adalah guru-guru dan teman-teman saya yang baik hati dan membantu saya dengan ide dan saran-sarannya. Profesor (Emeritus) Dr. Pieter Sjoerd van Koningsveld di Leiden (yang dulu menjadi promotor penulis sewaktu menempuh program doktor di Universiteit Leiden) masih selalu dan terus menginspirasi penulis dengan ide-ide akademisnya sewaktu penulis ajak berdiskusi tentang perkembangan Islam di Belanda masa kini, dan ketika penulis berkunjung ke rumahnya, beliau juga menyambut penulis dengan sangat hangat layaknya orang tua kepada anaknya sendiri yang sudah lama tidak berjumpa. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas kesediannya mau berdiskusi dengan saya ketika penelitian *Sabbatical leave* (2016). Semoga persahabatan ini (antara saya di Indonesia) dengan mereka (para guru-guru saya di Belanda) akan terjalin baik seterusnya, *jullie zijn allemaal mijn beste leraren en ik hoop dat onze vriendschap voor altijd zal blijven, heren!*

Di Universiteit Leiden ada petugas di perpustakaan, Mrs. Josephine, yang selalu menyapa dan membantu penulis ketika meminjam buku-buku referensi untuk kepentingan penelitian penulis. Saya ucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah dia berikan. Di Amsterdam ada Mrs. Minou van Beurden yang adalah pegawai di Department of History, European Studies and Religious Studies, Faculty of Humanities, Universiteit van Amsterdam (UvA). Ia telah dengan sabar membantu saya mengurus masalah administrasi izin menggunakan fasilitas di perpustakaan, terima kasih saya ucapkan atas kerjasamanya yang baik. Di sekretariat Faculty of Humanities of the University of Amsterdam ada Mrs. Leentje Molenaar yang mengatur dan mengurus ruangan kerja untuk saya selama saya tinggal di UvA dan sering membantu saya meminjami

kartu untuk fotocopy dan print sebelum kartu ID saya jadi. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam satu dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, saya, penulis, mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Terlepas dari semua bantuan dan saran yang telah diberikan tersebut, segala kesalahan dan kekurangan yang menyangkut *content* atau isi dari buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi selaku penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dan akan penulis terima dan senang hati untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. *Amien ya robbal alamin.*

Semarang, Juni 2019
Penulis,
Dr. H. Muslih, M.A.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v
Daftar Isi — xi

BAB I

PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang — 2
- B. Rumusan Masalah — 8
- C. Signifikansi — 9
- D. Kajian Pustaka — 9
- E. Kerangka Teori — 12
- F. Metode Penelitian — 21
- G. Sistematika Pembahasan — 24

BAB II

SEJARAH KEMUNCULAN PENDIDIKAN ISLAM DI BELANDA -- 27

- A. Kehadiran Muslim di Belanda — 28
- B. Kebutuhan akan Pendidikan Islam — 32
- C. Mentransfer Nilai-nilai Agama — 42
- D. Melestarikan Identitas Keislaman — 49

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM — 61

- A. Mengenal Sistem Pilarisasi Belanda — 62
- B. Konstitusi dan Kebebasan Pendidikan — 72
- C. Perdebatan tentang Keberadaan Pendidikan Islam — 83
- D. Kinerja Sekolah Dasar Islam di Belanda — 96

BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM DAN MASALAH INTEGRASI SOSIAL DI BELANDA — 109

- A. Munculnya Wacana Integrasi Sosial — 110
- B. Kebijakan integrasi bagi kaum imigran di Belanda — 121
- C. Perjuangan Melawan Asimilasi — 125
- D. “Model Multikultural” Belanda dan Wacana Publik tentang Integrasi — 129
- E. Upaya Sekolah Islam untuk Peningkatan Kualitas dan Dukungan Integrasi Sosial — 147
- F. Komitmen untuk Memberikan Pendidikan Islam yang Berkualitas — 151
- G. Promosi Kewarganegaraan Aktif dan Integrasi Sosial melalui Misi Sekolah — 154
- H. Penguatan Posisi Masyarakat Muslim yang Berintegrasi Sosial — 163

BAB V

PENUTUP — 173

- A. Kesimpulan — 173
- B. Saran-saran — 177
- C. Kata Penutup — 178

DAFTAR PUSTAKA — 180

INDEKS — 194

GLOSARIUM — 199

APPENDIX — 202

BIOGRAFI PENULIS — 211

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan bahasan mengenai beberapa hal atau item yang semula menjadi bagian dari proposal penelitian sebelum akhirnya ditindaklanjuti menjadi sebuah proyek penelitian, yang hasilnya kini hadir di tangan pembaca dalam bentuk buku. Karena buku ini merupakan hasil dari penelitian maka poin-poin (yang sebelumnya adalah bagian dari proposal tersebut) dengan sedikit adaptasi dan perubahan disajikan lagi dengan urutan sebagai berikut. Pertama-tama penulis menampilkan *background* yang melatarbelakangi penulis memberanikan

diri mengangkat tema ini. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan menyajikan poin-poin berikutnya secara berurutan yakni rumusan masalah, signifikansi, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang

Belanda adalah salah satu negara di Eropa Barat yang memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar. Saat ini populasi Muslim di Belanda mencapai hampir satu juta. Kebanyakan dari mereka adalah orang Maroko, orang Turki, Suriname dan kelompok etnis lainnya.¹ Jumlah populasi Muslim yang besar ini dapat menjadi keuntungan di satu sisi, tetapi di sisi lain hal itu juga dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah Belanda dan populasi Muslim itu sendiri.

Keuntungan bagi pemerintah Belanda adalah bahwa populasi Muslim merupakan modal yang bagus untuk menambah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja untuk mengisi bidang-bidang pekerjaan, terutama di sektor pekerjaan kasar yang mana untuk kurun waktu yang cukup lama di masa lalu pemerintah Belanda telah kekurangan tenaga untuk menangani pekerjaan kasar tersebut. Keuntungan bagi Muslim yang tinggal di Belanda

¹Lihat Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), "Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?", *Interchange*, 37:3, DOI: 10.1007/s10780-006-9001-0, h. 201-223.

adalah bahwa mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan di negara ini dan pada saat yang sama mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi mereka untuk menjadi lebih baik.

Namun, selain memberi keuntungan populasi Muslim (baik mereka yang datang sebagai imigran dari generasi pertama dan atau mereka yang telah lahir di Belanda) terkadang dianggap sebagai sumber masalah. Masalah yang sering muncul dan menjadi debat publik serius di Belanda akhir-akhir ini terkait dengan populasi Muslim adalah masalah integrasi sosial (pembauran) ke dalam masyarakat asli.

Di satu sisi, masyarakat Belanda mengharapkan integrasi dan partisipasi penuh para imigran Muslim dan untuk berperilaku seperti warga negara Belanda asli. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari umat Muslim diharapkan untuk hidup dan menerapkan norma dan budaya yang lazim di Belanda. Namun, di sisi lain, para imigran Muslim merasa perlu untuk mempertahankan keberadaan dan identitas keislaman mereka, yang tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun tinggal di tengah-tengah masyarakat Belanda dan telah menjadi warga negara Belanda. Selain itu, beberapa dari umat Muslim juga merasa bahwa tidak semua budaya di masyarakat Belanda sejalan dengan budaya dan ajaran Islam. Karena

itu, imigran Muslim cenderung mempertahankan gaya hidup mereka dengan norma dan nilai-nilai Islam.

Karena banyak orang Muslim sekarang yang merasa bahwa mereka hidup di dalam masyarakat yang tidak lagi mendapatkan inspirasi dan aturan dari iman, oleh karena itu dirasa perlu bahwa kehadiran mereka di Eropa harus menyerukan umat Muslim untuk mendefinisikan kembali agama mereka di masyarakat baru tersebut. Untuk tujuan ini dan dalam proses menjadikan Eropa sebagai rumah mereka, mereka menganggap bahwa mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam adalah penting untuk membantu anak-anak mereka belajar mengidentifikasi diri ketika memasuki masa remaja nanti, karena tanpa memiliki perasaan hubungan batin, anak-anak Muslim tidak dapat benar-benar berpartisipasi dan memberi layanan kepada masyarakat setempat.²

Lebih lanjut, umat Muslim merasa perlu untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam kepada anak-anak mereka. Upaya untuk mengubah nilai-nilai dan budaya serta warisan agama ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik secara informal melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan non-

² Lihat Ednan Aslan (2013), "Series Editor's Foreword", dalam Ednan Aslan/Margaret Rausch (eds.), *Islamic Education in Secular Societies*, Frankfurt am Main: Peter Lang, h.10.

formal di masjid, serta pendidikan formal di sekolah. Dalam hal pendidikan formal, saat ini, populasi Muslim di Belanda dapat memilih sekolah untuk anak-anak mereka yang menawarkan pendidikan agama Islam. Di beberapa kota besar di Belanda ada sekolah dasar Islam yang juga disubsidi oleh negara seperti sekolah umum atau sekolah denominasi lainnya.³

Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah dasar Islam atau pendidikan Islam telah menjadi bahan perdebatan di kalangan politisi dan akademisi serta jurnalis di Belanda. Beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan Islam seperti yang diminta oleh warga Muslim Belanda (etnis Maroko dan Turki) bukan masalah bagi negara, bahkan akan memiliki efek positif karena anak-anak Muslim yang mendapatkan pendidikan sesuai dengan latar belakang budaya mereka akan mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat menghargai orang lain di luar komunitas mereka.⁴ Beberapa investigasi baru-baru ini oleh Inspektorat Pendidikan Belanda (*Inspectie van het Onderwijs*,

³ Lihat K. Wagtendonk (1991), "Islamic Schools and Islamic Religious Education: A Comparison between Holland and Other West European Countries", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, h. 154. Lihat juga Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), "Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure", *Comparative Education*, 41:4, DOI: 10.1080/03050060500300931, h. 411-432.

⁴ Lihat W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991b), "Institutionalization and Integration of Islam in The Netherlands", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in*

1999, 2002, 2003) juga menyimpulkan bahwa, "almost all of the Islamic schools have an open attitude towards Dutch society and play a positive role in creating conditions for social cohesion"⁵ (Hampir semua sekolah Islam memiliki sikap terbuka terhadap masyarakat Belanda dan memainkan peran positif dalam menciptakan kondisi untuk kohesi sosial. Terjemah oleh penulis).

Sebaliknya, ada juga pendapat bahwa pendidikan Islam yang telah dituntut oleh umat Muslim tidak memiliki efek yang baik bagi negara dan masyarakat di Belanda karena mereka akan teralienasi di masyarakat dengan budaya mereka sendiri dan itu dapat menghalangi proses integrasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda. Sayangnya, seperti yang diketahui banyak orang, integrasi sering disalahpahami sebagai asimilasi. Menurut Elsas, kesalahpahaman ini harus diperbaiki. Dalam pandangannya, integrasi harus didefinisikan sebagai "the participation of groups or individuals in society while retaining

Western Europe, Kampen: Pharos, h. 120; Lihat juga W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991a), "Blaming the System or Blaming the Victim? Structural Barriers Facing Muslims in Western Europe", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, h. 2-21.

⁵ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), h. 422. Lihat juga Wasif A. Shadid & Pieter Sjoerd van Koningsveld (2006), "Islamic Religious Education in the Netherlands", *European Education*, 38:2, DOI: 10.2753/EUE1056-4934380206, h. 86.

and developing their own identity with its essential parts remaining intact"⁶ (Partisipasi kelompok atau individu dalam masyarakat sambil mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka sendiri dengan bagian-bagian penting tetap utuh), karena menurut Elsas itulah sebenarnya arti kata Latin "integer" dalam "integrasi".⁷

Dengan demikian, pendidikan Islam telah dilihat oleh publik di Belanda dari dua perspektif yang berbeda: asumsi positif dan negatif. Studi ini menghadirkan penyelidikan dan mengkaji apa arti pendidikan Islam bagi komunitas imigran Muslim di Belanda dan peran apa yang dimainkannya dalam proses integrasi Muslim ke dalam masyarakat Belanda. Benarkah pendidikan Islam untuk anak-anak Muslim dapat menghambat proses integrasi mereka atau sebenarnya hanya ketakutan sebagian orang karena Islam akan berkembang?

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis telah secara mantap dan percaya diri menginvestasikan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelidiki atau meneliti masalah tersebut secara lebih dalam untuk dikerjakan dalam sebuah proyek penelitian yang kemudian

⁶ Lihat Chr. Elsas (1991), "Turkish Islamic Ideals of Education: Their Possible Function for Islamic Identity and Integration in Europe", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, h.176.

⁷ Chr. Elsas (1991), h.176.

hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk buku yang kini hadir di tangan para pembaca yang budiman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncullah beberapa masalah yang perlu dijawab dalam pembahasan studi ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Pertama, bagaimana pendidikan Islam muncul ke dalam masyarakat Belanda secara historis? Kedua, bagaimana pendidikan Islam ditanggapi oleh masyarakat di Belanda? Ketiga, upaya apa yang telah dilakukan pendidikan Islam di Belanda berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan anjuran atau promosi integrasi dan kohesi sosial ke dalam masyarakat Belanda?

Perlu penulis tegaskan bahwa kajian ini dalam pembahasannya hanya fokus pada masalah-masalah yang telah disebutkan di atas. Pertama, studi ini menyajikan elaborasi tentang bagaimana pendidikan Islam muncul di tengah-tengah masyarakat Belanda yang sekuler dari perspektif sejarah. Kedua, studi ini menyelidiki persepsi masyarakat Belanda dalam merespon atau bereaksi terhadap keberadaan pendidikan Islam di Negeri Belanda. Ketiga, studi ini juga mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan Pendidikan Islam (atau Sekolah Dasar Islam) dalam melakukan seruan berintegrasi kepada Muslim ke dalam masyarakat asli Belanda.

C. Signifikansi

Manfaat dari studi ini adalah bahwa hasil pengkajian ini secara umum akan memberikan informasi yang komprehensif kepada para akademisi, peneliti dan intelektual yang peduli dengan masalah yang sedang dibahas. Secara spesifik studi saya ini menambah khazanah dan memperkaya kumpulan studi tentang pendidikan Islam di Barat khususnya di negeri Belanda, memperkaya analisis faktor-faktor yang mengarah pada realisasi dan peran atau fungsi pendidikan Islam bagi imigran Muslim di Belanda. Pada tataran praktis, studi ini akan menjadi referensi yang baik untuk institusi pendidikan tempat penulis bekerja, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang kini bergerak maju dengan visi menjadi universitas riset terdepan berdasarkan kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Studi ini sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo. Yang terpenting lagi, hasil penelitian atau kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang studi Islam yang menjadi *concern* saya.

D. Kajian Pustaka

Pengkajian tentang Islam di Barat bukanlah hal yang baru sama sekali. Sejumlah sarjana telah bekerja dan menghasilkan karya dalam bidang ini. Namun demikian,

studi tentang Islam di Belanda dengan referensi pendidikan Islam masih terbatas jumlahnya dan perlu adanya kajian-kajian yang lebih banyak lagi guna menambah khazanah ilmu pengetahuan yang sudah ada.

Shadid & van Koningsveld telah menjadi pelopor dalam mempelajari pendidikan agama Islam di Belanda. Penelitian mereka tentang "Sekolah Dasar Islam" adalah contoh yang baik dari karya mereka dalam subjek ini. Dalam studi ini Shadid & van Koningsveld menganalisis situasi umat Islam di Belanda, termasuk, antara lain, pendirian sekolah dasar Islam pertama di Belanda pada tahun 1988 yang telah memicu beberapa perdebatan panas di antara orang-orang Belanda. Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan yang mereka lakukan di tempat-tempat di seluruh negeri yang menjadi tempat tinggal utama para imigran Muslim seperti Turki, Maroko dan lainnya.⁸

Selain itu, ada lagi studi lain yang bagus dan komprehensif berkenaan dengan subjek ini yang dilakukan oleh Geert Driessen & Michael S. Merry. Menggunakan data yang lebih baru, Driessen & Merry menguraikan situasi yang lebih mutakhir dari umat Muslim di Belanda. Memu-

⁸ Lihat W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1992), "Islamic Primary School" dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds), *Islam in Dutch Society: Current Developments and Future Prospects*, Kampen: Kok Pharos, h.107-122.

lai diskusinya dengan menguraikan sejarah kehadiran imigran Muslim dan mencatat bahwa umat Islam telah mendirikan beberapa lembaga Islam di negari Belanda, seperti masjid, pengajaran atau pendidikan agama, penyediaan kuburan bagi Muslim, dan tempat penyembelihan hewan dan penyediaan daging yang sesuai aturan Islam, sebagaimana telah dibahas oleh Shadid & van Koningsveld, Driessen & Merry memfokuskan diskusi mereka pada salah satu lembaga Islam tersebut yaitu sekolah Islam. Dalam studi ini mereka membahas isu-isu seperti konteks Belanda tentang pilarisasi dan kebebasan pendidikan. Di bawah subjudul "*The Founding of Islamic Schools*", Driessen & Merry menyebutkan bahwa adanya kebebasan pendidikan yang dijamin oleh konstitusi Belanda telah membuka kesempatan bagi banyak Muslim untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam.⁹

Kedua studi tersebut, oleh Shadid & van Koningsveld, serta Driessen & Merry berbicara tentang lembaga pendidikan Islam tingkat dasar sementara lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi tidak tersentuh. Menurut hemat penulis hal itu mungkin karena belum banyak lembaga pendidikan tinggi Islam di Belanda sehingga tidak atau belum menarik perhatian para sarjana untuk mengkajinya.

⁹ Lihat Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), "Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?", *Interchange*, 37:3, DOI: 10.1007/s10780-006-9001-0, h. 201-223.

Hasil-hasil studi tersebut dan studi lain yang sudah ada sampai saat ini semuanya digunakan untuk menyokong penggalan data di dalam melakukan penelitian atau kajian ini. Studi ini juga mengkaji lebih dalam mengenai peran lembaga pendidikan Islam dalam proses integrasi (pembauran) Muslim ke dalam masyarakat pribumi Belanda, yang diharapkan menjadi kontribusi berharga dari studi yang penulis lakukan ini.

E. Kerangka Teori

Posisi Muslim sebagai minoritas di Belanda selalu menjadi topik diskusi yang menarik sejak lama di kalangan atau lingkungan akademik. Menurut Statham, di Negeri Belanda negara telah memberikan ketentuan bagi minoritas termasuk Muslim untuk mengekspresikan budaya dan agama mereka. Ketentuan ini didukung oleh masyarakat sipil asli (*native*). Namun, aktivis dari partai politik radikal sangat sering menentangnya.¹⁰ Adalah penting untuk pertama-tama memahami posisi agama di Eropa sebelum kita melangkah lebih jauh dengan diskusi tentang kontroversi negara-negara Eropa tentang upaya mereka untuk "mengintegrasikan" Muslim ke dalam masyarakat mereka.

¹⁰ Lihat Paul Statham (2016), "How Ordinary People View Muslim Group Rights in Britain, The Netherlands, France and Germany: Significant 'Gaps' Between Majorities and Muslims?", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:2, DOI: 10.1080/1369183X.2015.1082288, h. 224.

Seperti dicatat oleh Statham, kontroversi muncul karena beberapa alasan. Pertama, meskipun masyarakat Eropa menganggap diri mereka sekuler secara luas, namun dalam kenyataannya, agama-agama Kristen telah memainkan peran sosial dan politik institusional yang berpengaruh terlepas dari jumlah sebenarnya yang menjalankan ibadah. Pengaturan kelembagaan hubungan gereja-negara ini, menurut Statham, mendefinisikan kondisi yang sudah ada sebelumnya dan lingkungan politik di mana agama-agama imigran harus menegosiasikan ruang untuk komunitas mereka, "*define pre-existing conditions and the political environment into which immigrant religions have to negotiate a space for their community*".¹¹ Kedua, identifikasi agama adalah sistem kepercayaan yang dapat membentuk identitas inti, opini, dan perilaku politik seseorang, "*religious identification is a belief system that can shape an individual's core identity, opinions and political behavior*".¹² Dalam pandangan Statham, seorang imigran yang beragama dapat menganggap bahwa mempraktikkan agama itu sebagai tugas suci yang tidak dapat dikompromikan. Meskipun negara selalu berusaha dengan sengaja untuk membentuk identifikasi kewarganegaraan bagi para imigran melalui kebijakan integrasi untuk para imigran, bagaimanapun juga, mereka tidak

¹¹ Paul Statham (2016), h. 219.

¹² Paul Statham (2016), h. 219.

sama dengan identifikasi keagamaan. Ini dapat dipahami karena kebebasan individu atau praktik keagamaan dipertahankan oleh negara liberal. Ketiga, sifat agama imigran cenderung mempengaruhi gradasi di mana migran beradaptasi atau melawan jika dihadapkan pada budaya dominan, dalam hal ini budaya mayoritas pribumi.¹³

Berkenaan dengan posisi Muslim di Belanda sebagai minoritas dapat dilihat dari teori identitas sosial. Verkuyten dan Thijs dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa remaja Turki di Belanda sangat mendukung pemeliharaan budaya, dan itu tidak terlihat bertentangan dengan adaptasi. Sebaliknya, sebagian orang pribumi Belanda kurang mendukung pemeliharaan budaya tersebut dan lebih menyukai adaptasi, dan melihat ini sebagai saling eksklusif.¹⁴ Selain itu, di antara identifikasi etnis Turki berhubungan positif dengan pemeliharaan budaya dan tidak terkait dengan adaptasi. Sementara itu, Belanda akan melihat bahwa emansipasi budaya minoritas imigran adalah kunci untuk integrasi mereka ke dalam masyarakat multikultural Belanda.¹⁵

¹³ Paul Statham (2016), h. 219.

¹⁴ Maykel Verkuyten & Jochem Thijs (2002), "Multiculturalism among Minority and Majority Adolescents in the Netherlands", *International Journal of Intercultural Relations*, Vol 26, Issue 1, February 2002, h. 91-108.

¹⁵ Lihat Christophe Bertossi, Jan Willem Duyvendak & Peter Scholten (2015), "The Coproduction of National Models of Integration: A View from France and the Netherlands", dalam Peter Scholten, Han

Sekolah dasar Islam di Belanda memiliki dua tujuan. Untuk meningkatkan prestasi sekolah bagi murid-murid mereka dan membesarkan mereka dalam semangat atau spirit Islam.¹⁶ Namun, bagi sebagian Muslim, tujuan yang terakhir itu jauh lebih penting daripada yang pertama. Merawat anak-anak dengan cara yang diperintahkan oleh agama Islam sangat penting agar dapat menanamkan nilai-nilai dan norma-norma Islam serta untuk mengkonfirmasi identitas mereka sebagai Muslim. Namun, Merry mencatat bahwa motivasi utama bagi orang tua yang memilih sekolah Islam ada tiga: yaitu, (1) agama (2) akademik, dan (3) budaya.¹⁷

Pencarian identitas suatu bangsa atau kelompok masyarakat telah menjadi isu sentral sejak kesadaran akan kedaulatan teritorial dan kelompok muncul, baik dalam arti fisik maupun simbolis. Bukan hanya ruang fisik

Entzinger, Rinus Penninx, Stijn Verbeek (eds.), *Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues*, Dordrecht: Springer, h. 66.

¹⁶ W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991b), h. 119. Lihat juga Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), "Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?", *Interchange*, 37:3, DOI: 10.1007/s10780-006-9001-0, h. 201-223.

¹⁷ Michael S. Merry (2005), "Advocacy and Involvement: The Role of Parents in Western Islamic Schools", *Religious Education*, 100:4, 374-385, DOI: 10.1080/00344080500308512. h. 377.

yang menentukan validitas sekelompok orang yang membedakan diri dari orang lain,¹⁸ tetapi simbol yang dikaitkan dengannya juga bisa menjadi ruang simbolis yang membedakan satu kelompok dari yang lain.¹⁹ Konfirmasi kehadiran fisik dan simbolis dari satu kelompok adalah jawaban dari keberadaan manusia, yang menjadi lebih bermasalah sejalan dengan tantangan kehidupan global.

Identitas masyarakat lokal dalam pembentukan dan perubahannya kemudian menjadi realitas historis, antropologis dan ikonik karena tekanan hidup manusia global memiliki dimensi kompleks secara spasial dan temporal.²⁰ Realitas historis identitas dibentuk dalam perspektif temporal dimulai dengan munculnya kesadaran bersama tentang asal usul dan ideal dari sekelompok masyarakat dengan batas fisik tertentu, serta batas sosial dan simbolis.²¹ Secara antropologis, identitas tidak hanya

¹⁸ Linda Nicholson (2008), *Identity Before, Identity Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁹ Irwan Abdullah (2007), *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁰ George Ritzer & Douglas J. Goodman (2010), *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

²¹ Benedict Anderson (1983), *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, New York: Knopf Doubleday Publishing Group. Lihat juga Kathleen Arnold (2004), *Homelessness, Citizenship, and Identity*. Albany: State University of New York Press.

terbatas pada karakter sosial yang berfungsi sebagai katalisator, tetapi juga strategi bagi kelompok masyarakat untuk mencari makna kehidupan bersama.²²

Meskipun identitas dalam komunitas Muslim dapat diekspresikan dalam banyak cara, seperti keluarga, tempat atau asal usul, dan juga bahasa, agama masih merupakan penyebutan yang paling umum. Ini karena identitas agama telah digambarkan lebih dari satu dasar. Selain denominasi sektarian yang dibentuk oleh teologi, keterikatan pada berbagai tatanan sufi dan berbagai mazhab juga menggambarkan identitas agama seseorang. Jadi, identitas agama selalu tidak identik.²³

Dilihat dari perspektif ini, keinginan umat Muslim di Belanda untuk memiliki pendidikan berdasarkan budaya dan agama mereka dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi budaya dan identitas mereka sebagai Muslim. Meskipun demikian, dari luar komunitas Muslim ada perdebatan sengit tentang sekolah agama yang dianggap menciptakan "segregasi" dan mempengaruhi terhadap

²² Peter Berger & Thomas Luckmann (1979), *The Social Construction of Reality*, New York: Penguin Books. Lihat juga Cora Govers and Hans Vermeulen (1997), *The Politics of Ethnic Consciousness*, New York: McMillan Press.

²³ Lihat Muhammad Khalid Masud (2002), 'Religious Identity and Mass Education' dalam Johan Meuleman (ed.), *Islam In The Era Of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*, London: Curzon, h. 170.

kohesi sosial.²⁴ Tentu saja, pendapat yang menentang tersebut sangat kritis dan menganggap pendidikan Islam di Belanda tidak diperlukan kehadirannya karena hal tersebut dapat memperlambat proses integrasi sosial ke dalam masyarakat Belanda.

Seperti yang dikatakan Hussain (2010), di dunia Barat sekuler ada berbagai fungsi sistem pendidikan dan banyak sarjana sepakat bahwa pendidikan adalah alat untuk mempersiapkan dan mengajar individu untuk hidup sesuai dengan masyarakatnya. Satu-satunya perbedaan terletak pada cara yang tepat untuk mendidik individu dan apa yang diperlukan.²⁵ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Gellner (1983) bahwa negara secara historis menggunakan sistem pendidikan sebagai agen penting untuk pembangunan bangsa.²⁶ Dilihat dari perspektif ini, para imigran Muslim juga melihat bahwa sekolah-sekolah Islam tetap menjadi agen penting untuk mensosialisasikan generasi berikutnya ke dalam nilai-nilai dan identitas mereka.

²⁴ P. Mandaville (2007). "Islamic education in Britain: Approaches to religious Knowledge in a Pluralistic Society". In R. Hefner & M. Z. Qasim (Eds.), *Schooling Islam: The culture and politics of modern Islam*, Oxford & Princeton: Princeton University Press, h. 239.

²⁵ Lihat Amjad Hussain (2010), "Islamic Education in the West: Theoretical Foundations and Practical Implications", dalam Kath Engbretson, Marian de Souza, Gloria Durka and Liam Gearon (eds.), *International Handbook of Inter-religious Education Part One*, Dordrecht: Springer, h. 236.

²⁶ E. Gellner (1983), *Nations and Nationalism*, Oxford: Blackwell.

Bagi sebagian imigran Muslim, pendidikan Islam adalah elemen dari teologi Islam yang lebih luas di mana keutamaan sains, manusia otonom serta realitas sekuler dianggap tidak ada.²⁷ Itulah sebabnya sekolah secara teratur telah menjadi lokasi institusional sebagai tempat perselisihan yang sah mengenai posisi agama secara umum di dalam suatu masyarakat, dan secara khusus juga mengenai posisi Islam.²⁸

Beyer (2007) menjelaskan bahwa ada tiga jenis manifestasi institusional yang mendapat perhatian paling besar terkait penyebaran global agama kontemporer. (1) Keunggulan agama dalam konteks migrasi transnasional. Beyer menyatakan bahwa ketika orang bergerak di seluruh dunia, "*they accidentally or deliberately carry their religious expressions with them, institutionalizing them in regions where before they may have been a negligible presence.*" (Para migran secara tidak sengaja atau sengaja membawa ekspresi keagamaan mereka, melembagakannya di daerah-daerah tempat mereka tinggal, dimana sebelumnya kehadiran mereka diabaikan). (2) Beragam organisasi dan gerakan keagamaan telah menyebar di seluruh dunia, penyebaran ini terkadang ada hubungannya dengan migrasi tetapi terkadang tidak dan untuk alasan

²⁷ Amjad Hussain (2010), h. 236.

²⁸ Paul Statham (2016), h. 228.

spesifik mereka sendiri. Menurut Beyer, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan ini memiliki asal-usul lokal, tetapi memanfaatkan kemungkinan komunikasi global untuk bergerak jauh melampaui mereka. (3) Ada fungsi yang dimainkan agama dalam gerakan sosial dan politik yang merespons secara khusus terhadap konteks global. Mereka tidak perlu global secara geografis tetapi sering global dalam efeknya.²⁹ Inilah yang disebut oleh Beyer sebagai globalisasi agama. Ketiga jenis manifestasi ini saling terkait antara satu dengan lainnya.

Termotivasi untuk hidup sesuai dengan tradisi budaya dan agama mereka, Muslim di Belanda telah mendirikan banyak lembaga keagamaan, seperti masjid, pengajaran agama (Islam), penyediaan kuburan bagi Muslim dan penyembelihan hewan yang islami.³⁰ Namun demikian, dalam studi ini saya hanya fokus pada salah satu dari lembaga tersebut, yaitu pendidikan agama (Islam). Alasan untuk pilihan ini sama dengan argumen yang diajukan oleh Driessen & Merry bahwa situasi di Belanda agak unik. Artinya, meskipun tidak ada hambatan dalam mendirikan sekolah Islam dari perspektif hukum, namun pada kenyataan praktis di lapangan, tidak selalu mudah

²⁹ Lihat Peter Beyer (2007), "Religion and Globalization" dalam George Ritzer (ed.), *The Blackwell Companion to Globalization*, Malden, MA: Blackwell Publishing, h. 446.

³⁰ W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991b), h. 89-121.

mendapatkan izin dari pihak berwenang.³¹ Situasi ini telah mendorong penulis untuk mengungkap sejumlah keingintahuan yang ada mengenai keberadaan Pendidikan Islam dan kemudian mengenai peran Pendidikan Islam tersebut dalam mendorong terjadinya proses integrasi sosial imigran Muslim ke dalam masyarakat Belanda.

F. Metode Penelitian

Studi ini utamanya merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dan oleh karena itu kegiatan difokuskan pada mempelajari teks-teks yang terkandung di dalam buku, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, dan jenis publikasi lainnya yang berisi bahan-bahan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Namun demikian, wawancara (*interview*) dengan beberapa tokoh misalnya, Meneer Abdul Hamid, Imam dan pengurus di *Islamitich Centrum Imam Malik (ICIM) Al-Hijra* di Leiden, dan narasumber yang kompeten seperti Profesor Gerard A. Wiegers dari Universiteit van Amsterdam dan Professor (Emeritus) Pieter Sjoerd van Koningsveld dari Universiteit Leiden juga telah dilakukan untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data yang ada. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan pengolahan data, yaitu pengumpulan data, analisis data dan penyajian data.

³¹ Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), h. 201-223.

1) Fase pengumpulan data

Dalam fase ini, penulis mengumpulkan semua bahan yang terkandung dalam buku, artikel jurnal serta jenis publikasi lain yang mengandung teks atau diskusi (pembahasan) tentang subjek yang sedang dikaji. Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data yang diperlukan, yang merupakan sumber data dalam bentuk literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.³² Semua bahan yang tersedia dikumpulkan dan diteliti untuk menemukan data yang relevan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam studi ini.

2) Fase analisis data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis isi. Babbie mendefinisikan analisis isi sebagai *"the study of recorded human communications, such as books, websites, paintings and laws"*³³ (studi tentang komunikasi manusia yang direkam, seperti buku, situs web, lukisan dan hukum). Holsti menjelaskan analisis isi sebagai prosedur apa pun untuk membuat interpretasi dengan cara mengidentifikasi karakteristik pesan yang ditentukan secara

³² Suharsimi Arikunto (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 236.

³³ Earl R. Babbie (2010), *The Practice of Social Research (12th ed.)*, Wadsworth: Cengage Learning, h. 530.

sistematis.³⁴ Tujuan penggunaan analisis isi dalam studi ini adalah supaya penelitian ini dapat memberikan generalisasi, yang berarti bahwa temuannya memberikan kontribusi teoritis. Metode ini menekankan pada bagaimana mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan kemudian dipersempit sebagai kesimpulan dari konsep tersebut. Kemudian, data yang diperoleh diklasifikasikan dengan cara membaca dan mengelompokkannya sesuai dengan pola yang disusun berdasarkan fokus penelitian.

3) Fase penyajian data

Penyajian data dilakukan secara bertahap setiap kali peneliti menemukan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diproses dimasukkan langsung ke bagian yang sesuai dari penulisan sistematis. Pada awalnya, data tidak terstruktur secara sistematis, kemudian dielaborasi sejalan dengan alur pemikiran deskriptif dan induktif. Setiap kali peneliti memperoleh data baru, data itu dikembangkan dan kemudian dikurangi untuk membuang data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Data yang relevan dikembangkan dan digabungkan dengan data lain yang diperoleh dari sumber teks lain sebagai proses verifikasi data.

³⁴ Ole R. Holsti (1969), *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*, Reading, MA: Addison-Wesley.

Kehadiran Muslim di Eropa Barat terutama di Belanda dimulai pada 1960-an dan 1970-an, selama periode ini Pemerintah Belanda menyelesaikan perjanjian rekrutmen dengan beberapa negara Eropa Selatan, dan dengan Turki dan Maroko. Para imigran dari Turki dan Maroko adalah orang-orang Muslim. Ini dapat dianggap sebagai tengara bagi kedatangan umat Muslim di Belanda.³⁵ Kajian atau studi ini mengeksplorasi sejarah kedatangan Islam di negeri Belanda. Semua bahan seperti buku, bab dalam buku, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan jenis publikasi lainnya, yang berisi data yang relevan dengan topik pembahasan, digunakan dan diteliti secara cermat. Perpustakaan Universitas Leiden dan Universitas Amsterdam telah dieksplorasi untuk melakukan penelitian atau kajian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan tingkat pemahaman yang lebih baik dan komprehensif kepada para pembaca, tulisan dalam buku ini disusun secara sistematis sesuai dengan urutan logisnya. Bab I, Pendahuluan, berbicara tentang hal-hal seperti latar belakang, rumusan masalah, signifikansi, kajian pustaka, kerangka teori serta metode penelitian

³⁵ R. Penninx & H. Vermeulen (eds) (2000), *Immigrant Integration. The Dutch Case*, Amsterdam: Het Spinhuis; Lihat juga J. Lucassen and R. Penninx (1997), *Newcomers, Immigrants and their Descendants in the Netherlands 1550-1995*. Amsterdam: Het Spinhuis.

yang digunakan untuk studi ini. Bab II, Sejarah kemunculan pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat Belanda, termasuk diskusi tentang poin-poin seperti kehadiran kaum Muslim di Belanda, Kebutuhan akan pendidikan Islam, Mentransfer nilai-nilai agama, Melestarikan identitas keIslaman. Bab III, Persepsi masyarakat Belanda terhadap pendidikan Islam. Ini mencakup presentasi tentang isu-isu seperti sistem Pilarisasi Belanda, Konstitusi dan kebebasan pendidikan, Perdebatan tentang keberadaan pendidikan Islam, Kinerja sekolah dasar Islam di Belanda. Bab IV, Pendidikan Islam dan masalah integrasi sosial di Belanda. Bab ini membahas poin-poin seperti Munculnya wacana kebijakan integrasi, Kebijakan integrasi bagi kaum imigran di Belanda, Perjuangan melawan asimilasi, "Model multicultural" Belanda dan wacana publik tentang integrasi, Upaya sekolah Islam untuk peningkatan kualitas dan dukungan integrasi sosial, Komitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, promosi kewarganegaraan aktif dan integrasi melalui misi sekolah, Penguatan posisi masyarakat Muslim yang berintegrasi. Bab V, Kesimpulan, yang menyajikan rangkuman dari hasil temuan studi ini. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, indeks, glosarium, lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

SEJARAH KEMUNCULAN PENDIDIKAN ISLAM DI BELANDA

Bab ini menyajikan diskusi tentang kemunculan atau kehadiran pendidikan Islam di dalam masyarakat Belanda. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang dibahas ini, pertama-tama kita perlu memiliki pengetahuan tentang sejarah kehadiran Muslim di Belanda. Oleh karena itu poin ini disajikan pada urutan pertama bab ini sebelum melangkah lebih jauh dengan mempelajari topik berikutnya, yakni tentang per-

lunya pendidikan Islam untuk Muslim. Dua topik yang relevan dengan penyediaan pendidikan Islam untuk Muslim di Belanda, yaitu mentransfer nilai-nilai agama dan melestarikan identitas keislaman disajikan kemudian secara berurutan dalam pembahasan ini.

A. Kehadiran Muslim di Belanda

Ketika membahas tentang asal usul Islam di Belanda, kita dapat melacaknya pada saat setelah Perang Dunia II. Orang-orang Muslim datang ke Belanda dalam skala besar pada periode 1960-an dan 1970-an. Pada saat itu pemerintah Belanda membutuhkan tenaga kerja manual untuk membangun kembali negara ini dan mempromosikan ekonomi mereka. Sebagian besar orang Belanda tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Karena itu pemerintah Belanda mengundang para pekerja dari luar negeri (wilayah Eropa-Mediterrania) untuk datang ke Belanda untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam ekspansi industri pasca-perang, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang Belanda sendiri tidak mau melakukannya, seperti pekerjaan pengumpulan dan pemilahan sampah dan tenun di industri tekstil.¹ Selama periode ini

¹ Lihat K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), "Half A Century of Islamic Education in Dutch Schools", *British Journal of Religious Education*, DOI: 10.1080/01416200.2015.1128391, h. 2.

Pemerintah Belanda menyelesaikan perjanjian rekrutmen dengan beberapa negara Eropa Selatan, dan dengan Turki dan Maroko. Para imigran dari Turki dan Maroko adalah kaum Muslim. Ini dapat dianggap sebagai tengara bagi kedatangan umat Muslim di Belanda.² Para imigran Muslim itu direkrut sebagai tenaga kerja murah (berpendidikan rendah) pada periode-periode ini.³ Sebagai pujian atas dedikasinya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu mereka sering disebut "pekerja tamu".

Saat ini kelompok Muslim terbesar yang tinggal di Belanda adalah imigran dari Turki dan Maroko (dan keturunan mereka) yang direkrut sebagai buruh selama tahun 1960-an dan 1970-an, sejumlah besar migran dari Turki adalah etnis Kurdi. Selain orang-orang Turki dan Maroko, kelompok-kelompok Muslim besar lainnya di Belanda adalah imigran dari Irak, Afghanistan, Iran dan Somalia yang datang kemudian, kebanyakan dari mereka mencari suaka dari penganiayaan dan atau melarikan diri dari kekerasan di negara asal mereka. Alasan sekelompok

² R. Penninx and H. Vermeulen (eds). (2000), *Immigrant Integration. The Dutch Case*. Amsterdam: Het Spinhuis. Lihat juga J. Lucassen and R. Penninx (1997), *Newcomers, Immigrants and their Descendants in the Netherlands 1550-1995*, Amsterdam: Het Spinhuis.

³ Corinne Torrekens & Dirk Jacobs (2016), "Muslims' religiosity and views on religion in six Western European countries: does national context matter?", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:2, DOI: 10.1080/1369183X.2015.1103032, h.325.

kecil pencari suaka melarikan diri ke Belanda adalah karena kegiatan politik-keagamaan mereka di negara-negara asal seperti Mesir dan Suriah.⁴

Kehadiran Muslim di Belanda terkait erat dengan kedatangan Muslim di bagian lain benua Eropa. Islam mulai dikenal luas di Eropa sejak paruh kedua abad kedua puluh. Sejumlah imigran telah datang ke negara-negara Eropa Barat sejak Perang Dunia II. Mereka adalah imigran dari bekas koloni, imigran buruh, pengungsi, dan pencari suaka. Banyak dari imigran itu adalah Muslim yang berasal dari negara-negara Islam di Asia dan Afrika. Mengenai jumlah total, tidak ada informasi yang memberikan angka pasti tentang jumlah populasi Muslim di Eropa. Namun demikian, telah ada beberapa estimasi yang menyebutkannya. Menurut Shebaib, dikutip dalam Driessen & Merry, antara 15 dan 25 juta umat Muslim telah tinggal di Uni Eropa.⁵

Berkenaan dengan jumlah Muslim yang tinggal di Belanda saat ini, tidak ada statistik yang dapat diandalkan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1991 memperkirakan bahwa ada 360.000 Muslim yang tinggal di

⁴ Lihat Martijn De Koning (2014), "Netherlands", dalam Jørgen S. Nielsen (Editor-in-Chief), *Yearbook of Muslims in Europe Volume 1*, Leiden: Brill, h. 439.

⁵ Lihat Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), "Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?", *Interchange*, 37:3, DOI 10.1007/s10780-006-9001-0, h. 201.

negara ini.⁶ Studi lain memperkirakan bahwa populasi Muslim di Belanda adalah 920.000, yang merupakan sekitar 6% dari total populasi Belanda. Di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Den Haag dan Utrecht lebih dari 10% penduduknya adalah Muslim. Mayoritas Muslim Belanda berasal dari Turki dan Maroko, mereka masing-masing berjumlah 320.000 dan 285.000.⁷ Namun demikian, penelitian lain (2005) mengungkapkan bahwa jumlah Muslim di Belanda diperkirakan lebih dari satu juta. Diprediksi bahwa Islam telah menjadi agama non-Kristen terbesar kedua di negara ini. Sekarang, Islam dan Muslim dipelajari secara besar-besaran di Barat. Pada masa sekarang ini diskusi tidak hanya terbatas pada Muslim di negara-negara Muslim saja tetapi juga diskusi untuk Muslim yang tinggal di komunitas diaspora, yang jumlahnya sekarang diperkirakan akan mencapai lebih dari 300 juta.⁸

Satu kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh imigran Muslim di Belanda adalah tingkat pendidikan mereka yang rendah, termasuk, dalam banyak kasus, buta

⁶ Lihat W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991a), "Blaming the System or Blaming the Victim? Structural Barriers Facing Muslims in Western Europe", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, h. 3.

⁷ Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), h. 201-202.

⁸ Lihat John L. Esposito (2016), "Foreword", dalam Robert Mason (ed.), *Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy*, New York: Palgrave Macmillan, h. ix.

huruf. Saat ini, generasi kedua dan ketiga dari Turki dan Maroko di Belanda masih kurang berhasil di sekolah dan pasar tenaga kerja.⁹ Secara umum, imigran Muslim di Belanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi, latar belakang mereka adalah para pekerja yang direkrut untuk melakukan pekerjaan kasar di Belanda pada 1960-an dan 1970-an. Selain memiliki posisi ekonomi yang lemah, mereka juga menempati posisi politik yang lemah juga. Identitas Muslim mereka sering dianggap ilegal oleh para aktor politik. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok agama lain.¹⁰ Namun anehnya, meskipun umat Muslim dianggap lebih lemah secara ekonomi dan politik, tetapi ada kekhawatiran publik Belanda bahwa Islam akan memiliki peran yang lebih besar dalam komunitas mereka.¹¹

B. Kebutuhan akan Pendidikan Islam

Motivasi para imigran Muslim untuk datang ke Belanda adalah karena alasan ekonomi. Pada awalnya tujuan mereka datang ke negara ini adalah untuk bekerja, dan setelah mereka mendapatkan cukup uang untuk membangun rumah buat keluarga atau memulai usaha kecil, mereka bermaksud untuk kembali ke negara asal mereka,

⁹ Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), h. 202.

¹⁰ Corinne Torrekens & Dirk Jacobs (2016), h. 325.

¹¹ Corinne Torrekens & Dirk Jacobs (2016), h. 325.

dan untuk alasan itu mereka disebut “pekerja tamu”.¹² Namun demikian, setelah program reunifikasi dengan keluarga mereka (istri dan anak-anak) di Belanda terjadi pada tahun 1970-an mereka memutuskan untuk menetap secara permanen dan menjadi warga negara di negara ini. Sejak saat ini dan seterusnya, Islam kemudian menjadi lebih terlihat di tengah-tengah masyarakat Belanda, dan terutama di sekolah-sekolah.¹³ Setelah itu, para imigran Muslim kemudian menjadi lebih peduli dan mulai berpikir tentang menemukan agen atau lembaga pendidikan Islam yang berfungsi untuk mengakomodasi dan mendidik anak-anak mereka dalam tradisi Islam. Untuk dapat memberikan dan mewariskan nilai-nilai Islam kepada anak-anak, dan untuk membekali mereka dengan panduan untuk hidup di negara sekuler ini, mereka perlu mendirikan lembaga pendidikan Islam.

Istilah “Pendidikan Islam” telah diinvestasikan dengan berbagai penggunaan dan makna. Susan L. Douglas dan Munir A. Shaikh, seperti dikutip oleh Jenny Berglund, menyatakan bahwa itu bisa berarti, “...*education of Muslims in their Islamic faith; education for Muslims which includes the religious and secular disciplines; education about Islam for those who are not Muslim; and education in*

¹² K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), h. 2.

¹³ K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), h. 3.

an Islamic spirit and tradition"¹⁴(pendidikan Muslim dalam iman Islam mereka; pendidikan untuk Muslim yang mencakup disiplin agama dan sekuler; pendidikan tentang Islam bagi mereka yang bukan Muslim; dan pendidikan dalam semangat dan tradisi Islam. Terjemah oleh penulis). Dalam studi ini saya gunakan yang pertama dari pemahaman ini, yaitu "pendidikan Muslim dalam agama Islam mereka". Dengan menggunakan definisi ini, ia mencakup kegiatan yang luas dan besar, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendidikan di sekolah-sekolah Islam saja.

Mengenai bentuk pendidikan Islam di Negeri Belanda, itu terjadi dalam tiga bentuk yang berbeda: (1) pendidikan masjid (sekolah masjid), (2) Pendidikan Agama Islam (*Islamic Religious Education*) di sekolah umum, dan (3) sekolah Islam swasta.¹⁵ Setelah berjuang cukup lama, akhirnya umat Islam di Belanda berhasil mendapatkan izin dari otoritas terkait untuk mendirikan sekolah Islam untuk memenuhi kebutuhan umat Islam untuk pendidikan Islam untuk anak-anak mereka. Menurut Merry & Driessen persiapan untuk mendirikan sekolah Islam di

¹⁴ Lihat Jenny Berglund (2013), "Islamic Education in Sweden" dalam Ednan Aslan/ Margaret Rausch (eds.), *Islamic Education in Secular Societies*, Frankfurt am Main: Peter Lang, h. 172.

¹⁵ Lihat W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991b), "Institutionalization and Integration of Islam in The Netherlands", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, h. 115-120.

Belanda terjadi pada tahun 1980. Namun, baru pada tahun 1988 sekolah Islam pertama berhasil didirikan. Butuh waktu lama untuk mendirikan sekolah karena tokoh Muslim yang ingin mendirikan sekolah tidak memiliki pengalaman dan tidak akrab dengan kompleksitas birokrasi serta mereka tidak berbicara bahasa Belanda. Selain itu, orang-orang yang mengambil inisiatif umumnya tidak menerima banyak kerja sama dari pemerintah pusat atau daerah. Dalam banyak kasus mereka bahkan merasa pihak berwenang memiliki kebijakan untuk mencegah pendirian sekolah Islam.¹⁶ Namun demikian, setelah menunggu selama bertahun-tahun, perjuangan umat Islam untuk mendirikan sekolah Islam akhirnya berhasil. Sungguh, imigran Muslim di Belanda telah bekerja keras melakukan upaya untuk merealisasikan pendirian sekolah-sekolah Islam di sana.

Perlu dicatat bahwa sekolah-sekolah Islam di Belanda tidak homogen. Secara umum, sekolah-sekolah ini dikelola oleh kelompok etnis, dan mereka memberikan pendidikan agama Islam sesuai dengan garis aliran atau aliran pemikiran yang mereka ikuti. Dalam penelitiannya, Shadid & van Koningsveld menemukan bahwa sekolah-sekolah Islam di Belanda jauh dari homogen, meskipun umumnya sekolah-sekolah diorganisasikan menurut

¹⁶ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), "Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure", *Comparative Education*, 41:4, DOI: 10.1080/03050060500300931, h. 416.

garis etnik dan ideologis. Sejumlah sekolah dianggap "liberal" karena mencerminkan orientasi yang sama dengan masyarakat Belanda sebagai sekolah non-Muslim. Sekolah lain dapat dikategorikan sebagai "konservatif" karena isi pengajaran agama dan pengamatan aturan perilaku Islam oleh staf dan siswa.¹⁷ Perbedaan utama dari sekolah-sekolah "liberal" berkaitan dengan orientasi ke dunia Islam dan bukan pada masyarakat Belanda.¹⁸

Mengenai jumlah sekolah Islam di Belanda, angkanya bervariasi. Dalam studinya, Berglund menyebutkan saat ini ada 43 (empat puluh tiga) sekolah dasar Islam dan satu sekolah menengah Islam di Belanda yang sepenuhnya didanai oleh negara.¹⁹ Namun demikian, sumber lain memiliki angka yang berbeda. Shadid & van Koningsveld mencatat perkembangan jumlahnya bahwa pada tahun 1994 ada 29 sekolah dasar Islam, dan pada tahun 2012 ada 44 sekolah dasar Islam dari total 8139 sekolah dasar

¹⁷ Lihat W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991a), h. 2-21; W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991b), h. 89-121; W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1991c), "Integration and Change: Some Future Prospects", in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, 228-239. Lihat juga W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1996), "Dutch Political Views on the Multicultural Society", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe*, Kampen: Pharos, 93-113.

¹⁸ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), h. 417.

¹⁹ Jenny Berglund (2015), *Publicly Funded Islamic Education in Europe and the United States*, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World: Center for Middle East Policy, h. 21.

di Belanda.²⁰ Selain itu ada satu sekolah menengah Islam. Sekolah pertama yang dibangun oleh umat Islam adalah sekolah dasar Al-Ghazali di Rotterdam pada tahun 1987.²¹ Menurut Driessen & Bezemer (1999), di Eropa Barat, Belanda memiliki jumlah sekolah Islam terbesar yang didanai negara. Hal ini terjadi karena peraturan dan regulasi yang relatif menguntungkan dan jelas tentang pendirian sekolah di Belanda.²²

Berkenaan dengan jumlah anak-anak Muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Islam di Belanda, angka yang pasti agak sulit ditemukan. Meskipun demikian perkiraan angkanya masih dapat ditemukan. Sejak kedatangan gelombang imigran pertama pada tahun 1960-an jumlah siswa terutama Turki dan Maroko, yang dengan demikian adalah Muslim secara identitas, telah tumbuh dengan pesatnya. Menurut laporan Merry & Driessen, pada tahun 2010 ada 40.000 siswa Turki dan 43.000 siswa Maroko dalam pendidikan dasar, atau 2,6 dan 2,8% dari total jumlah siswa. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang tua Muslim menjadi tidak puas dengan

²⁰ Wasif A. Shadid & Pieter Sjoerd van Koningsveld (2006), "Islamic Religious Education in the Netherlands", *European Education*, 38:2, DOI: 10.2753/EUE1056-4934380206, h. 77.

²¹ K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), h. 6.

²² Lihat Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), "Background and Achievement Levels of Islamic Schools in the Netherlands: are the reservations justified?", *Race Ethnicity and Education*, 2:2, DOI: 10.1080/1361332990020205, h. 239.

sekolah umum yang dihadiri anak-anak mereka. Pada dasarnya ada dua alasan untuk ketidakpuasan ini, yaitu tidak adanya pengajaran Islam di sekolah, dan buruknya prestasi akademik anak-anak mereka.²³

Driessen & Bezemer dalam penelitian mereka (1999) menyimpulkan bahwa sekolah Islam di Belanda memiliki dua tujuan, yaitu: untuk meningkatkan kinerja sekolah bagi murid-murid mereka dan untuk membesarkan mereka dalam semangat (spirit) Islam. Berdasarkan temuan tersebut, mereka (Driessen & Bezemer) menarik kesimpulan sementara bahwa murid di sekolah Islam tidak berprestasi lebih buruk daripada murid di sekolah lain dengan sosial-etnis yang memiliki kelas ekonomi yang sebanding. Menurut Driessen & Bezemer, berdasarkan temuan mereka, kekhawatiran beberapa orang mengenai kinerja atau prestasi murid Muslim pada mata pelajaran inti Belanda menjadi lebih rendah di sekolah-sekolah Islam belum terbukti. Namun demikian, Driessen & Bezemer mengakui bahwa *"the pupils at Islamic schools do not generally do any better than the ones at comparable schools either, and compared with the pupils at the reference category of schools, they lag far behind"*²⁴ (murid-

²³ Lihat Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), "On The Right Track? Islamic Schools in The Netherlands after An Era of Turmoil", *Race Ethnicity and Education*, 19:4, DOI: 10.1080/13613324.2014.985586, h. 859.

²⁴ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 253.

murid di sekolah-sekolah Islam umumnya tidak memiliki prestasi yang lebih baik daripada yang di sekolah-sekolah yang sebanding, dan dibandingkan dengan murid-murid di kategori referensi sekolah, murid di sekolah Islam tertinggal jauh di belakang. Terjemah oleh penulis). Setelah mengungkapkan temuannya Driessen & Bezemer menyimpulkan bahwa sejauh ini, sekolah-sekolah Islam belum mencapai salah satu tujuan utama mereka, yaitu untuk meningkatkan kinerja sekolah murid-murid mereka. Driessen & Bezemer berpandangan untuk menilai apakah sekolah-sekolah Islam itu akan berhasil atau tidak waktulah yang akan menjawabnya di masa depan.²⁵

Faktanya, tidak semua orang di Belanda merasa puas dengan kehadiran sekolah-sekolah Islam. Menurut Teunissen seperti dikutip dalam Driessen & Bezemer (1999) mereka yang ragu dengan sekolah Islam tidak hanya non-Muslim, tetapi sebagian Muslim juga. Dalam pandangan Driessen & Bezemer, *"Arguments in favour of Islamic schools refer to dissatisfaction with the existing schools, improving parental participation, contributing towards the pupils' sense of identity, and emancipating the target group"*²⁶ (argumen yang mendukung sekolah Islam mengacu pada ketidakpuasan dengan sekolah yang ada,

²⁵ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 253.

²⁶ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 236.

meningkatkan partisipasi orang tua, berkontribusi terhadap rasa identitas siswa, dan membebaskan kelompok target. Terjemah oleh penulis). Tujuan dari sekolah Islam yang diinginkan para orang tua Muslim, seperti yang ditunjukkan oleh Shadid & Van Koningsveld (yang dikutip dalam Driessen & Bezemer) adalah sebagai berikut: (1) untuk memperkuat rasa identitas siswa, yaitu pengembangan kepribadian budaya dan agama dalam semangat Islam, dan (2) meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu tingkat pencapaian prestasi. Di samping itu, penentang yang menolak datangnya sekolah Islam, seperti yang ditunjukkan Driessen & Bezemer, berargumen bahwa *"they [Islamic school] will lead to isolation and segregation instead of integration, that no real justice is done to the Dutch norms and values, that they are purely nationality schools, and that they will result in an exodus from the existing schools"*²⁷ (sekolah-sekolah Islam tersebut akan mengarah pada isolasi dan pemisahan daripada integrasi, bahwa tidak ada keadilan nyata dilakukan pada norma-norma dan nilai-nilai Belanda, bahwa mereka murni sekolah kebangsaan, dan bahwa mereka akan menghasilkan eksodus dari sekolah yang ada. Terjemah oleh penulis).

²⁷ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 236.

Cendekiawan seperti Kabdan, seperti dikutip dalam Driessen & Bezemer, berpendapat bahwa *"founding Islamic schools is more an ideological and political affair than a religious one. In particular, he feels that the traditional fundamentalist groups would make use of them"*²⁸ (mendirikan sekolah-sekolah Islam lebih merupakan urusan ideologis dan politik daripada sekolah agama. Secara khusus, ia merasa bahwa kelompok fundamentalis tradisional akan memanfaatkannya). Sudut pandang ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shadid & van Koningsveld (1992) sampai batas tertentu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari 20 sekolah yang ada pada tahun 1991-1992, mereka mengkarakteristikan 3 sekolah sebagai "liberal" dan 17 sekolah lainnya sebagai "ortodoks". Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kategori pertama (liberal) dianggap sebagai sebagian besar berorientasi pada masyarakat Belanda, yang kedua (ortodoks) berorientasi pada masyarakat Islam.²⁹

Perdebatan tentang sekolah-sekolah Islam di Belanda tidak diragukan lagi terkait dengan ruang lingkup perdebatan yang lebih luas tentang Islam dan Muslim di masyarakat Belanda. Orang-orang yang mendukung sekolah Islam menganggap bahwa lingkungan yang ramah di mana siswa belajar dapat membuat siswa secara

²⁸ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 237.

²⁹ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 237.

bertahap bersosialisasi dengan masyarakat luas dengan memperkuat identitasnya. Sebaliknya, mereka yang menolak sekolah Islam menganggap bahwa sekolah tersebut tidak memenuhi standar normal dan cenderung memarginalkan (atau, dalam kasus terburuk, meradikalisasi) anak-anak Muslim. Namun, tuduhan seperti ini tidak sepenuhnya benar. Menurut seorang sarjana Belanda Johan Meuleman, ketakutan akan radikalisme terbukti salah.³⁰ Perlu disebutkan di sini bahwa opini publik Belanda tentang keinginan akan hadirnya sekolah Islam di negeri Belanda masih sangat terpecah. Pada tahun 1992, misalnya, 57% dari populasi Belanda mendukung sekolah-sekolah seperti itu, tetapi persentase ini kemudian turun karena meningkatnya ketakutan terhadap Islam radikal.³¹

C. Mentransfer Nilai-nilai Agama

Mayoritas Muslim di Belanda melihat pentingnya pendidikan Islam untuk anak-anak mereka. Dengan kata lain, pendidikan Islam atau khususnya keberadaan sekolah Islam di antara mereka sangat penting untuk membantu mempersiapkan keturunan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Bagi mereka pendidikan

³⁰ Lihat Jenny Berglund (2015), h. 22.

³¹ K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), h. 6.

Islam atau khususnya sekolah Islam dapat berfungsi sebagai cara terbaik untuk mentransfer nilai-nilai agama kepada anak-anak.

Secara umum, sekolah-sekolah Islam di Belanda memiliki dua tujuan. Mereka harus meningkatkan kinerja atau prestasi sekolah bagi murid-murid mereka dan membesarkan mereka dalam semangat Islam. Namun, bagi banyak orang tua Muslim tujuan yang terakhir jauh lebih penting daripada yang pertama. Ini karena merawat dan memelihara anak-anak dengan cara yang diperintahkan oleh agama Islam sangat penting dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma Islam serta untuk mengkonfirmasi identitas mereka sebagai Muslim.³² Merry (2005) menjelaskan bahwa orang tua Muslim di Belanda yang memilih sekolah Islam untuk anak-anak mereka memiliki tiga motivasi, yaitu adalah (1) agama, (2) akademis, dan (3) budaya. Pertama, bagi orang tua Muslim yang tertarik pada sekolah-sekolah Islam, orientasi keagamaan dalam formasi akademik seseorang sangat berarti. Kedua, orang tua Muslim berusaha untuk mengamankan bagi anak-anak mereka formasi akademik tertinggi yang mereka mampu. Ketiga, orang tua Muslim - terutama imigran baru - sangat tertarik untuk membuat anak-anak mereka belajar tentang warisan budaya mereka. Ini mungkin termasuk masalah sensitif gender

³² Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), h. 201-223.

(misalnya aturan berpakaian yang sederhana, pembelajaran yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin), serta rasa hormat yang ditunjukkan kepada otoritas atau penguasa.³³

Namun demikian, dari motivasi-motivasi itu orientasi keagamaan adalah yang paling penting, seperti juga dinyatakan oleh Merry bahwa dengan momok sekularisme dan permisivitas yang menjulang besar, banyak orangtua Muslim yang ingin melindungi anak-anak mereka dari pengaruh materialis dan sekuler tertentu dengan menempatkan mereka dalam suatu lingkungan keagamaan yang komprehensif untuk menumbuhkan orientasi moral yang sangat spesifik. Merry mencatat bahwa anak-anak Muslim dapat ditemukan di sekolah-sekolah dengan konsentrasi minoritas yang tinggi, yang, dalam kasus Belanda, disebut "*Zwarte school*" atau "*black school*" (sekolah untuk anak-anak non-pribumi Belanda). Sekolah-sekolah ini memiliki reputasi yang buruk di antara populasi umum, memiliki prestasi akademik yang rendah dibandingkan dengan sekolah di pinggiran perkotaan, mentalitas guru yang buruk, keselamatan masih menjadi perhatian, dan banyak orang tua merasa bahwa permisivitas moral menjadi latah.³⁴ Karena alasan

³³ Michael S. Merry (2005), "Advocacy and Involvement: The Role of Parents in Western Islamic Schools", *Religious Education*, 100:4, DOI: 10.1080/00344080500308512, h. 377-378.

³⁴ Michael S. Merry (2005), h. 377.

itulah sekolah agama (Islam) tampaknya diinginkan oleh umat Muslim.

Selain beberapa motivasi yang disebutkan di atas, ternyata keinginan orang tua Muslim untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Islam juga disebabkan oleh keprihatinan lain. Kekhawatiran itu adalah masih adanya rasisme di Eropa, khususnya di sekolah lokal, masih ada persepsi bahwa budaya dan agama seseorang (Islam) tidak hanya ditangani secara tidak memadai dan tidak akurat dalam kurikulum sekolah, tetapi pada kenyataannya itu tidak ditangani secara total. Selain itu, banyak orang tua memiliki harapan yang lebih tinggi yang harus dipenuhi oleh sekolah pada anak-anak mereka. Selebihnya, banyak orangtua ingin agar sekolah harus menjunjung tinggi disiplin dan moralitas di sekolah, terutama untuk anak perempuan. Di atas semua itu, semua orang tua Muslim ingin menjaga anak-anak mereka "agar tidak hancur" oleh budaya sekuler masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan keprihatinan tersebut mereka merasa bahwa yang terbaik dan satu-satunya pilihan bagi mereka adalah pendidikan Islam untuk mempersiapkan anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan non-Muslim.³⁵ Orang tua Muslim yang memilih sekolah Islam sebagai pilihan percaya bahwa sekolah-sekolah Islam ini

³⁵ Michael S. Merry (2005), h. 379.

akan membantu melestarikan budaya dan identitas mereka.

Dua tujuan kehadiran sekolah-sekolah Islam berasal dari motif-motif ini, yaitu untuk memperkuat rasa identitas murid, yaitu pengembangan kepribadian budaya dan agama dalam semangat Islam, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu prestasi akademik siswa. Bagi sebagian besar orang tua Muslim, tujuan pertama adalah yang paling penting.³⁶ Banyak orang tua menempatkan orientasi keagamaan di tingkat hierarki yang lebih tinggi dan di atas tujuan akademik.

Orang tua Muslim di negara-negara Barat menganggap penting memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari bahaya nilai-nilai sekuler yang lazim di masyarakat itu. Menjadi minoritas sebagai anggota dalam masyarakat tuan rumah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang orang tua lakukan. Dalam studi mereka, Van der Noll & Saroglou (2015) menyatakan bahwa,

It is broadly acknowledged, and founded in legislation, that ethnic, cultural and religious diversity is an inevitable characteristic of Western societies, and that this diversity should be accommodated, as long as it does not counteract the interests of public safety, endanger

³⁶ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 860.

*public order, health or morals, or infringe on the rights and freedoms of others.*³⁷

(Diakui secara luas dan dinyatakan dalam undang-undang bahwa keragaman etnis, budaya dan agama adalah karakteristik yang tak terhindarkan dari masyarakat Barat, dan bahwa keragaman ini harus diakomodasi, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dari keselamatan publik, membahayakan ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau melanggar hak dan kebebasan orang lain. Terjemah oleh penulis).

Van der Noll & Saroglou lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk kelompok minoritas harus diberi hak untuk merasakan menjadi anggota penuh dari masyarakat tuan rumah mereka, dengan hak dan kebebasan yang sama dengan populasi mayoritas. Perlu ditegaskan bahwa kebebasan dan kebutuhan sipil dasar mereka dihormati dan diakui, termasuk kebebasan untuk hidup dengan standar moral, seksual atau keluarga yang mereka sukai. Ini membutuhkan lebih dari sekadar toleransi, tetapi memerlukan pengakuan dan hak terlindungi untuk memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan publik. Harus ditekankan bahwa meskipun pengakuan terhadap hak-hak tidak mencakup penilaian moral atas praktik-praktik

³⁷ Jolanda van der Noll & Vassilis Saroglou (2015), "Anti-Islam or Anti-religion? Understanding Objection against Islamic Education", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41:2, DOI: 10.1080/1369183X.2014.931219, h. 220.

tertentu, tetapi berfungsi dalam batas-batas moral masyarakat.³⁸

Meskipun demikian, keinginan akan hadirnya pendidikan Islam sangat sering ditentang oleh masyarakat di Barat. Modood, seperti dikutip dalam Van der Noll & Saroglou, menyatakan bahwa *"the objection towards the accommodation of Islam can also be based on a general aversion towards religious presence in the public sphere, in which case people are more likely to prefer having no religious education in public schools at all"*³⁹ (Keberatan terhadap akomodasi Islam juga dapat didasarkan pada keengganan umum terhadap kehadiran agama di ruang publik, dalam hal ini orang lebih cenderung lebih memilih untuk tidak memiliki pendidikan agama di sekolah umum sama sekali. Terjemah oleh penulis). Temuan-temuan penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang lebih negatif terhadap minoritas lebih cenderung menentang pemberian hak dan kebebasan yang sama kepada populasi minoritas seperti halnya populasi mayoritas.⁴⁰

Selain itu, penelitian yang berfokus pada hak dan kebebasan Muslim di Eropa Barat, seperti yang ditunjukkan oleh Van der Noll & Saroglou, mengungkapkan bahwa keinginan untuk membatasi hak dan kebebasan Muslim

³⁸ Jolanda van der Noll & Vassilis Saroglou (2015), h. 220.

³⁹ Jolanda van der Noll & Vassilis Saroglou (2015), h. 221.

⁴⁰ Jolanda van der Noll & Vassilis Saroglou (2015), h. 221.

juga ditemukan di luar mereka yang memiliki sikap negatif terhadap Muslim. Ini berarti bahwa memiliki sikap positif terhadap umat Muslim tidak selalu berarti penerimaan dan dukungan. Pada akhirnya, Van der Noll & Saroglou menekankan bahwa keberatan terhadap ekspresi Islam dapat didasarkan pada penolakan umum terhadap agama di ruang publik, daripada keengganan terhadap Muslim atau Islam pada khususnya. Harus diperhatikan bahwa di sebagian besar masyarakat Eropa, kehadiran agama yang lebih besar di ruang publik dianggap bermasalah. Adalah penting untuk membuat umat Muslim sadar akan fenomena yang lebih baru, yaitu posisi minoritas (Muslim) dan kepatuhan terhadap budaya asal mereka telah ditantang di ruang publik, dan bahwa permintaan terhadap kaum minoritas untuk mengadopsi kebiasaan masyarakat tuan rumah meningkat pesat.⁴¹ Dengan demikian, penentangan terhadap hadirnya pendidikan Islam di tengah masyarakat Barat mungkin disebabkan oleh keengganan umum terhadap agama, bukan khusus untuk Islam.

D. Melestarikan Identitas keislaman

Peran atau fungsi lain dari pendidikan Islam yang diberikan kepada anak-anak Muslim di Belanda, menurut penulis adalah, untuk melestarikan identitas Islam agar dapat berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat *native*

⁴¹ Jolanda van der Noll & Vassilis Saroglou (2015), h. 223.

Belanda sebagai tuan rumah. Masalah identitas ini sangat sering ditentang oleh sebagian kelompok masyarakat tertentu di Belanda, meskipun sebagian kelompok masyarakat yang lain tidak mempermasalahkannya. Beberapa segmen dari masyarakat Belanda beranggapan bahwa nilai-nilai Islam yang coba dipraktikkan atau diterapkan oleh orang-orang Muslim dalam kehidupan mereka bertentangan dengan nilai-nilai liberal yang berlaku di Belanda atau Eropa secara umum.

Di Barat, aktor-aktor Muslim secara kolektif telah berjuang mendirikan sekolah-sekolah Islam sebagai tanggapan terhadap sekolah-sekolah publik (negeri) yang dianggap tidak mampu mengakomodasi keinginan mereka. Salah satu tujuan dari didirikannya sekolah tersebut adalah untuk berkontribusi pada pengamanan identitas Muslim dan membantu anak-anak untuk bangga dengan agama mereka.⁴² Dalam realitasnya, pihak berwenang dari beberapa negara di Eropa Barat, termasuk Belanda masih meragukan ketulusan imigran Muslim untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda. Namun, menurut Shadid & van Koningsveld pertanyaan dan keraguan seperti ini dianggap telah mencerminkan ketidaksiapan masyarakat di Eropa pada umumnya untuk menawarkan

⁴² Mark Halstead (2004), "An Islamic Concept of Education", *Comparative Education*, 40:4, DOI:10.1080/0305006042000284510, h. 520.

kesempatan kepada Muslim agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat lintas budaya dan ideologi serta sosial-ekonomi, yang pada saat yang sama hendak mempertahankan identitas keislaman mereka.⁴³

Penolakan yang muncul di kalangan masyarakat dan di arena politik terhadap keinginan umat Muslim untuk, misalnya, mengenakan jilbab, mendirikan sekolah Islam serta masjid masih sering terjadi dewasa ini. Dalam pandangan Shadid & van Koningsveld, hal itu terjadi karena minoritas Muslim belum diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal di masyarakat. Berkaitan dengan penolakan akan pendidikan Islam di Belanda, Shadid & van Koningsveld mengatakan, "*With regard to Islamic education, even though the freedom of religion and education is guaranteed by the Dutch Constitution, in fact the foundation of Islamic schools in the Netherlands did not proceed smoothly and raised a lot of debate*"⁴⁴ (Berkaitan dengan pendidikan Islam, meskipun kebebasan beragama dan pendidikan dijamin oleh Konstitusi Belanda, pada kenyataannya pendirian sekolah-sekolah Islam di Belanda tidak berjalan dengan lancar dan menimbulkan banyak perdebatan. Terjemah oleh penulis). Lebih lanjut, bahkan ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menyeru dan mendesak untuk menerapkan kebijakan

⁴³ W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1996), h. 110.

⁴⁴ W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1996), h. 110.

asimilasi alih-alih kebijakan integrasi dengan pemeliharaan budaya sendiri.⁴⁵

Masalah integrasi imigran Muslim ke dalam masyarakat tuan rumah telah menjadi perhatian utama pihak berwenang di Eropa. Oleh karena itu, pada awal 1990-an sebagian besar pemerintah di Eropa Barat menjadi semakin khawatir tentang bagaimana "mengintegrasikan" Muslim ke dalam masyarakat mereka, tentunya masing-masing sesuai dengan kerangka kerja politik mereka sendiri.⁴⁶ Beberapa pihak berwenang bahkan masih melihat Islam sebagai pengganggu dari luar yang harus dijinakkan. Ini bisa dilihat dari cara mereka membingkai proyek integrasi yang hendak mereka kembangkan.⁴⁷ Patut disayangkan, meskipun Islam telah menjadi bagian integral dari Eropa selama berabad-abad, ironisnya Islam dan Eropa saat ini masih digambarkan sebagai dua entitas yang berlawanan.⁴⁸ Menjadi seorang Muslim di Eropa sering membuat seseorang tersebut dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di arena politik misalnya, para aktor politik sering menganggap identitas Muslim sebagai tidak

⁴⁵ R. Penninx and H. Vermeulen (eds). (2000). *Immigrant Integration. The Dutch Case*, Amsterdam: Het Spinhuis.

⁴⁶ Thijs Sunier (2012), "Beyond the Domestication of Islam in Europe: A Reflection on Past and Future Research on Islam in European Societies", *Journal of Muslims in Europe* 1 (2012), DOI: 10.1163/22117954-12341236, h. 192.

⁴⁷ Thijs Sunier (2012), h. 196.

⁴⁸ Thijs Sunier (2012), h. 196.

sah, hal ini berbeda dari identitas agama lainnya.⁴⁹ Menurut Sunier, pergerakan identitas di kalangan Muslim di Belanda terjadi baru pada 1990-an. Sebelum periode itu menjadi Muslim dikaitkan dengan menjadi migran dan menjadi orang luar. Baru pada tahun 1990-an identitas Muslim kemudian diartikulasikan semakin kuat dalam masyarakat.⁵⁰ Bisa dikatakan bahwa Muslim dalam banyak kasus telah terpinggirkan baik dalam wacana politik maupun dalam kehidupan nyata sehari-hari di dalam masyarakat Belanda.

Melestarikan identitas Islam di negara-negara Barat, termasuk Belanda, bukanlah pekerjaan yang mudah bagi umat Muslim. Hal ini terjadi karena sejumlah masalah telah muncul antara kedua variable tersebut. Permasalahannya, seperti yang dijelaskan oleh Statham (2016), adalah sebagai berikut. *Pertama*, meskipun masyarakat Eropa secara umum menganggap diri mereka sekuler, agama Kristen telah memainkan peran sosial dan politik institusional yang berpengaruh, terlepas dari jumlah sebenarnya yang menjalankan ibadah. Pengaturan kelembagaan hubungan gereja-negara ini telah menentukan

⁴⁹ Corinne Torrekens & Dirk Jacobs (2016), "Muslims' religiosity and views on religion in six Western European countries: does national context matter?", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:2, DOI: 10.1080/1369183X.2015.1103032, h. 325.

⁵⁰ Thijs Sunier (2005), "Constructing Islam: Places of Worship and the Politics of Space in The Netherlands", *Journal of Contemporary European Studies*, 13:3, DOI: 10.1080/14782800500378409, h. 322.

kondisi yang sudah ada sebelumnya dan lingkungan politik di mana agama dari para imigran harus menegosiasikan ruang untuk komunitas mereka. *Kedua*, identifikasi agama adalah sistem kepercayaan yang dapat membentuk identitas inti, opini, dan perilaku politik seseorang. Seorang imigran yang religius dapat menganggap bahwa mempraktikkan agama itu sebagai tugas suci yang tidak dapat dikompromikan. *Ketiga*, sifat agama dari para imigran cenderung mempengaruhi sejauh mana para migran beradaptasi atau melawan ketika dihadapkan dengan budaya dominan. Dalam hal ini, pelaksanaan ibadah di ruang publik yang terkait dengan Islam bisa lebih menonjol dan terlihat, dan lebih sulit untuk dinegosiasikan dalam kehidupan publik masyarakat Barat, dibandingkan dengan agama-agama lain dari imigran non-Muslim di mana ibadah kebanyakan dilakukan secara pribadi.⁵¹

Untuk mempromosikan dan memperkuat proses pengintegrasian Muslim ke dalam masyarakat Belanda beberapa langkah strategis telah diambil oleh pihak berwenang. Ini bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah. Pada awal 2007, misalnya, pemerintah Belanda memperkenalkan apa yang disebut "pemeriksaan

⁵¹ Lihat Paul Statham (2016), "How Ordinary People View Muslim Group Rights in Britain, The Netherlands, France and Germany: Significant 'Gaps' Between Majorities and Muslims?", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:2, DOI: 10.1080/1369183X.2015.1082288, h. 219.

integrasi sipil" yang mencakup unsur bahasa dan serangkaian pertanyaan tentang sejarah dan masyarakat Belanda.⁵² Tentunya banyak orang akan setuju bahwa pendidikan kewarganegaraan jelas harus menjadi faktor utama dalam menyelesaikan sejumlah ketegangan. Ketika rasa kohesi nasional dan solidaritas kolektif runtuh, maka sekolah harus menjadi salah satu tempat utama untuk menciptakan solidaritas dan kohesi itu.⁵³

Tinker & Smart (2012) dalam studi mereka tentang masalah konstruksi identitas kolektif di Inggris, merangkum bahwa "*heterogeneity in the construction and expression of Muslim identities must be recognized*" (heterogenitas dalam konstruksi dan ekspresi identitas Muslim haruslah diakui) dan itu telah meminggirkan pertanyaan tentang koherensi dan stabilitas identitas Muslim kolektif. Studi mereka bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana identitas Muslim kolektif dibangun dan diekspresikan dalam arena perdebatan klaim untuk sekolah-sekolah Muslim, dan berusaha untuk memeriksa atau menegaskan apa itu identitas Muslim kolektif yang paling umum, dan apa yang mungkin menjadi bentuk dan makna

⁵² Lihat Jørgen S. Nielsen (2015), "Citizenship Education in Multi-cultural Societies", dalam Ednan Aslan and Marcia Hermansen (eds.), *Islam and Citizenship Education*, Dordrecht: Springer, h. 59.

⁵³ Jørgen S. Nielsen (2015), h. 64.

dominan dalam identitas Muslim kolektif di dalam konteks ini.⁵⁴

Mengungkap temuan penelitian mereka, Tinker & Smart menulis bahwa tema menyeluruh yang muncul dari analisis data adalah persepsi bahwa identitas Muslim berada di bawah ancaman dan atau serangan, dan bahwa sekolah Muslim yang terpisah atau mandiri merupakan sarana perlindungan atau pertahanan yang tepat.⁵⁵ Kurangnya pengetahuan agama dikatakan telah menjadi perhatian responden yang diwawancarai dalam penelitian Tinker & Smart tersebut. Para responden mendukung pendapat bahwa sekolah-sekolah Islam paling baik melayani kepentingan umat Muslim. Studi ini juga mengungkapkan sudut pandang bahwa pengajaran agama adalah bagian penting dari pendidikan tampaknya berakar pada ketakutan bahwa kurangnya pengetahuan tentang Islam dapat mengakibatkan anak kehilangan identitas Muslim mereka dan tidak menjadi apa-apa.⁵⁶ Demikian juga, pandangan responden juga mengekspresikan adanya perbedaan yang dirasakan antara nilai-nilai Islam dan sekuler, dan memposisikan sekolah-sekolah

⁵⁴ Lihat Claire Tinker & Andrew Smart (2012), "Constructions of collective Muslim identity by advocates of Muslim schools in Britain", *Ethnic and Racial Studies*, 35:4, DOI: 10.1080/01419870.2011.577899, h. 645.

⁵⁵ Claire Tinker & Andrew Smart (2012), h. 650.

⁵⁶ Claire Tinker & Andrew Smart (2012), h. 651.

Muslim sebagai sarana melindungi identitas kolektif. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah Muslim dipandang sebagai cara menanamkan identitas kolektif yang berakar pada moral dan perilaku yang baik.⁵⁷

Dalam penelitian tersebut, para pendukung sekolah-sekolah Islam di Inggris dilaporkan telah memohon dan memobilisasi ide-ide tentang identitas Muslim kolektif yang didasarkan pada persepsi mereka bahwa mereka berbagi dengan Muslim lain baik nilai-nilai pengetahuan dan praktik dan atau pengalaman hidup yang berkaitan dengan identitas sosial yang direndahkan. Namun demikian, tidak diklaim bahwa ini merupakan karakteristik penting dari identitas Muslim kolektif. Menurut Tinker & Smart identitas Muslim kolektif yang diungkapkan oleh responden sesuai atau cocok dengan minat bersama mereka dalam menginginkan penyediaan sekolah terpisah dan mandiri dalam kondisi sosial di mana mereka menganggap diri mereka berada di bawah ancaman atau serangan.⁵⁸ Tampaknya, apa yang dirasakan oleh Muslim di Belanda juga dialami oleh Muslim di Inggris, yakni mereka merasa identitas kolektif mereka di bawah ancaman dan untuk menangkalnya mereka (kaum Muslim) di sana menginginkan adanya penyediaan

⁵⁷ Claire Tinker & Andrew Smart (2012), h. 652.

⁵⁸ Claire Tinker & Andrew Smart (2012), h. 660.

sekolah terpisah, yakni sekolah berdasarkan agama mereka (Islam).

Perjuangan yang telah dilakukan oleh kaum Muslim imigran, sebagai minoritas, untuk mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk Sekolah Islam di negeri Belanda itu menurut hemat penulis bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk gerakan sosial, yang tentunya tidak menjerus atau mengandung kekerasan. Gerakan sosial sebagaimana yang diartikulasikan oleh Sidney G. Tarrow (2011) bukanlah ekspresi dari ekstremisme dan kekerasan, tetapi lebih sebagai tantangan kolektif, berdasarkan tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi berkelanjutan dengan para elit, lawan, dan pihak berwenang, sebagaimana yang ia katakan gerakan sosial sebagai, "*collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and authorities*"⁵⁹. Kalau kita lihat secara cermat definisi gerakan sosial yang disampaikan oleh Tarrow ini memiliki empat unsur yakni (1) tantangan kolektif, (2) tujuan bersama, (3) solidaritas sosial, dan (4) interaksi yang berkelanjutan. Pada kenyataannya, empat unsur yang dinyatakan dalam definisi gerakan sosial oleh Tarrow tersebut semuanya ada dan berperan dalam proses

⁵⁹ Lihat Sidney G. Tarrow (2011), *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, Revised and Updated Third Edition, Cambridge: Cambridge University Press, h. 9.

pendirian sekolah Islam oleh Muslim imigran di Belanda, sebagaimana yang akan kita lihat dalam pembahasan-pembahasan berikutnya dalam studi ini nanti.

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Bab ini membahas tentang persepsi masyarakat Belanda terhadap keberadaan pendidikan Islam di negara tersebut. Untuk sampai pada pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah ini, maka poin-poin berikut akan dibahas secara detail. Poin tersebut meliputi: sistem Pilarisasi Belanda, ini untuk memberikan pengetahuan tentang sistem yang mengatur kehidupan politik masyarakat Belanda di masa lalu. Berikutnya adalah pembahasan tentang konstitusi dan kebebasan pendidikan, ini untuk mengetahui landasan

hukum di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, perdebatan tentang keinginan akan adanya pendidikan Islam, ini untuk mengetahui keadaan saat ini yang menilai penerimaan orang-orang Belanda terhadap pendidikan Islam di sana. Yang terakhir adalah kinerja sekolah-sekolah Islam di Belanda, untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kualitas pendidikan Islam dalam lanskap sistem pendidikan Belanda.

A. Mengenal Sistem Pilarisasi Belanda

Orang-orang Muslim di Belanda sekarang sudah memiliki sekolah Islam yang mereka butuhkan untuk menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Tentunya kondisi seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali ada faktor-faktor yang mendukungnya. Salah satu faktor yang mendukung pendirian pendidikan Islam (sekolah Islam) di negara sekuler seperti Belanda, dalam pandangan penulis, adalah sistem pilarisasi yang ada di masyarakat Belanda. Begitu umat Islam menjadi lebih akrab dengan sistem pilarisasi yang ada di masyarakat Belanda, mereka segera mendirikan organisasi mereka sendiri, seperti stasiun penyiaran Islam, pusat pekerjaan sosial dan sekolah. Inisiatif lokal dan bahkan nasional ini kemudian membuat Islam dan penganutnya (Muslim) menjadi lebih terlihat nyata eksistensinya di dalam masyarakat Belanda.¹

¹ Lihat K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), "Half A Century of Islamic Education in Dutch Schools",

Belanda adalah sebuah negara sekuler dan telah menjadi salah satu bangsa paling sekuler di dunia.² Negara ini tidak memiliki gereja resmi yang mapan dan ia netral untuk semua agama.³ Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam pasal 1 Konstitusi Belanda yang memberikan hak atas perlakuan yang sama dan melarang diskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, aliran politik, ras, jenis kelamin atau alasan lainnya. Kebebasan untuk mempraktikkan ajaran agama juga dijamin oleh pasal 6 Konstitusi selama praktik-praktik ini berada dalam batas-batas hukum.⁴ Meskipun tidak memiliki agama resmi, hubungan antara negara dan agama selalu diwarnai dengan keterlibatan negara yang luas terhadap ekspresi agama dalam kehidupan publik.⁵ Situasi ini dapat dilihat dengan adanya sistem pilarisasi yang berlaku di masyarakat. Dalam sistem ini masyarakat itu digambarkan sebagai "*deeply divided into distinct and mutually antagonistic religious and*

British Journal of Religious Education, DOI: 10.1080/01416200.2015.112839, h. 6.

² Lihat Frank Van Tubergen (2007), "Religious Affiliation and Participation among Immigrants in A Secular Society: A Study of Immigrants in The Netherlands", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 33:5, DOI: 10.1080/13691830701359181, h. 749.

³ Lihat Saskia Van Genugten (2013), "The Netherlands and Islam: In Defence of Liberalism and Progress?", *The International Spectator*, 48:1, DOI: 10.1080/03932729.2013.758906, h. 78.

⁴ Saskia Van Genugten (2013), h. 78.

⁵ Lihat Martijn De Koning (2014), "Netherlands", dalam Jørgen S. Nielsen (Editor-in-Chief), *Yearbook of Muslims in Europe Volume 1*, Leiden: Brill, h. 441.

ideological groups, but the overarching cooperation of 'pillarisation' at the elite level and the maximum autonomy allowed for each group made stable democracy possible"⁶ (sangat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok agama dan ideologis yang berbeda dan saling bermusuhan, tetapi kerja sama yang luas dari 'pilarisasi' di tingkat elit dan otonomi maksimum yang diperbolehkan untuk setiap kelompok telah memungkinkan adanya demokrasi yang stabil. Terjemah oleh penulis).

Di Belanda sistem pilarisasi sudah lama terjadi di masa lalu dan mencapai puncaknya pada paruh pertama abad kedua puluh. Pada periode 1880-1960, komunitas ideologis utama masing-masing memiliki pilar dengan lembaga sosialnya sendiri, seperti partai politik, sekolah, koran, serikat buruh, stasiun penyiaran, rumah sakit, universitas dan fasilitas rekreasi, yang mendukung etos dan gaya hidup Protestan, Katolik, sosialis dan liberal yang terpisah.⁷ Kedua proses tersebut terjadi secara bersamaan dalam sistem ini, yaitu munculnya identitas khas masing-masing kelompok agama atau batas-batas sosial, budaya, ekonomi dan moral. Sementara itu, menteri dan

⁶ Martijn De Koning (2014), h. 441.

⁷ Welmoet Boender (2013), "Embedding Islam in the 'Moral Covenant' of European States: The Case of a State-Funded Imam Training in the Netherlands", *Journal of Muslims in Europe* 2 (2013), DOI: 10.1163/22117954-12341265, h. 238.

pendeta memainkan peran penting dalam menandai batas-batas komunitas Protestan dan Katolik.⁸ Dalam sistem ini setiap "pilar" memiliki hak yang sama untuk mendapat subsidi pemerintah, terutama untuk mendirikan sekolah dan universitas mereka sendiri. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan prasyarat yang diperlukan untuk perlakuan yang sama, berkonsentrasi dalam pendidikan.⁹ Pilarisasi dapat dipahami sebagai model netralitas di mana semua identitas kolektif memiliki hak yang sama untuk mewujudkan diri di depan umum. Itulah sebabnya dalam kehidupan publik Belanda agama bisa terlihat sangat nyata.¹⁰

Menguraikan sistem pendidikan Belanda yang terpolarisasi, Genç *et al.* (2012) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa orang tua Muslim di Belanda, setelah menyadari adanya keinginan untuk menggunakan hak mereka menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka sesuai dengan pandangan dunia mereka sendiri dan sesuai dengan kebebasan pendidikan konstitusional, maka mereka mendirikan sekolah-sekolah denominasi Islam. Genç *et al.* juga menjelaskan bahwa seperti semua sekolah di Belanda, sekolah Islam didanai oleh negara, dan

⁸ Welmoet Boender (2013), h. 238.

⁹ Welmoet Boender (2013), h. 239.

¹⁰ Sawitri Saharso (2007), "Headscarves: A Comparison of Public Thought and Public Policy in Germany and the Netherlands", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 10:4, DOI: 10.1080/13698230701660204, h. 518.

tunduk pada Inspektorat Pendidikan Belanda untuk kualitas kurikulum dan pelajaran mereka, kecuali untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam. Juga dikatakan bahwa di sekolah-sekolah Islam, model pengajaran dalam agama lebih disukai dalam Pendidikan Agama. Selain itu, sekolah-sekolah ini juga harus memasukkan pelajaran "Filosofi Kehidupan Agama dan Sekuler" kedalam kurikulum reguler mereka.¹¹

Seiring berjalannya waktu dan proses sekularisasi di Belanda yang semakin gencar, pilar-pilar tradisional di masyarakat Belanda telah menurun tajam. Hal ini telah terjadi sejak 1960-an. Namun di sektor pendidikan, sampai batas tertentu, warisan era pilarisasi masih tetap terasa dan tidak terputus.¹² Ini berarti bahwa struktur organisasi hukum yang ada dapat memfasilitasi proses pelembagaan mendirikan sekolah Islam, fasilitas penyembelihan halal dan penyiaran Islam.¹³ Dengan demikian, umat Muslim masih dapat memanfaatkan peninggalan situasi dari masa-masa pilarisasi.

¹¹ Fatih Genç, Ina ter Avest, Siebren Miedema & Wim Westerman (2012), "A conversational analysis of developments in religious education in Europe and in Turkey", *British Journal of Religious Education*, 34:3, 281-297, DOI: 10.1080/01416200.2011.649346, h. 286.

¹² Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), "On The Right Track? Islamic Schools in The Netherlands after An Era of Turmoil", *Race Ethnicity and Education*, 19:4, DOI: 10.1080/13613324.2014.985586, h. 860.

¹³ Welmoet Boender (2013), h. 239.

Kekayaan utama model multikultural Belanda adalah melembagakan pluralisme budaya dengan keyakinan bahwa emansipasi budaya kelompok minoritas imigran adalah kunci integrasi mereka ke dalam masyarakat Belanda. Pandangan ini telah mengakar sejak zaman sistem pilarisasi di Belanda.¹⁴ Lebih jauh, pilarisasi dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang dibebaskan dengan memberi mereka kesempatan yang sama melalui lembaga-lembaga keagamaan tempat mereka berafiliasi. Tujuan akhir dari emansipasi ini adalah terwujudnya integrasi para imigran di negara tuan rumah ini. Karena agama merupakan faktor penting dalam emansipasi minoritas, sebagaimana dicatat oleh laporan negara tahun 1983 tentang kebijakan minoritas formal,¹⁵ maka dengan demikian upaya pemerintah untuk mendorong mereka untuk berpartisipasi melalui lembaga agama mereka merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan.

Sebagai pendatang baru di dalam masyarakat Belanda, umat Muslim harus diberi struktur kelembagaan untuk berintegrasi sambil tetap mempertahankan identitas mereka sendiri, sebagai akibat wajar dari masa-masa

¹⁴ Lihat Christophe Bertossi, Jan Willem Duyvendak & Peter Scholten (2015), "The Coproduction of National Models of Integration: A View from France and the Netherlands", dalam Peter Scholten, Han Entzinger, Rinus Penninx, Stijn Verbeek (eds.), *Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues*, Dordrecht: Springer, h. 64.

¹⁵ Welmoet Boender (2013), h. 240.

yang terpolarisasi. Ini adalah motto dalam kebijakan integrasi hingga pertengahan 1990-an.¹⁶ Dalam kaitannya dengan hal ini Boender menyatakan:

"As in the times of pillarization, this encouraged form of emancipation stimulated a simultaneous identity of being 'Muslim' and 'Dutch,' as in the early 20th century the Catholic pillar emancipated the Catholics by making it possible to be both 'Catholic' and Dutch -- two identities which previously excluded each other."¹⁷

(Seperti pada masa-masa pilarisasi, bentuk emansipasi yang dianjurkan ini telah menstimulasi identitas simultan untuk menjadi "Muslim" dan "Belanda", seperti pada awal abad ke-20 pilar Katolik membebaskan umat Katolik dengan memungkinkan menjadi "Katolik" dan Belanda -- dua identitas yang sebelumnya saling mengecualikan. Terjemah oleh penulis).

Menyadari adanya agitasi yang berkembang di Barat melawan Islam militan, dan adanya materialisme yang menghantam generasi kedua, maka orang tua Muslim lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan sebuah identitas Islam yang konsisten dengan kewarganegaraan

¹⁶ Welmoet Boender (2013), h. 240.

¹⁷ Welmoet Boender (2013), h. 240.

Barat.¹⁸ Dalam konteks ini, penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat saat ini. Tidak mudah bagi pemerintah Belanda untuk meyakinkan dan membujuk umat Muslim di negara ini untuk menerapkan toleransi dan menyerap serta mempraktikkan nilai-nilai Belanda yang liberal sementara hak-hak mereka sendiri (Muslim) untuk berkumpul dipantau terus-menerus. Mungkin sebagian dari mereka akan merasa hal tersebut sebagai kondisi yang tidak adil.

Solidaritas sosial adalah salah satu sifat dari sebuah gerakan sosial sebagaimana telah didefinisikan oleh Tarrow. Solidaritas sosial di kalangan Muslim imigran di Belanda (orang-orang Maroko dan Turki) berasal dari perasaan mereka bahwa mereka adalah imigran di negara ini. Terlepas dari perbedaan etnis yang mereka bawa dari negara asalnya, mereka dipersatukan oleh fakta bahwa mereka memeluk agama yang sama yaitu Islam. Tampaknya Islam adalah identitas yang ingin mereka jaga dan ingin mereka berikan kepada anak-anak. Mereka ingin menjadi warga negara Belanda tetapi tanpa harus kehilangan identitas mereka sebagai Muslim. Dalam sebuah kesempatan perbincangan (wawancara) yang penulis

¹⁸ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005). "Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure", *Comparative Education*, 41:4, DOI: 10.1080/03050060500300931, h. 423.

lakukan kepada seorang Imam Masjid dari komunitas etnis Maroko di Leiden yang menangani pendidikan agama di masjid (semacam pendidikan diniyah di Indonesia), dijelaskan oleh sang Imam bahwa para orang tua yang mengirimkan anak-anaknya ke pendidikan masjid tersebut memiliki tujuan agar anak-anak mereka memiliki pengetahuan agama Islam yang cukup untuk membentengi mereka dari nilai-nilai liberal masyarakat sekuler. Mereka tidak keberatan dengan tuntutan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat tuan rumah atau masyarakat asli Belanda. Bahkan ruangan kelas yang ada di dalam bangunan masjid yang digunakan untuk pembelajaran didekorasi dengan warna dominan oranye. Penulis mendapat *privilege* karena diajak masuk oleh sang Imam untuk melihat-lihat ke dalam ruangan kelas yang dipakai untuk pembelajaran dan dapat mengobservasi atau mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan. Terhadap pertanyaan penulis, "mengapa tembok kelas didekorasi dan dicat dengan warna oranye?" Sang Imam menjelaskan bahwa oranye adalah warna khas Belanda. Sang Imam mengatakan bahwa sebagai warna negara Belanda orang-orang Muslim dari etnis Maroko harus bangga dengan cirikhas Belanda tersebut. Sang Imam juga menambahkan bahwa mengasosiasikan diri mereka dengan warna oranye juga merupakan simbol atau bentuk integrasi sosial mereka ke

dalam masyarakat lokal Belanda. Namun demikian, untuk urusan keyakinan atau agama mereka mengatakan tidak akan menghilangkan identitas mereka sebagai Muslim meskipun ada tuntutan untuk berhentinya dari identitas tersebut.¹⁹ Solidaritas sosial berbasis agama ini menguatkan pandangan Anderson (dikutip dalam Tarrow) yang menyatakan bahwa agama adalah dasar yang dapat diandalkan untuk organisasi gerakan, selain nasionalisme dan etnis.²⁰

Dengan tumbuh dan berkembangnya sekolah Islam, masjid dan pusat-pusat Islam, orang-orang mungkin berpikir bahwa pilar Islam sedang dibangun di Belanda. Namun demikian, para penentang akan melihat bahwa hal itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. Sebagai contoh, Spieker & Steutel, seperti dikutip oleh Merry & Driessen, mengatakan bahwa "*creating a separate Islamic pillar was both undesirable and unfeasible*" (menciptakan pilar Islam yang terpisah itu tidak diinginkan dan tidak layak). Alasannya menurut dia adalah bahwa sekularisasi yang terjadi di masyarakat Belanda tidak mendukung

¹⁹ Percakapan pribadi dan wawancara melalui (penulis buku ini) dengan Meneer Abdul Hamid, Imam dan pengurus di *Islamitich Centrum Imam Malik* (ICIM) Al-Hijra Leiden, pada Kamis 12 Januari 2017 di Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden, Nederland.

²⁰ Sidney G. Tarrow (2011), *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, Revised and Updated Third Edition, Cambridge: Cambridge University Press, h. 11.

adanya pilar agama baru. Selain itu, pilar-pilar klasik Belanda mampu mencapai kekuatan politik yang luas karena mencakup kelompok-kelompok yang relatif besar dan secara ideologis mereka adalah kelompok yang homogen. Sementara itu, dalam kasus komunitas Muslim di Belanda jumlah mereka terlalu kecil dan terlalu beragam dalam hal etnis, negara asal, bahasa yang digunakan, afiliasi politik dan interpretasi Islam.²¹ Secara alamiah, hal-hal seperti ini akan mempersulit pemerintah Belanda, dalam hal siapa yang harus diajak bicara dan siapa yang paling memenuhi syarat untuk mewakili Islam dan Muslim.

B. Konstitusi dan Kebebasan Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan dimungkinkannya pengadaan atau penyelenggaraan pendidikan Islam di Belanda, menurut hemat penulis, adalah karakter Konstitusi Belanda. Muslim dapat mendirikan sekolah-sekolah Islam di Belanda karena sifat konstitusi Belanda. Pasal 23 Konstitusi Belanda menjamin kebebasan pendidikan dan adanya "kesetaraan berdasarkan undang-undang" dari sekolah negeri dan sekolah non-pemerintah atau sekolah denominasi. Semuanya didanai oleh negara sesuai dengan kriteria yang setara.²²

²¹ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 862.

²² Marcel Maussen & Floris Vermeulen (2015), "Liberal Equality and Toleration for Conservative Religious Minorities. Decreasing Opportunities for Religious Schools in The Netherlands?", *Comparative Education*, 51:1, DOI: 10.1080/03050068.2014.935576, h. 90.

Dengan adanya kebebasan pendidikan yang dijamin oleh Konstitusi Belanda maka umat Muslim di Belanda dapat mendirikan sekolah Islam. Berdasarkan jaminan Konstitusi, fasilitas yang diberikan kepada orang Kristen juga harus ditawarkan kepada umat Muslim. Tentunya hal ini bisa terjadi setelah beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dipenuhi terlebih dahulu.²³ Dalam kaitannya dengan masalah ini Shadid & van Koningsveld menulis, "*Religious freedom, freedom of speech and the equality of all individuals, irrespective of their ethnicity, religion or gender, are after all the foundation on which the Dutch Constitution is based*"²⁴ (kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan kesetaraan semua individu, terlepas dari etnis, agama atau jender mereka, pada dasarnya adalah fondasi yang mendasari Konstitusi Belanda. Terjemah oleh penulis).

Persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk mendirikan sekolah Islam adalah sebagai berikut: sekolah tersebut harus dihadiri oleh jumlah minimum siswa (setidaknya 200, tergantung pada tingkat urbanisasi), ba-

²³ Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), "Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?", *Interchange*, 37:3, DOI 10.1007/s10780-006-9001-0, h. 203-204.

²⁴ Lihat W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1996), "Dutch Political Views on the Multicultural Society", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe*, Kampen: Pharos, h. 109.

hasa pengantar harus bahasa Belanda, guru harus memenuhi persyaratan yang memadai, dan kurikulum harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pendidikan Dasar. Konstitusi yang mengatur hal ini sudah spesifik dan eksplisit sehingga pemerintah daerah tidak dapat mencegah pendirian sekolah Islam, namun demikian dalam praktiknya pendirian sekolah Islam tidak selalu mudah.²⁵

Meskipun Konstitusi Belanda menjamin kebebasan beragama dan kebebasan memilih pendidikan namun dalam kenyataannya di kalangan masyarakat Belanda sendiri masih ada orang yang menentang adanya pendidikan atau pendirian sekolah Islam oleh Muslim di Belanda. Mengenai hal ini, Shadid & van Koningsveld menjelaskan secara detail sebagai berikut:

"Generally speaking, two main objections have been raised against the foundation of Islamic schools. These objections can be characterized as paternalistic and figurative and are easy to refute. First of all it has been argued that such schools would constrain the integration of the groups concerned, because contacts between children from different ethnic backgrounds would be minimized. This argument does not carry much weight as one can observe that the phenomenon of the so-called 'black' and 'white' schools has become a reality within the sector of public schools over the past decades. In fact, one fifth of the primary schools in

²⁵ Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), h. 203-204.

*the four major cities in the Netherlands include more than 70% of pupils from minority groups. These figures clearly indicate that ethnically separated education has been a fact for a long time. The second objection concerns the assumption that this type of school is outdated because the Netherlands is already depillarized. But it is also a fact that at present 60% of the primary school in the country (5,000 school) belong to the confessional type and that the thirty Islamic schools make up only a fraction of this total. The aforementioned clearly indicates that the juridical integration of Muslim in the Netherlands, i.e. the opportunities laid down in the constitution, develops at a greater pace than the social acceptance of the pluralistic aspects of that constitution."*²⁶

(Secara umum, ada dua keberatan utama telah diajukan terhadap pendirian sekolah-sekolah Islam. Keberatan ini dapat dikategorikan sebagai paternalistik dan figuratif dan mudah disangkal. Pertama-tama telah dikemukakan bahwa sekolah-sekolah semacam itu [sekolah Islam] akan membatasi integrasi kelompok-kelompok yang bersangkutan, karena kontak antara anak-anak dari berbagai latar belakang etnis akan diminimalkan. Argumen ini tidak memiliki banyak bobot karena orang dapat mengamati bahwa fenomena yang disebut sekolah "hitam" dan "putih" telah menjadi kenyataan di sektor sekolah umum selama beberapa dekade terakhir. Bahkan, seperlima dari sekolah dasar di empat kota besar di Belanda telah mencakup lebih dari 70% siswa dari kelompok minoritas. Angka-angka ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan yang terpisah

²⁶ W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (1996), h. 110.

secara etnis telah menjadi fakta sejak lama. Keberatan kedua berkaitan dengan asumsi bahwa jenis sekolah ini sudah usang karena Belanda sudah didepilarisasi. Tetapi juga fakta bahwa saat ini 60% dari sekolah dasar di negara itu (5.000 sekolah) termasuk dalam tipe pengakuan dan bahwa ketiga puluh sekolah Islam hanya merupakan sebagian kecil dari total ini. Yang disebutkan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa integrasi yuridis Muslim di Belanda, yaitu peluang yang ditetapkan dalam konstitusi, berkembang pada kecepatan yang lebih besar daripada penerimaan sosial dari aspek pluralistik konstitusi itu. Terjemah oleh penulis).

Meskipun konstitusi Belanda menyatakan dukungannya bagi kebebasan beragama dan pendidikan, tetapi dalam praktiknya, di dalam masyarakat Belanda sendiri banyak orang yang menentang pendirian lembaga pendidikan atau sekolah Islam oleh kaum Muslim di negara ini. Ada juga inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah Islam di Belanda. Faktanya, setelah pembunuhan pembuat film Belanda Theo van Gogh pada tahun 2004 oleh seorang Muslim radikal, sekolah-sekolah Islam mendapat banyak kecaman.²⁷

Sekarang pendidikan Islam, khususnya masa depan sekolah-sekolah Islam menghadapi dilema. Selain orang awam, beberapa partai politik di Belanda juga memberi

²⁷ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 856.

reaksi terhadap keberadaan sekolah Islam. Partai Liberal bahkan ingin menghentikan ekspansi sekolah Islam di masa depan. Partai Liberal dalam kesempatan debat politik secara terbuka ingin agar ekspansi sekolah Islam dihentikan. Kaum liberal berasumsi bahwa sekolah Islam akan menjadi tempat untuk mengindoktrinasi siswa agar menjadi anti-Barat, anti-demokrasi dan menentang integrasi. Oleh karena itu, Partai Liberal mendorong perlunya sekolah campuran, karena mereka pikir ini adalah model sekolah yang akan membuat anak-anak Muslim menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat Belanda.²⁸

Didorong oleh rasa curiga terhadap peran sekolah-sekolah Islam dalam pembentukan mental dan karakter para siswa, Inspektorat Pendidikan Belanda melakukan penelitian sendiri pada tahun 2002 untuk menentukan apakah sekolah-sekolah Islam melakukan tugas mereka untuk membantu murid-murid mereka berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda. Hasilnya cukup positif, karena lebih dari 90% sekolah secara memuaskan telah melakukan tugas mereka untuk membantu dalam proses integrasi. Misalnya, sikap terhadap masyarakat Belanda secara umum dianggap baik.²⁹ Selain itu, ada fakta bahwa dalam periode waktu yang relatif singkat, sekolah-sekolah Islam diperiksa secara intensif oleh pemerintah Belanda

²⁸ Geert Driessen & Michael S. Merry (2006), h. 215.

²⁹ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 863.

lebih dari sekali. Sebenarnya, tindakan semacam itu tidak biasa karena penyelidikan serupa tidak dilakukan terhadap sekolah-sekolah lain dari denominasi yang berbeda. Pada tahun 2002, misalnya, Dinas Rahasia Belanda melakukan penyelidikan terhadap pendidikan (sekolah) Islam untuk menentukan apakah sekolah tersebut berpotensi mengancam norma-norma demokrasi, dan juga untuk melihat apakah ada bukti infiltrasi asing dalam perencanaan dan gagasan di balik pendidikan Islam di Belanda. Kesimpulan dari investigasi ini adalah bahwa sekitar 20% dari sekolah Islam menerima beberapa bantuan keuangan, atau memiliki kontak secara reguler dengan organisasi Islam asing seperti *al-Waqf al-Islami*.³⁰ Temuan ini membuat pemerintah Belanda tidak nyaman dan pada gilirannya dapat menyebabkan pemerintah meningkatkan kontrolnya terhadap sekolah-sekolah Islam di negara ini.

Kebebasan untuk mendirikan sekolah, mengaturnya, dan menentukan prinsip-prinsip dasarnya menjadi dasar berbagai sekolah di Belanda. Ada dua kategori, yaitu sekolah publik (negeri) dan sekolah denominasi (misalnya Katolik Roma, Protestan). Menurut ketentuan Konstitusi, semua sekolah didanai atas dasar kesetaraan. Dengan demikian, konsekuensi dari ini adalah bahwa

³⁰ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 863.

fasilitas yang disediakan untuk orang Kristen tidak dapat ditolak untuk umat Islam. Selama sejumlah persyaratan telah dipenuhi, setiap sekolah berhak atas pendanaan penuh dari pemerintah.³¹ Karena undang-undang ini cukup spesifik dan eksplisit, sulit bagi otoritas lokal untuk mencegah pendirian sekolah-sekolah Islam.³² Dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa Barat, Belanda saat ini memiliki jumlah sekolah Islam terbesar yang didanai. Ini adalah konsekuensi logis dari penetapan peraturan yang baik dan jelas tentang pendirian sekolah. Karena pengajaran agama Islam hampir sepenuhnya absen dari sekolah umum (negeri), dan karena banyak siswa Muslim menerima kursus tentang agama Kristen, ada kebutuhan besar untuk didirikannya sekolah-sekolah Islam di Belanda karena jumlah siswa Muslim yang membutuhkan pengajaran agama Islam juga besar.³³

Ketika kaum Muslim mulai memahami Konstitusi Belanda dan setelah menyadari akan hak-hak yang mereka miliki, akhirnya komunitas Muslim di Belanda berani menuntut pemerintah Belanda untuk memberikan izin bagi mereka untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam supaya

³¹ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), "Background and Achievement Levels of Islamic Schools in the Netherlands: Are The Reservations Justified?", *Race Ethnicity and Education*, 2:2, DOI: 10.1080/1361332990020205, h. 238.

³² Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 238.

³³ Geert W. J. M. Driessen & Jeff J. Bezemer (1999), h. 240.

anak-anak mereka dapat memiliki pendidikan agama untuk melindungi mereka dari korupsi oleh nilai-nilai tidak Islami yang berlaku di dalam masyarakat Belanda yang sekuler. Hal ini benar-benar menegaskan apa yang disebut Tarrow sebagai "tantangan kolektif" (properti pertama dalam definisi Tarrow tentang gerakan sosial, sebagaimana dijelaskan pada bagian yang lalu). Tantangan kolektif secara sederhana bisa dimaknai sebagai tantangan yang kontroversial melalui tindakan langsung yang mengganggu elit, otoritas, kelompok lain di luar atau kode budaya, "it mounts contentious challenges through disruptive direct action against elites, authorities, other groups, or cultural codes".³⁴ Tujuan bersama yang dimiliki komunitas Muslim di negeri Belanda adalah melindungi agama mereka dan meneruskan atau mewariskan budaya mereka kepada anak-anak untuk melestarikan identitas keIslaman mereka.³⁵ Faktanya, seperti yang dikatakan Hussain, apa yang dirasakan oleh umat Muslim di Belanda menemukan pembenaran teologisnya dalam kenyataan bahwa pendidikan Islam untuk umat Muslim hanyalah salah satu elemen dari teologi Islam yang lebih luas di mana

³⁴ Sidney G. Tarrow (2011), h. 10.

³⁵ Michael S. Merry (2005), "Advocacy and Involvement: The Role of Parents in Western Islamic Schools", *Religious Education*, 100(4), 374-385. DOI: 10.1080/00344080500308512, h. 379.

keunggulan ilmu pengetahuan dan realitas manusia serta realitas sekuler dianggap tidak ada.³⁶

Merry & Driessen melaporkan temuan investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Belanda pada 1999, 2002 dan 2003. Kesimpulannya mengatakan bahwa, "almost all of the Islamic schools have an open attitude towards Dutch society and play a positive role in creating conditions for social cohesion"³⁷ (hampir semua sekolah Islam memiliki sikap terbuka terhadap masyarakat Belanda dan memainkan peran positif dalam menciptakan kondisi untuk kohesi sosial. Terjemah oleh penulis). Namun sebaliknya, Layanan Keamanan Internal (ISS) dalam laporannya pada tahun 1998 mengklaim bahwa ada campur tangan kekuatan asing (misalnya Arab Saudi) dan organisasi politik-Islam dengan konten pendidikan Islam. Laporan itu mengatakan bahwa beberapa sekolah telah menerima sumbangan dari organisasi *Al-Waqf al-Islami* yang menyebarkan pandangan dunia politik-keagamaan yang sangat ortodoks dan tidak toleran terhadap Muslim liberal, Yahudi dan Kristen.³⁸ Masalah ini tampaknya mendorong

³⁶Amjad Hussain (2010), "Islamic Education in the West: Theoretical Foundations and Practical Implications", In Kath Engebretson, Marian de Souza, Gloria Durka and Liam Gearon (eds.), *International Handbook of Inter-religious Education*. Dordrecht: Springer, pp. 235-248, h.236.

³⁷ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), "Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure", *Comparative Education*, 41:4, DOI: 10.1080/03050060500300931, h. 422.

³⁸ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), h. 423.

konsekuensi yang kurang menyenangkan. Pendapat masyarakat Belanda kemudian sangat menentang keberadaan sekolah Islam. Mereka juga berpendapat bahwa sekolah Islam dapat memecah belah secara sosial, nasionalistis, atau mendorong intoleransi dan separatisme dari nilai-nilai liberal Belanda.³⁹

Banyak penyelidikan telah dilakukan untuk menemukan kesalahan dan kelemahan sekolah Islam, dan banyak kelemahan dan kekurangan ditemukan pada catatan sekolah Islam. Ada satu hal yang menggembirakan karena bukti dari satu penyelidikan menyatakan bahwa ada sekolah Islam yang berhasil dengan baik. Merry & Driessen dalam studi terbaru mereka mencatat bahwa ada bukti yang menunjukkan peningkatan akademik yang signifikan di sejumlah sekolah dasar Islam dan pada awal 2013 ada dua sekolah dasar Islam dianugerahi gelar "Sekolah Unggulan" oleh Kementerian Pendidikan. Belum lama berselang situasi yang genting telah menghinggapi sekolah-sekolah Islam di Belanda namun sekarang keadaannya terlihat lebih menjanjikan.⁴⁰ Tentunya, fakta ini menimbulkan sikap optimisme para tokoh Muslim di Belanda dan akan menginspirasi sekolah dasar Islam lainnya untuk mencapai yang terbaik.

³⁹ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), h. 423.

⁴⁰ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 857.

C. Perdebatan Tantang Keberadaan Pendidikan Islam

Belanda adalah salah satu negara Eropa Barat yang memiliki jumlah Muslim yang besar. Menurut catatan statistik tahun 2010 di *Jaarraport Integratie of Statistics* Belanda, populasi Belanda diperkirakan 16.575.000 orang. Dari angka itu, 883.000 orang dianggap sebagai Muslim.⁴¹ Sarjana lain mencatat jumlah Muslim sekitar 900.000 atau 5,8 persen dari total populasi.⁴² Menurut Konstitusi Belanda (pasal 23) setiap warga negara dijamin oleh negara untuk memiliki dan memilih pendidikan. Seperti warga negara dari denominasi lain, umat Muslim berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan agama mereka (Islam). Pasal 1 Konstitusi memberikan hak atas perlakuan yang sama dan melarang diskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, aliran politik, ras, jenis kelamin atau alasan lainnya. Selain itu, Pasal 6 Konstitusi memberikan setiap individu hak untuk mempraktikkan agamanya, secara individu atau dalam suatu komunitas selama praktik-praktik ini berada dalam batas-batas

⁴¹ Herman L. Beck (2013), "Beyond Living Together in Fragments: Muslims, Religious Diversity and Religious Identity in the Netherlands", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 33:1, 111-127, DOI: 10.1080/1360-2004.2013.779069, h. 117.

⁴² Frank J. Buijs (2009), "Muslims in the Netherlands: Social and Political Developments after 9/11", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 35:3, 421-438, DOI: 10.1080/13691830802704590, h. 424.

hukum.⁴³ “Kebebasan pendidikan” konstitusional Belanda memberikan hak atas dasar agama dan non-agama untuk mendirikan sekolah dalam parameter kualitas dan pengawasan pendidikan negara.⁴⁴

Upaya pertama untuk mendirikan sekolah dasar Islam datang pada tahun 1980, dan pada tahun 1988 dua sekolah Islam pertama membuka pintu mereka. Pada 2014 ada 46 sekolah dasar Islam, tiga di antaranya belum memiliki murid di kelas terakhir mereka. Ada dua sekolah menengah Islam yang didirikan juga (di Rotterdam dan Amsterdam), tetapi keduanya ditutup oleh otoritas pendidikan Belanda karena kurangnya kualitas dan masalah administrasi. Semua sekolah dasar Islam memiliki murid laki-laki dan perempuan, dan kelas di sekolah Islam juga beragam, tetapi untuk beberapa pelajaran (misalnya berenang dan senam) murid laki-laki dan perempuan tidak dicampur.⁴⁵

Meskipun dijamin oleh Konstitusi, pendirian sekolah Islam di Belanda tidak selalu mudah, dan sering ditarik-tarik ke dalam debat publik oleh para politisi, media, dan juga akademisi. Debat tentang sekolah-sekolah Islam di Belanda tidak diragukan lagi berkaitan juga dengan ruang

⁴³ Saskia Van Genugten (2013), h. 78.

⁴⁴ Jaap Dronkers (2016), “Islamic Primary Schools in the Netherlands”, *Journal of School Choice*, 10:1, DOI: 10.1080/15582159.2015.1131508, h. 6.

⁴⁵ Jaap Dronkers (2016), h. 11.

lingkup perdebatan yang lebih luas tentang Islam dan Muslim di masyarakat Belanda. Reaksi publik Belanda terhadap kedatangan sekolah Islam di Belanda dapat dibagi menjadi dua kelompok: mendukung dan menentang. Mereka yang mendukung keberadaan sekolah Islam berpendapat bahwa anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang baik ketika mereka belajar di lingkungan yang terlindungi. Mereka yang menentang pendirian sekolah Islam berpendapat bahwa sekolah semacam itu akan menyebabkan pengasingan yang tidak diinginkan pada diri anak-anak muda Muslim. Agama Islam dipandang sebagai faktor yang akan menegakkan aturan atas diri mereka, dan itu dianggap sebagai hal yang menghambat mereka untuk mengambil peran dalam masyarakat,⁴⁶ sekolah-sekolah tersebut dianggap hanya akan menghambat proses integrasi dan menyebabkan pemisahan dari masyarakat pribumi.

Orang-orang yang mendukung pendirian sekolah Islam menganggap bahwa lingkungan yang ramah di mana siswa belajar dapat membuat siswa secara bertahap bersosialisasi dengan masyarakat luas dengan memperkuat identitasnya. Sebaliknya, mereka yang menolak sekolah Islam menganggap bahwa sekolah tersebut tidak memenuhi standar normal dan cenderung memarginalkan (atau,

⁴⁶ Thijs Sunier (2005), “Constructing Islam: Places of Worship and the Politics of Space in The Netherlands”, *Journal of Contemporary European Studies*, 13:3, DOI: 10.1080/14782800500378409, h. 323.

dalam kasus terburuk, meradikalisasi) pemuda Muslim. Namun, tuduhan seperti ini tidak sepenuhnya benar. Menurut seorang sarjana Belanda bernama Johan Meuleman, ketakutan akan radikalisasi terbukti salah.⁴⁷ Pendukung terhadap keberadaan sekolah Islam berpendapat bahwa identitas anak-anak Muslim berada di bawah ancaman di sekolah negeri non-agama. Dengan menghadiri atau belajar di sebuah sekolah Islam, anak-anak Muslim diharapkan akan terlindungi dari tiga macam bahaya utama, yaitu (a) asimilasi, (b) prasangka anti-Muslim, dan (c) ekstremisme Islam.⁴⁸ Perlu disebutkan di sini bahwa opini publik tentang keinginan atau penerimaan terhadap keberadaan sekolah Islam masih dan masih sangat terpecah. Pada tahun 1992, misalnya, 57% dari populasi Belanda mendukung sekolah-sekolah seperti itu, tetapi persentase ini kemudian turun karena meningkatnya ketakutan terhadap Islam radikal.⁴⁹

Perlu disebutkan di sini bahwa telah terjadi perubahan dalam persepsi tentang sekolah-sekolah Islam di

⁴⁷ Berglund, Jenny (2015), *Publicly Funded Islamic Education in Europe and the United States*, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World: Center for Middle East Policy, h. 22.

⁴⁸ Claire Tinker (2009), "Rights, Social Cohesion and Identity: Arguments for and Against State-Funded Muslim Schools in Britain", *Race Ethnicity and Education*, 12:4, DOI: 10.1080/13613320903364499, h. 547.

⁴⁹ K. H. (Ina) Ter Avest & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), h. 6.

Belanda, setelah terungkapnya kegiatan radikalisme di beberapa bagian dunia. Di dalam studinya, Verbeek menjelaskan bahwa diskusi tentang pendidikan Islam di Belanda telah berubah, terutama setelah tragedi 9/11. Sebelum peristiwa itu terjadi, pendidikan Islam tidak pernah menjadi masalah. Orang-orang beranggapan bahwa Muslim di Belanda hanya menggunakan hak konstitusional mereka untuk mendirikan sekolah Islam, seperti Katolik pada abad kedua puluh. Ini hanya bentuk partisipasi mereka dalam masyarakat. Namun pandangan orang-orang di Belanda kemudian berubah setelah adanya peristiwa 9/11.⁵⁰ Sebelum tragedi 9/11 itu terjadi, liputan media di Belanda berfokus pada pengalaman religiusitas pribadi umat Muslim, sedangkan setelah peristiwa 9/11 fokus bergeser ke arah hubungan antara fundamentalisme agama dan integrasi.⁵¹ Perdana Menteri Ruud Lubber (1982-1994, seorang Demokrat Kristen), misalnya, pernah mendorong kaum Muslim di Belanda untuk

⁵⁰ Lihat Stijn Verbeek, Han Entzinger, and Peter Scholten (2015), "Research-Policy Dialogues in the Netherlands", dalam Peter Scholten, Han Entzinger, Rinus Penninx, Stijn Verbeek (eds.), *Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues*, Dordrecht: Springer, h. 223.

⁵¹ Semiha Sözeri, Hülya Kosar-Altinyelken & Monique Volman (2017), "Mapping discourses on mosque education in the Netherlands: a content analysis of the Dutch press, 2010-2016", *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, DOI: 10.1080/01596306.2017.131-6705, h. 4.

mendirikan pilar Islam mereka sendiri. Tetapi sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2003, Perdana Menteri Jan-Peter Balkenende (2002-2010, juga seorang Demokrat Kristen) memperingatkan bahwa sekolah-sekolah Islam tidak boleh menjadi "penjara yang merugikan".⁵² Sangat disayangkan bahwa perubahan persepsi yang signifikan ini terjadi hanya dalam waktu yang relatif singkat. Sungguh, pencitraan Eropa tentang apa yang diwakilkan oleh Islam lebih buruk daripada apa yang sebenarnya dilakukan oleh umat Muslim, dan sayangnya statistik serta narasi sejarah akan mencekokinya berulang kali.⁵³

Setelah pembunuhan seorang pembuat film Belanda, Theo van Gogh, pada 2 November 2004 oleh seorang Muslim radikal, sebagian besar penduduk Belanda takut akan "bahaya Islam". Mereka takut akan islamisasi Belanda. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dengan adanya kaum Muslim yang tinggal di negara ini "Kuda Troya" telah diizinkan masuk.⁵⁴ Beberapa kalangan takut bahwa kaum Muslim di Belanda tidak hanya ingin mengislamkan negara tetapi juga ingin memperkenalkan syariah.⁵⁵ Pada tahun itu, pejabat publik juga menyerukan penutupan

⁵² Stijn Verbeek, Han Entzinger, and Peter Scholten (2015), h. 223.

⁵³ Maurits S. Berger (2013), "The Third Wave: Islamization of Europe, or Europeanization of Islam?" *Journal of Muslims in Europe*, 2 (2013), DOI: 10.1163/22117954-12341260, h. 135.

⁵⁴ Herman L. Beck (2013), h. 119.

⁵⁵ Herman L. Beck (2013), h. 120.

sekolah-sekolah Islam, percaya bahwa anak-anak sedang diindoktrinasi ke dalam keyakinan yang memusuhi agama lain, jika tidak dengan budaya Barat secara keseluruhan. Perkembangan ini dimainkan dengan latar belakang kecurigaan terhadap Islam pada umumnya dan Muslim Eropa pada khususnya.⁵⁶ Dalam beberapa tahun yang singkat, sikap umum di kalangan masyarakat telah berubah dari yang berpikiran terbuka dan toleran menjadi sangat kritis dan bahkan bermusuhan.⁵⁷

Perubahan konstelasi politik telah mempengaruhi persepsi publik tentang Muslim dan aktivitas mereka di Belanda. Dampak peristiwa 9/11 pada politik global, pembunuhan politisi sayap kanan, Pim Fortuyn, pada 2001 dan pembunuhan Theo van Gogh pada 2004 pada politik nasional Belanda membantu memperburuk persepsi masyarakat Belanda terhadap Islam dan Muslim.⁵⁸ Profesor Gerard A. Wiegers dari Universiteit van Amsterdam (UvA), di dalam sebuah pembicaraan informal dengan penulis, mengatakan bahwa sebelum adanya peristiwa pembunuhan Pim Fortuyn, Theo van Gogh, dan tragedy 9/11 di Amerika Serikat serta peristiwa-peristiwa lainnya yang melibatkan Muslim radikal, orang-orang di Belanda tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan sekolah-

⁵⁶ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 856-857.

⁵⁷ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 873.

⁵⁸ K. H. Ter Avest & M. Rietveld-van Wingerden (2016), h. 3.

sekolah Islam atau masjid-masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat asli Belanda, namun sejak peristiwa-peristiwa tersebut terjadi keadaan berubah menjadi lebih buruk dan mulai muncul ketidaksenangan terhadap sekolah-sekolah Islam.⁵⁹

Beberapa peristiwa kekerasan yang berkaitan dengan radikalisme Islam tersebut baik yang terjadi pada level internasional maupun domestik telah menyebabkan kritik yang kuat dan tuntutan untuk menutup sekolah-sekolah Islam di Belanda. Para pemimpin komunitas Muslim dipaksa untuk bernegosiasi dengan lawan yang kuat untuk mempertahankan kepentingan mereka. Ini mencerminkan "interaksi yang berkelanjutan", yang merupakan properti keempat dalam definisi gerakan sosial Tarrow, sebagaimana telah disebutkan pada bagian yang lalu. Tarrow mengatakan, "*it is changes in public political opportunities and constraints that create the most important incentives for triggering new phases of contention for people with collective claims*"⁶⁰ (adalah perubahan dalam peluang dan kendala politik publik yang menciptakan insentif paling penting untuk memicu fase pertikaian baru

⁵⁹ Percakapan informal dan wawancara Muslih (penulis buku ini) dengan Professor Gerard A. Wiegers, seorang antropolog dari Universiteit van Amsterdam (UvA) pada Senin, 25 September 2017 di Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (UvA), Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgerwal 48, 1012 CX Amsterdam Nederland.

⁶⁰ Sidney G. Tarrow (2011), h. 11.

bagi orang-orang dengan klaim kolektif. Terjemah oleh penulis).

Sebagai sebuah perbandingan, apa yang terjadi di Belanda dalam hal keberadaan sekolah Islam juga terjadi di Inggris. McCreery *et al.* dalam penelitian mereka (2007) mengungkapkan bahwa dalam konteks sistem pendidikan Inggris, bagian dari perdebatan tentang pendanaan negara terhadap sekolah denominasi (Islam) adalah tuduhan bahwa sekolah agama (Islam) dianggap gagal untuk mempersiapkan anak-anak untuk masyarakat yang lebih luas, menghambat kohesi sosial dan menolak hak-hak dasar anak-anak. Terlepas dari penentangan terhadap sekolah (Islam) yang terpisah dari sekolah umum, beberapa orang optimistik dan mendukung sekolah semacam itu. McCreery *et al.* mencatat bahwa "keterpisahan" dapat dilihat sebagai keputusan positif, yang memungkinkan anak-anak merasa aman untuk tumbuh secara akademis dan dengan demikian berkontribusi pada kohesi sosial ketika mereka mengambil tempat mereka di masyarakat yang lebih luas. Dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya sekolah-sekolah agama tidak hanya cocok dengan kohesi sosial tetapi juga dapat benar-benar memperkuatnya. Ada sebuah argumen yang diajukan, yakni bahwa dalam mempromosikan harga diri anak-anak dan kesadaran akan warisan budaya mereka, sekolah-sekolah

agama dapat memperkuat kepercayaan diri mereka sebagai individu.⁶¹

Mengenai ketakutan beberapa orang di kalangan masyarakat Belanda bahwa sekolah-sekolah Islam akan digunakan sebagai tempat untuk mengindoktrinasi murid-murid mereka dengan interpretasi fundamentalis terhadap Islam, maka seseorang perlu mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar guru kelas reguler di sekolah-sekolah Islam adalah non-Muslim asli-Belanda.⁶² Rata-rata, tidak lebih dari satu jam pengajaran Islam diizinkan. Saya (penulis buku ini) setuju dengan Merry & Driessen bahwa, mungkin, pertanyaan yang lebih menarik adalah apa yang dipelajari beberapa anak Muslim di luar sekolah, di mana banyak orang cenderung mendengar instruksi dogmatis selama kelas-kelas Al-Qur'an di beberapa masjid.⁶³ Selain itu, generalisasi bahwa semua Muslim di Belanda sebagai ekstremis atau radikal berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang Muslim radikal, seperti dalam kasus Theo van Gogh, tidaklah bijaksana. Seseorang harus mempertimbangkan bahwa bahkan dalam denominasi agama ada pemisahan antara

⁶¹ Elaine McCreery, Liz Jones & Rachel Holmes (2007), "Why do Muslim parents want Muslim schools?", *Early Years*, 27:3, 203-219, DOI: 10.1080/09575140701594350, h. 213.

⁶² Marcel Maussen & Floris Vermeulen (2015), h. 90.

⁶³ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 874.

aliran utama dan sub-aliran, mazhab, gerakan agama-politik dan sebagainya. Ada juga skala praktik keagamaan dari moderat hingga fundamentalis.⁶⁴ Dalam salah satu kesimpulan studi mereka tentang respon organisasi Muslim dan non-Muslim terhadap kritik terhadap Islam di Belanda pada periode 2004-2010, Vellenga dan Wieggers menemukan bahwa semua organisasi itu mengutuk adanya kritik terhadap Islam apabila itu turun ke generalisasi dan stereotip dengan mengidentifikasi Islam secara keseluruhan dengan bentuk-bentuk Islam ekstremis dan menyalahkan semua Muslim atas tindakan ekstremis.⁶⁵ Menurut hemat penulis, adalah normal bahwa umat Muslim akan menolak perlakuan semacam itu, dan ternyata bukan hanya Muslim bahkan yang non-Muslim pun punya pandangan yang sama yakni tidak suka dengan generalisasi dan stereotype bahwa semua Muslim itu radikal.

Terbukti bahwa penerimaan masyarakat Belanda atas sekolah-sekolah Islam telah mengalami pasang surut. Pada awalnya (periode pertama) sekolah-sekolah Islam diterima kehadirannya tanpa ada kecurigaan sedikitpun.

⁶⁴ Wasif A. Shadid (2006), "Public Debates over Islam and the Awareness of Muslim Identity in the Netherlands", *European Education*, 38:2, DOI: 10.2753/EUE1056-4934380201, h. 20.

⁶⁵ SipcoVellenga & Gerard Wieggers (2013), "Polarization or bridging? Responses of Muslim and non-Muslim organizations to criticism of Islam in the Netherlands", *Islam and Christian-Muslim Relations*, 24:1, DOI: 10.1080/09596410.2013.742220, h. 127.

Hal ini tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik domestik dan global. Kebijakan politik dalam negeri memungkinkan Muslim imigran untuk mempraktikkan keyakinan mereka dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Pemerintah Belanda telah bekerja keras untuk meningkatkan sektor perekonomian negara ini, dan untuk itu mereka memastikan bahwa umat Muslim akan tinggal di negara tersebut untuk menangani pekerjaan-pekerjaan kasar.⁶⁶ Situasi politik seperti ini tampaknya memberikan keuntungan bagi kaum Muslim imigran di Belanda. Para pemimpin dari komunitas Muslim mengambil kesempatan ini untuk melakukan negosiasi. Setelah melakukan lobi terhadap pemegang otoritas di pemerintahan dan melakukan negosiasi yang cukup panjang, pihak berwenang akhirnya mengizinkan kaum Muslim untuk mendirikan sekolah Islam pertama, Al-Ghozali, di Rotterdam pada tahun 1987.⁶⁷ Peristiwa seperti ini telah mengkonfirmasi dan sejalan dengan apa yang dalam gerakan sosial, sebagaimana diartikulasikan oleh Tarrow, disebut sebagai "peluang politik" yang menekankan sumber daya eksternal untuk kelompok tersebut. Tampaknya para pemimpin komunitas Muslim tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan peluang politik mereka dan mulai berani memasuki ranah politik

⁶⁶ Ter Avest, K. H. & Rietveld-van Wingerden, M. (2016), h.2.

⁶⁷ Ter Avest & Rietveld-van Wingerden (2016), h. 6.

yang kontroversial. Menurut Tarrow politik yang kontroversial dapat muncul ketika warga negara biasa, yang kadang didorong oleh para pemimpinnya, mendapati adanya peluang yang mempermudah tindakan kolektif mengungkap adanya sekutu yang potensial yang dapat menunjukkan dimana elit dan pihak berwenang memiliki celah yang bisa digunakan untuk memicu jaringan-jaringan sosial dan identitas kolektif ke dalam aksi atau tindakan terhadap tema (kepentingan) bersama mereka.⁶⁸

Banyak kelompok masyarakat yang menentang keberadaan sekolah Islam di Belanda, tetapi Konstitusi Belanda memungkinkan sekolah itu ada. Ketentuan tersebut harus ditegakkan dan mereka yang tidak senang dengan sekolah Islam harus menghormati keberadaan sekolah-sekolah Islam tersebut sebagai konsekuensi tinggal di negara yang demokratis. Suka atau tidak, faktanya adalah bahwa Belanda sekarang memiliki 43 sekolah dasar Islam yang mengakomodasi anak-anak warga negara Muslim untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan budaya dan agama mereka. Sekarang pertanyaannya adalah agar sekolah Islam tersebut dapat bertahan hidup mereka harus memenuhi standar kinerja sekolah di Belanda. Jadi sekarang, kualitas adalah ukuran apakah sebuah sekolah memenuhi syarat untuk disubsidi oleh

⁶⁸ Sidney G. Tarrow (2011), h. 33.

negara. Ini membawa kita ke diskusi tentang kinerja sekolah-sekolah dasar Islam di Belanda.

D. Kinerja Sekolah Dasar Islam di Belanda

Secara umum, kinerja sekolah-sekolah dasar Islam di Belanda telah mengalami beberapa kemajuan dan perkembangan. Informasi terbaru tentang kinerja sekolah dasar Islam di Belanda dapat ditemukan, misalnya, dalam karya Dronkers (2016),⁶⁹ yang penulis pergunakan untuk penelitian atau studi ini. Dronkers memberi kita informasi tentang kinerja akademik dan kualitas administrasi (keuangan) juga. Berkenaan dengan prestasi akademik, hal itu dapat diukur dari agregat skor pada tes akhir di masa akhir sekolah dasar dan rekomendasi guru tentang jalur yang paling pas untuk masuk ke jalur yang lebih tinggi. Menggunakan tes berstandar nasional, skor agregat untuk semua sekolah pada tahun 2014, seperti yang dilaporkan oleh Dronkers, dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Dronkers, ujian nasional ini memiliki skor rata-rata 535. Nilai minimumnya adalah 501 (setara untuk tingkat sekolah kejuruan terendah) dan maksimumnya adalah 550 (setara untuk sekolah tata bahasa). Seperti yang ditunjukkan Tabel 1, sekolah-sekolah Islam rata-rata memiliki skor terendah: 531, tetapi itu di atas

⁶⁹ Jaap Dronkers (2016), "Islamic Primary Schools in the Netherlands", *Journal of School Choice*, 10:1, 6-21, DOI: 10.1080/15582159.2015.1131508.

skor minimum resmi. Inspektorat Belanda menerapkan 527–529 sebagai batas bawah untuk sekolah dengan lebih dari 60% orang tua berlatar belakang pendidikan rendah. Dronkers menambahkan bahwa sekolah-sekolah dengan skor lebih rendah dan tanpa prospek peningkatan cepat akan disebut secara umum sebagai "sekolah yang lemah atau sangat lemah" oleh Inspektorat Belanda. Akibatnya, sekolah-sekolah itu akan kehilangan murid-muridnya dan pada gilirannya akan kehilangan dana juga dan pada akhirnya akan berisiko ditutup oleh pemerintah Belanda.⁷⁰

*Table 1. Most important denominations of Dutch primary school in 2014.**

Denomination primary school	Number Schools	Absolut score final test	Socioeconomic status pupils	Added value
Public	2350	533.51	37.4	-0.36
Catholic	2064	534.72	34.5	0.29
Protestant-Christian	1785	534.39	37.0	0.00
Neutral nonpublic	340	535.88	34.9	0.45
Reformed Orthodox	165	535.33	29.1	0.75
Reformed Liberated	113	534.70	27.8	-0.59
Anthroposophy	68	535.86	24.8	-0.3
Protestant and Catholic	56	533.55	27.1	-0.31
Islamic	43	530.79	10.6	1.57

⁷⁰ Jaap Dronkers (2016), h. 11.

Denomination primary school	Number Schools	Absolut score final test	Socioeconomic status pupils	Added value
Interconfessional	10	534.23	27.8	-0.97
Evangelical	10	533.22	13.9	-0.78
Hindu	6	533.71	-9.1	1.69

*Note: Only schools with pupils in the last grade of primary school (age 11/12).
* Penulis mengadaptasi table ini dari "Islamic Primary Schools in the Netherlands" by Jaap Dronkers, 2016, Journal of School Choice, 10:1, DOI: 10.1080/15582159.2015.1131508, h.7.*

Lebih lanjut Dronkers menjelaskan, seperti juga dapat dilihat dari Tabel 1, bahwa murid sekolah Islam memiliki status sosial ekonomi orang tua yang sangat rendah, meskipun rata-rata mereka bukan yang terendah. Setelah menghitung nilai tambah semua sekolah, berdasarkan rata-rata skor tes akhir mereka, status sosial ekonomi orang tua rata-rata dan persentase orang tua dengan pendidikan yang sangat rendah, Dronkers menemukan bahwa sekolah-sekolah Islam memiliki skor tes akhir yang lebih tinggi dari yang mungkin diharapkan orang tua murid yang lemah, yaitu sekitar 1,6 poin. Hanya sekolah-sekolah Hindu yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dari sekolah-sekolah Islam (1,7 poin). Menurut Dronkers apa yang terjadi pada murid sekolah Islam adalah sebuah paradoks, karena meskipun siswa tersebut memiliki nilai ujian akhir yang sangat rendah, itu masih lebih tinggi dari

yang diharapkan mengingat latar belakang orang tua mereka yang lemah secara ekonomi.⁷¹

Dronkers memberi tahu kita bahwa 4% dari semua sekolah dasar adalah sekolah dasar yang lemah atau sangat lemah pada September 2011 dan 3% pada September 2012. Terkait sekolah Islam, 20% lemah atau sangat lemah pada 2011 dan 7% pada 2012. Inspektorat pendidikan mengambil latar belakang sosial ekonomi orang tua menjadi pertimbangan saat merumuskan putusannya. Karena mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi orang tua yang sangat rendah, sekolah-sekolah Islam dikatakan memiliki risiko yang lebih tinggi bahwa skor ujian akhir rata-rata dan indikator kualitas lainnya berada di bawah yang terendah yang diterima oleh Inspektorat. Namun, perubahan substansial dalam persentase sekolah yang lemah atau sangat lemah menunjukkan bahwa sekolah-sekolah (Islam) tersebut telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan kualitasnya segera setelah mereka mendapat vonis negatif.⁷² Tentunya ini merupakan hal yang baik karena dengan adanya vonis negatif dari Inspektorat Pendidikan tersebut akhirnya sekolah-sekolah Islam mau berbernih diri dan meningkatkan kualitasnya baik di bidang administrasi maupun akademiknya.

⁷¹ Jaap Dronkers (2016), h. 12.

⁷² Jaap Dronkers (2016), h. 12.

Kualitas pendidikan juga diukur dari aspek lain seperti kewarganegaraan. Untuk mengetahui kinerja atau pencapaian sekolah dasar Islam di bidang kewarganegaraan, penulis memanfaatkan karya Merry & Driessen (2016). Dalam studi mereka, Merry & Driessen memberikan informasi tentang kewarganegaraan murid sekolah dasar di Belanda. Mereka mengukur empat komponen kewarganegaraan: pengetahuan, refleksi, keterampilan, dan sikap. Mereka juga merujuk pada empat tugas sosial utama, yaitu bertindak secara demokratis, bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, menangani konflik, dan menangani perbedaan.⁷³ Kompetensi kewarganegaraan murid sekolah Islam dibandingkan dengan skor murid sekolah yang sebanding (komposisi sosial ekonomi) dan rata-rata sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.

*Table 2. Comparison citizenship knowledge, reflection, skills, and attitudes in 2011 (Mean scores and effect sizes of grade 8, final grade Dutch primary school). ***

	Knowledge	Reflection	Skills	Attitudes
Mean scores				
Islamic schools	0.70	2.57	3.25	3.20
Comparable schools	0.71	2.38	3.10	3.05
Average schools	0.78	2.25	3.01	2.95

⁷³ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 870.

	Knowledge	Reflection	Skills	Attitudes
Effect sizes				
Islamic vs comparable schools	-0.04	0.33	0.36	0.34
Islamic vs average schools	-0.50	0.57	0.61	0.60

****Catatan:** Diambil dari "On the Right Track? Islamic School in the Netherlands After an Era of Turmoil" by M.S. Merry and G. Driessen, 2016, *Race, Ethnicity and Education*, 19:4, DOI: 10.1080/13613324.2014.985586, h.872.

Menurut Merry & Driessen, seperti dapat dilihat pada Tabel 2, mengenai tiga dimensi (refleksi, keterampilan, dan sikap) siswa di sekolah-sekolah Islam mendapat skor jauh lebih tinggi daripada siswa di sekolah yang sebanding, dan masih lebih tinggi daripada siswa di sekolah rata-rata. Hanya berkenaan dengan kompetensi pengetahuan, siswa di sekolah Islam mendapat skor hampir sama dengan siswa di sekolah yang sebanding, tetapi secara signifikan lebih rendah daripada siswa di sekolah rata-rata. Dalam pandangan Merry & Driessen, temuan ini secara langsung menantang asumsi yang selama ini beredar di masyarakat, yakni bahwa siswa di sekolah-sekolah Islam cenderung menumbuhkan kebajikan sipil yang relevan untuk masyarakat Belanda pada umumnya. Menurut mereka beberapa sekolah telah berhasil mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang lebih baik daripada

yang lain, tetapi ini tidak terkait dengan latar belakang agama atau pribadi mereka.⁷⁴

Merry & Driessen juga mengungkapkan bahwa untuk matematika dan keterampilan belajar serta ujian secara keseluruhan, siswa di sekolah Islam mencapai hasil lebih baik daripada siswa di sekolah yang sebanding. Namun, mereka mendapat hasil lebih rendah daripada murid di sekolah rata-rata untuk bahasa, keterampilan belajar, dan ujian secara keseluruhan. Ini sesuai dengan hasil untuk tes membaca dan matematika. Menurut Merry & Driessen, siswa di sekolah-sekolah Islam menerima rekomendasi pendidikan menengah yang lebih tinggi daripada siswa di sekolah yang sebanding, tetapi menerima rekomendasi yang lebih rendah daripada siswa di sekolah regular (umum). Mereka menyimpulkan bahwa *"while the results of Islamic school pupils continue to be mixed, they certainly are favourable with respect to non-cognitive factors such as motivation and citizenship competences"*⁷⁵ (meskipun hasil dari siswa sekolah Islam terus bercampur, namun berkenaan dengan faktor non-kognitif seperti motivasi dan kompetensi kewarganegaraan mereka lebih disenangi. Terjemah oleh penulis).

⁷⁴ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 871.

⁷⁵ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 871-872.

Mengenai kinerja sekolah-sekolah dasar Islam dalam hal administrasi dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu mereka memiliki kualitas yang buruk. Menurut Dronkers, ada banyak masalah administrasi serius terjadi di sekolah-sekolah Islam karena salah kelola dewan sekolah, misalnya adanya penyalahgunaan uang pendidikan untuk keperluan lain, penggelapan uang sekolah, salah kelola guru yang dicalonkan, konflik serius di dalam dewan dan sebagainya. Dronkers menjelaskan bahwa kualitas administrasi (keuangan) selalu dicermati dan dipantau oleh Inspektorat Pendidikan. Apabila ditemukan kualitasnya terlalu rendah tanpa adanya prospek untuk peningkatan, maka konsekuensinya sekolah tersebut akan ditutup.⁷⁶ Faktanya, Inspektorat Pendidikan Belanda telah menutup dua sekolah menengah Islam di Belanda. Sekolah-sekolah tersebut ditutup karena kegagalannya menjalankan sekolah secara benar sesuai dengan norma-norma nasional yang ditetapkan oleh Inspektorat. Dronkers menganalisis bahwa kegagalan itu disebabkan oleh kurangnya anggota dewan (pengurus) sekolah Islam yang berpendidikan dan terhubung atau punya koneksi yang baik dengan otoritas politik dan administrasi di Belanda, selain itu juga mereka rata-rata belum fasih berbahasa Belanda sehingga menjadi kendala dalam berkomunikasi dengan birokrasi terkait. Oleh karena itu, mereka

⁷⁶ Jaap Dronkers (2016), h. 16.

tidak dapat berkompromi dengan pihak berwenang dalam hal menyelesaikan masalah administrasi di sekolah mereka.⁷⁷

Data yang diberikan oleh para peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa sampai saat ini, sekolah-sekolah Islam terus memiliki prestasi yang lebih buruk dibandingkan dengan sekolah umum di Belanda. Prestasi yang buruk ini disebabkan oleh, antara lain, pemimpin yang tidak terampil. Butuh waktu lama untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam di Belanda karena kurangnya pemimpin yang terampil dalam bernegosiasi dengan pihak berwenang karena mereka tidak memiliki pengalaman berurusan dengan birokrasi dan tidak dapat berbahasa Belanda dengan fasih.⁷⁸ Perlu ditekankan di sini bahwa penyediaan pendidikan Islam di Belanda melibatkan banyak pihak. Ini membutuhkan proses mobilisasi sumber daya manusia baik pada saat pendirian dan selama kegiatan pembelajaran sehari-hari, yang tidak dapat dilakukan oleh satu individu atau seorang pemimpin saja. Ini melibatkan banyak sumber daya manusia dan membutuhkan kerja sama dalam kelompok dan jaringan. Dengan kata lain, mobilisasi sumber daya manusia adalah suatu keharusan. Ini sejalan dengan apa yang disebut Diani se-

⁷⁷ Jaap Dronkers (2016), h. 16.

⁷⁸ Michael S. Merry & Geert Driessen (2005), h. 416.

bagai "tindakan kolektif". Diani, seperti dikutip dalam Tarrow (2011), mengatakan bahwa, secara umum, proses "tindakan kolektif" dimulai dengan pertemuan atau tatap muka antara kelompok-kelompok dalam jejaring sosial mereka dengan struktur penghubungnya. Namun pada akhirnya, keputusan memang ada di tangan individu. Pada dasarnya, Tarrow berpendapat, bukan "kelompok" itu sendiri yang mendorong mobilisasi tetapi itu adalah tekanan normatif dan insentif untuk solidaritas dalam jaringan yang membuat sebuah gerakan itu muncul dan bertahan hidup.⁷⁹

Berkenaan dengan staf pengajar, sekolah-sekolah Islam mempekerjakan banyak guru non-Muslim. Perlu ditambahkan di sini bahwa di Belanda ada standar nasional untuk pelatihan dan kualifikasi guru dan aplikasi wajib untuk pendanaan negara. Dronkers menyatakan bahwa karena hanya ada terlalu sedikit guru Muslim yang berkualitas, sekolah-sekolah Islam tersebut terpaksa harus menominasikan guru non-Muslim yang dapat diterima oleh Inspektorat Pendidikan. Masalah ini tidak unik terjadi pada sekolah Islam saja. Sekolah Katolik dan Protestan juga memiliki masalah yang sama dalam mendapatkan guru yang beriman karena tingginya tingkat sekularisasi di Belanda. Perbedaannya adalah bahwa orang tua murid sekuler yang bersekolah di sekolah-

⁷⁹ Sidney G. Tarrow (2011), h. 30.

sekolah Katolik dan Protestan tidak peduli apakah para guru itu beriman atau tidak, sementara orang tua dari sekolah-sekolah Islam menghargai agama sama pentingnya dalam mengasuh anak-anak mereka. Dronkers mengatakan, *"the need to use non-Muslim teachers by Islamic schools adds additional tensions within these schools, more than in other religious schools"*⁸⁰ (kebutuhan untuk menggunakan guru non-Muslim oleh sekolah-sekolah Islam menambah ketegangan tambahan di sekolah-sekolah ini, lebih dari di sekolah-sekolah agama lainnya. Terjemah oleh penulis). Situasi seperti itu lazim di sebagian besar sekolah Islam di Belanda. Mereka masih terus menghadapi banyak tantangan seperti, pertama, mereka harus berjuang mempertahankan kepala sekolah dan guru mereka. Kedua, mereka harus berjuang menemukan keseimbangan antara memuaskan Inspektorat Pendidikan, karena mereka sepenuhnya didanai dan diawasi oleh negara, dan mereka harus menciptakan serta mempertahankan iklim yang mempromosikan visi dan misi sekolah (Islam) mereka.⁸¹

Meskipun menghadapi banyak kesulitan dalam beberapa tahun terakhir, sekolah-sekolah dasar Islam di Belanda diharapkan untuk tetap kuat dan tetap optimistik untuk menyambut masa depan mereka yang lebih cerah.

⁸⁰ Jaap Dronkers (2016), h. 16.

⁸¹ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 872.

Bekerja keras dan memiliki komitmen untuk berubah ke kondisi yang lebih baik adalah kunci keberhasilan. Merry & Driessen memperhatikan bahwa sekolah-sekolah Islam telah membuat sedikit peningkatan dalam meningkatkan kinerja akademik siswa mereka. Peningkatan kinerja mereka signifikan ketika diperiksa bersama sekolah yang sebanding (yang melayani siswa dengan latar belakang etnis dan sosial ekonomi yang hampir identik).⁸² Merry & Driessen juga berpendapat bahwa peningkatan signifikan telah terjadi di sejumlah sekolah dasar Islam. Salah satu bukti keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan, yaitu pada awal 2013 dua sekolah dasar Islam dianugerahi gelar "Sekolah Unggulan" oleh Kementerian Pendidikan Belanda. Merry & Driessen menyebut hal ini sebagai "pencapaian luar biasa" karena hanya 32 dari 6800 sekolah dasar di seluruh negeri yang berhak mendapatkan status ini.⁸³

Meskipun kritik terhadap sekolah-sekolah Islam telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap menghadapi beberapa tuntutan, yang paling penting adalah bahwa mereka harus mendidik murid-murid mereka untuk menjadi "warga negara yang terintegrasi dengan baik" dalam masyarakat demokratis-liberal Belanda. Merry & Driessen menyebutkan bahwa, *"To help promote*

⁸² Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 875.

⁸³ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 857.

this aim, the subject of 'citizenship' was made compulsory in all Dutch schools in 2006" (untuk membantu mempromosikan tujuan ini, subjek 'kewarganegaraan' diwajibkan di semua sekolah Belanda pada tahun 2006). Sebagai bagian dari upaya untuk menghindari kritik lebih lanjut, sekolah-sekolah Islam telah menunjukkan bahwa mereka secara aktif mempromosikan kewarganegaraan yang baik di sekolah mereka dan mempromosikan "integrasi".⁸⁴ Ini tentu saja merupakan masalah yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pada bagian berikutnya penulis akan membahas dua hal, pertama, apa yang telah dilakukan oleh sekolah dasar Islam sehubungan dengan peningkatan kinerja mereka, dan, kedua, upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah dasar Islam dalam hal seruan dan promosi integrasi ke dalam masyarakat Belanda kepada para murid.

⁸⁴ Michael S. Merry & Geert Driessen (2016), h. 873-874.

BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM DAN MASALAH INTEGRASI SOSIAL DI BELANDA

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai dua variabel yakni (1) pendidikan (sekolah) Islam dan (2) masalah integrasi. Sebagian masyarakat Belanda meminta imigran Muslim untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Integrasi ke dalam masyarakat asli merupakan masalah krusial yang dihadapi juga oleh sekolah Islam karena Muslim sering dituduh memisahkan

diri dari masyarakat asli dan sekolah Islam dianggap mendukung adanya pemisahan tersebut dengan penyediaan nilai-nilai Islam (*Islamic values*) di dalam pendidikannya. Mengajarkan nilai-nilai Islam kepada murid-murid untuk membentuk identitas keislaman mereka sering disalahpahami sebagai menciptakan komunitas terpisah yang enggan menerima nilai dan kebaikan masyarakat Belanda. Sekolah-sekolah Islam di Belanda telah melakukan beberapa upaya dan usaha dalam rangka merespons tuntutan untuk berintegrasi. Agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif, maka dalam bab ini pembahasan akan dilakukan dengan urutan terlebih dahulu memaparkan diskusi tentang masalah integrasi dan wacana yang melingkupinya, baru setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya-upaya sekolah Islam dalam meningkatkan kualitasnya dan menyerukan atau mempromosikan integrasi.

A. Munculnya Wacana Integrasi Sosial

Penting untuk terlebih dahulu memberikan informasi tentang wacana integrasi di Belanda. Pemerintah Belanda telah secara aktif mendorong imigran Muslim di negara ini untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat Belanda dalam semua aspek kehidupan seperti sosial budaya, pasar tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai wacana integrasi

atau kebijakan terhadap para imigran di Belanda. Dalam paragraf-paragraf berikut, penulis akan menyajikan diskusi tentang masalah integrasi imigran yang telah disampaikan oleh para sarjana yang kompeten.

Gagasan kebijakan tentang integrasi imigran di negara-negara Barat, dan khususnya di Belanda, telah dibahas panjang lebar oleh banyak sarjana (Duyvendak & Scholten 2011; Kortmann 2015; Scholten 2016; Penninx 2006). Mereka menyajikan informasi mengenai masalah integrasi dan perdebatan kontemporer dalam konteks Belanda.

Menurut Duyvendak & Scholten (2011), kebijakan terhadap minoritas di Belanda tentang integrasi imigran muncul sebagai wacana di negara ini pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Ini adalah periode ketika telah menjadi jelas bahwa para migran akan tinggal secara permanen dan oleh karenanya diperlukan respons kebijakan. Sampai titik periode itu sebagian besar politisi Belanda menganggap bahwa para imigran akan kembali ke negara asal mereka, oleh karena itu tidak ada politisi yang tertarik untuk mengembangkan kebijakan integrasi.¹

Duyvendak & Scholten menunjukkan bahwa dalam literatur nasional dan internasional, kebijakan integrasi

¹ Lihat J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), "Beyond the Dutch 'Multicultural Model' The Coproduction of Integration Policy Frames in The Netherlands", *Int. Migration & Integration*, 12:331-348 DOI 10.1007/s12134-010-0161-5, h. 342.

Belanda sering digambarkan dalam sebuah model multikultural yang akan melibatkan kecenderungan untuk melembagakan pluralisme budaya dengan keyakinan bahwa pembebasan budaya minoritas imigran adalah kunci untuk integrasi mereka ke dalam masyarakat Belanda, secara jelas hal ini dinyatakan, *"which would have involved a tendency to institutionalize cultural pluralism in the belief that cultural emancipation of immigrant minorities is the key to their integration into Dutch society"*.² Duyvendak & Scholten menyatakan bahwa model integrasi Belanda ini akan berbeda dari model yang diadopsi di Prancis yang akan fokus terutama pada asimilasi para migran ke dalam komunitas politik Prancis terlepas dari asal-usul budaya atau etnis dari para migran tersebut, *"[...] would focus primarily on the assimilation of migrants into the French political community regardless of cultural or ethnic origins of migrants."*³

Namun demikian, setelah pergantian milenium, sebuah wacana baru muncul dengan jelas dalam politik Belanda, yang menekankan perlunya adaptasi sosial-budaya atau asimilasi. Duyvendak & Scholten menjelaskan bahwa pada tahun 2000, debat minoritas nasional kedua terjadi sebagai tanggapan terhadap esai yang diproduksi oleh in-

² J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 345.

³ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 345.

telektual publik Paul Scheffer tentang apa yang disebutnya "tragedi multicultural". Kekhawatiran politik tentang integrasi imigran kemudian berkembang lebih jauh karena serangkaian kejadian nasional dan internasional, seperti tragedi 9/11 di Amerika Serikat dan pembunuhan seorang pembuat film terkenal Belanda, Theo van Gogh. Duyvendak & Scholten menyatakan bahwa sejumlah intelektual publik (misalnya Hirsi Ali dan Scheffer) terus memainkan peran sentral dalam memberi umpan debat publik tentang integrasi imigran, menekankan secara khusus perlunya menjaga identitas dan budaya Belanda.⁴

Kajian lainnya yang juga cukup bagus tentang masalah integrasi telah dilakukan oleh Kortmann (2015), yang telah penulis gunakan secara luas dalam penelitian atau studi ini. Dia melakukan investigasi terhadap perwakilan organisasi Muslim di dua negara yang berbeda, Jerman dan Belanda. Dalam artikel ini, Kortmann menganalisis sikap terhadap integrasi dan partisipasi ke dalam masyarakat tuan rumah pada bagian dari satu kelompok tertentu: Muslim dengan latar belakang migrasi. Dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*, Kortmann bertanya kepada perwakilan organisasi payung Muslim mengenai pandangan apa yang mereka ungkapkan selama debat tentang integrasi dan bagaimana mereka

⁴ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 344.

akan mendefinisikan hubungan mereka dengan masyarakat tuan rumah. Untuk menentukan apa dampak kerangka kerja nasional terhadap definisi “integrasi” sebagaimana dipahami oleh organisasi migran Muslim, Kortmann telah melakukan wawancara kualitatif dengan perwakilan dari kelompok-kelompok Muslim di dua negara (Jerman dan Belanda) dan menganalisis isi dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Muslim dalam dua konteks nasional ini.⁵

Menurut Kortmann, “integrasi” tidak hanya istilah yang luas tetapi juga kontroversial yang telah mempolarisasi debat politik selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini, Kortmann menjelaskan, partai-partai populis sayap kanan telah mengeksploitasi istilah tersebut dengan tujuan, “*in order to argue against immigration by accusing immigrants of a lack of willingness or ability to ‘integrate into their host countries’ and to ‘adapt to values prevailing in the host society’—usually without putting too much emphasis on defining what this means in detail.*”⁶ (Untuk berdebat menentang imigrasi dengan menuduh para imigran tentang kurangnya kemauan atau kemampuan untuk ‘mengintegrasikan diri ke dalam negara tuan rumah

⁵ Matthias Kortmann (2015), “Asking Those Concerned: How Muslim Migrant Organisations Define Integration. A German-Dutch Comparison”, *Int. Migration & Integration*, 16:1057-1080, DOI: 10.1007/s12134-014-0387-8, h.1058.

⁶ Matthias Kortmann (2015), h.1058.

mereka’ dan untuk ‘beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tuan rumah’ — biasanya tanpa terlalu menekankan pada definisi apa artinya ini secara rinci. Terjemah oleh penulis).

Dalam kajian tersebut Kortmann menemukan bahwa perwakilan Muslim di Belanda masih mendukung kebijakan integrasi multikultural dan hak untuk melestarikan identitas asli mereka. Dalam pandangan Kortmann, politisi dan ilmuwan sosial cenderung melihat komitmen imigran terhadap integrasi terutama dari perspektif kebijakan integrasi negara tuan rumah. Ini dapat dilihat dari pertanyaan yang dirumuskan seperti “sejauh mana dan dalam keadaan apa organisasi migran dapat bermigrasi?” mempromosikan integrasi anggota dan pendukung mereka ke negara yang menerima mereka?”⁷

Sayangnya, meskipun masalah mengintegrasikan kelompok-kelompok imigran dibahas secara luas, seperti yang ditunjukkan Kortmann, definisi eksplisit dari istilah “integrasi” itu sendiri masih jarang. Karena itu, akan sangat bermanfaat jika dia meninjau ulang perdebatan yang terjadi pada 1980-an antara George Elwert dan Hartmut Esser untuk mendapatkan definisi yang lebih jelas. George Elwert dan Hartmurt Esser telah memeriksa atau mengkaji potensi integratif organisasi migran. Mereka

⁷ Matthias Kortmann (2015), h.1057.

mewakili dua kutub yang berlawanan dalam pemahaman “integrasi”, yaitu multikulturalisme dan asimilasi.⁸

George Elwert, seperti dikutip oleh Kortmann, berargumentasi berdasarkan pemahaman multikultural tentang “integrasi”. Dalam pandangannya, integrasi minoritas ke dalam kelompok etnis mereka sendiri (integrasi internal) adalah prasyarat untuk keberhasilan integrasi mereka ke dalam masyarakat tuan rumah secara keseluruhan, “*the integration of minorities into their own ethnic groups (internal integration) was a precondition for their successful integration into the host society as a whole.*”⁹ Dengan demikian baginya, “integrasi” dipahami pertama dan terutama sebagai bentuk partisipasi sosiokultural yang memungkinkan etnik minoritas mendapat manfaat dari barang sosial, “*form of sociocultural participation that enables ethnic minorities to benefit from ‘societal goods’.*”¹⁰

Dalam teori Elwert, “budaya” itu terlepas dari konsep integrasinya. Baginya faktor-faktor seperti mempelajari bahasa negara tuan rumah atau beradaptasi dengan kebiasaan budaya yang dominan (akulturasi) tidak selalu menjadi bagian dari proses integrasi. Dia menganggap integrasi internal sebagai langkah penting, karena harga diri dan pengetahuan imigran tentang kehidupan di negara

⁸ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

⁹ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

¹⁰ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

tuan rumah dapat didukung oleh anggota kelompok etnis mereka sendiri, secara tegas ia menyatakan hal tersebut, “*internal integration as a crucial step, because immigrants’ self-esteem and knowledge about life in the host country can best be supported by members of their own ethnic group.*”¹¹ Namun demikian, integrasi internal tidak boleh disalahartikan sebagai pemisahan. Sebaliknya, imigran dianjurkan untuk meningkatkan kontak mereka dengan populasi mayoritas dan harus menghormati dan mematuhi hukum negara tuan rumah, “*to increase their contact with the majority population and should respect and adhere to the laws of the host state.*”¹² Sudut pandang Elwert ini cocok dan didukung oleh literatur lain tentang multikulturalisme yang mendukung hak-hak khusus untuk kelompok minoritas (etnis). Sarjana seperti Will Kymlicka dalam bukunya *Multicultural Citizenship* (1995) juga berpendapat untuk memberi dukungan khusus bagi kelompok-kelompok minoritas dalam rangka untuk mendorong perwakilan mereka dan pemerintahan sendiri dan mendukung pengecualian dari peraturan tertentu dengan latar belakang adat budaya mereka.¹³

Di sisi lain dari perdebatan tersebut ada Hartmut Esser. Dia lawan George Elwert dalam debat itu. Tidak seperti Elwert, Esser pesimistik mengenai kemungkinan

¹¹ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

¹² Matthias Kortmann (2015), h.1059.

¹³ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

manfaat integrasi internal. Esser mempertentangkan konsep integrasi internal dengan integrasi ke dalam masyarakat penerima, yang ia percaya sebagai satu-satunya alternatif yang diinginkan. Dalam pandangannya, integrasi internal tak terhindarkan mengarah ke pemisahan, itulah sebabnya ia sangat mendukung integrasi ke dalam kelompok referensi kedua yakni masyarakat tuan rumah, sebuah proses yang ia definisikan sebagai asimilasi, *“internal integration inevitably leads to segregation, which is why he strongly supports integration into the second reference group, the host society (a process he defines as assimilation).”*¹⁴

Dia tidak hanya memasukkan dimensi sosial ekonomi (atau struktural) dalam definisi “integrasi” tetapi juga memperhitungkan aspek budaya, sosial dan emosional asimilasi. Esser memiliki perspektif yang berbeda dari Elwert dalam konsep integrasinya. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Elwert, Esser percaya bahwa adaptasi atau akulturasi budaya sangat penting jika integrasi ingin berhasil. Dia juga percaya bahwa kontak sosial antara etnis minoritas dengan anggota masyarakat mayoritas sangat penting untuk proses integrasi. Dalam pandangan Esser, integrasi juga menyiratkan bahwa para imigran mengidentifikasi diri dengan dan loyal kepada negara

¹⁴ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

tempat tinggal baru, sehingga menimbulkan perasaan memiliki secara emosional dalam masyarakat baru, *“integration also implies that the immigrants identify with and are loyal to the new home country, thus engendering an emotional sense of belonging within the new society”*.¹⁵

Melihat lebih dekat pada debat tersebut, Kortmann menemukan bahwa definisi istilah “integrasi” berbeda secara semantis dan sistematis. Ternyata integrasi tidak hanya menyiratkan tujuan yang diinginkan tetapi juga proses yang akan mengarah ke tujuan itu. Berkenaan dengan diskusi tentang topik ini, dua posisi bertentangan yang dijelaskan di sini menjadi kurang berbeda jika integrasi dipandang sebagai tujuan daripada proses. Kortmann menjelaskan ada kesepakatan di antara sebagian besar peneliti bahwa keberhasilan integrasi ditentukan oleh partisipasi imigran di ranah sosial-struktural utama masyarakat, seperti sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja. Namun demikian, ada ketidaksepakatan di antara para peneliti mengenai cara untuk mencapai partisipasi ini. Dalam pandangan Kortmann inti dari perselisihan tersebut berkaitan dengan sejauh mana identitas kaum imigran dan masyarakat tuan rumah harus berubah selama proses integrasi untuk menjamin partisipasi mereka yang setara, *“the core of the dispute relates to the extent to which the identities of both immigrants and the host society must*

¹⁵ Matthias Kortmann (2015), h.1059.

change during the integration process in order to guarantee their equal participation."¹⁶ Berkaitan dengan etnis minoritas, menurut Kortmann, masalahnya adalah apakah mereka harus menjalani proses akulturasi dan asimilasi. Jika etnis minoritas diharapkan untuk proses seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah aspek budaya mana yang harus mereka adaptasi dan sejauh mana mereka secara bersamaan harus meninggalkan aspek identitas asli mereka, *"which cultural aspects they will have to adapt to and to what extent they will simultaneously have to abandon aspects of their original identity."*¹⁷

Setelah apa yang disebut sebagai kebijakan minoritas (*minderhedenbeleid*) diimplementasikan di Belanda pada awal 1980-an, banyak peneliti menggambarkan kebijakan integrasi Belanda sebagai perwakilan dari model integrasi multikulturalis yang berfokus pada pelestarian identitas kelompok etnis, *"representative of a multiculturalist integration model that focuses on the preservation of ethnic group identities."* Kemudian konsekuensinya adalah, seperti yang ditunjukkan Kortmann, struktur peluang di Belanda telah dianggap menguntungkan bagi organisasi migran karena adanya undang-undang nasionalisasi yang

¹⁶ Matthias Kortmann (2015), h.1060.

¹⁷ Matthias Kortmann (2015), h.1060.

agak liberal dan dewan penasihat yang dilembagakan untuk organisasi etnis minoritas.¹⁸

B. Kebijakan Integrasi Bagi Kaum Imigran di Belanda

Ada lagi penelitian lain yang membahas masalah integrasi di Belanda. Dalam studinya, Peter Scholten (2016) membedakan antara model nasional kebijakan migran di Inggris dan Belanda. Dia mengatakan, Belanda adalah negara kesatuan, di mana di banyak daerah, pemerintah pusat memainkan peran utama dan berkoordinasi. Namun, Scholten menunjukkan, karakter multi-level dari kebijakan integrasi migran juga menjadi semakin nyata dalam kasus Belanda. Dia mengambil dua kota besar yang memiliki penduduk beragam, Rotterdam dan Amsterdam, sebagai contoh kota yang telah mengembangkan pendekatan yang sangat berbeda dalam hal kebijakan integrasi.¹⁹

Menurut Scholten, Amsterdam adalah salah satu kota paling beragam penduduknya di Belanda, dengan sejarah imigrasi yang panjang. Ini sering dianggap sebagai salah satu benteng dari model integrasi multikultural Belanda.

¹⁸ Matthias Kortmann (2015), h.1061.

¹⁹ Peter Scholten (2016), "Between National Models and Multi-Level Decoupling: The Pursuit of Multi-Level Governance in Dutch and UK Policies Towards Migrant Incorporation", *Int. Migration & Integration*, 17:973-994, DOI 10.1007/s12134-015-0438-9, h. 986.

Scholten melihat bahwa untuk waktu yang lama, kebijakan minoritas Amsterdam sebagian besar berkembang selaras dengan perkembangan nasional, berdasarkan pada gagasan bahwa minoritas harus berintegrasi sambil mempertahankan identitas budaya mereka, "*minorities should integrate while also maintaining their cultural identity*". Pada akhir 1990-an, Scholten melanjutkan, kebijakan minoritas ini kemudian membuka ruang baru bagi terciptanya kebijakan keanekaragaman, yang mana kebijakan tersebut melibatkan pembingkai ulang dari 'kebijakan khusus kelompok' menuju 'kebijakan yang berorientasi pada pemecahan masalah', "*this minorities policy made place for a diversity policy, involving a reframing from 'group-specific policies' towards 'problem-oriented policies'*"²⁰. Oleh karena itu banyak tindakan-tindakan spesifik kelompok yang kemudian ditinggalkan, setidaknya dalam kebijakan formal, lalu diganti dengan pendekatan yang lebih umum dan berorientasi pada individu atau warga negara.²¹

Scholten menunjukkan bahwa pembunuhan Theo van Gogh di Amsterdam pada November 2004 oleh seorang Muslim radikal sebagai peristiwa lokal yang kuat yang mengubah kerangka kebijakan Amsterdam, dan itu membawa konsekuensi bahwa integrasi menjadi tujuan

²⁰ Peter Scholten (2016), h. 989.

²¹ Peter Scholten (2016), h. 989.

kebijakan yang lebih penting setelah terjadinya peristiwa tragis ini. Lebih lanjut, hal ini juga menunjukkan bahwa integrasi sipil mendapat lebih banyak perhatian dalam kebijakan lokal dari pada integrasi. Dalam pandangan Scholten, preferensi untuk integrasi sipil daripada integrasi ini secara nyata telah mencerminkan sifat yang lebih pragmatis dari kebijakan integrasi sipil dalam rangka mengatasi pendatang baru dan keragaman, "*reflects the more pragmatic nature of civic integration policies for coping with newcomers and diversity.*"²²

Duyvendak & Scholten (2011) menyatakan bahwa Belanda telah terkenal dengan pendekatan multikulturalnya terhadap integrasi imigran. Juga dikatakan bahwa "model multikultural" ini akan terus menginformasikan wacana politik Belanda dan praktik kebijakan hingga saat ini. Mereka menyatakan bahwa, "*the basic premise of this model would be that Dutch policies have been driven by a coherent and consistent belief that the recognition and accommodation of cultural, ethnic, and religious groups in society will lead to their successful emancipation into the Dutch multicultural society*"²³ (premis dasar dari model ini adalah bahwa kebijakan Belanda telah didorong oleh keyakinan yang koheren dan konsisten bahwa pengakuan

²² Peter Scholten (2016), h. 989.

²³ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 331-332.

dan akomodasi terhadap kelompok-kelompok budaya, etnis, dan agama di masyarakat akan mengarah pada keberhasilan emansipasi mereka ke dalam masyarakat multikultural Belanda. Terjemah oleh penulis).

Menurut Duyvendak & Scholten, asal mula model multikultural Belanda ini telah sangat dipengaruhi oleh para peneliti akademis dan pakar ilmiah di Belanda. Duyvendak & Scholten menganggap para peneliti yang terlibat dalam bidang ini memiliki keyakinan kuat pada apa yang disebut model multikultural. Mereka juga mengidentifikasi ada sarjana yang dalam konteks penelitian Belanda ini berbicara tentang "paradigma etnis minoritas". Juga dikatakan bahwa para peneliti di bidang ini akan sangat berorientasi pada kebijakan dan bahkan terjalin dalam jaringan kebijakan. Mereka mengambil Guiraudon (1997) dan Rath (2001) sebagai contoh para sarjana yang dalam konteks ini berbicara tentang "simbiosis teknokratis" yang memungkinkan pengembangan "di balik pintu berlapis emas" dari sebuah pendekatan kebijakan multikultural, dengan mengabaikan beberapa paradigma kebijakan alternatif.²⁴ Selain itu, Duyvendak & Scholten menyebutkan bahwa ada juga para sarjana yang telah mengembangkan model integrasi menjadi empat tipologi

²⁴ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 331-332.

model integrasi, yaitu asimilasi-sipil, pluralisme budaya, diferensial-etnis, dan civic-republikanisme.²⁵

C. Perjuangan Melawan Asimilasi

Di dalam studinya, Kortmann (2015) menganalisis dan membandingkan perwakilan Muslim di Belanda dan di Jerman tentang pemahaman mereka mengenai wacana integrasi. Dia menemukan bahwa tidak seperti rekan-rekan mereka di Jerman, perwakilan Muslim di Belanda tidak mencari pengakuan dari masyarakat dan negara Belanda. Para imigran di Belanda ingin bertanggung jawab atas integrasi mereka sendiri. Menurut Kortmann, sebagian besar organisasi Muslim di Belanda, baik secara eksplisit maupun implisit, masih mempertahankan kebijakan integrasi multikulturalis, meskipun multi-kulturalisme telah gagal di Belanda selama dekade terakhir, sebagaimana yang ia nyatakan "[...] *still defend a multiculturalist integration policy, even though multiculturalism has fallen out of favour in the Netherlands during the past decade.*"²⁶

Kajian Kortmann tersebut mengungkapkan bahwa banyak perwakilan Muslim di Belanda yang menganggap tuntutan oleh masyarakat tuan rumah dan negara penerima untuk adaptasi sebagai sebuah bentuk asimilasi. Mereka cenderung menolaknya dan mempertahankan

²⁵ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 334.

²⁶ Matthias Kortmann (2015), h.1067.

“identitas mereka sendiri” lebih daripada rekan mereka di Jerman. Kortmann mengutip pernyataan perwakilan dari organisasi Süleymanlılar SICN yang percaya bahwa masyarakat Belanda mengharapkan imigran Muslim untuk meninggalkan budaya mereka sepenuhnya. Menurut pendapat organisasi ini, seperti yang ditunjukkan oleh Kortmann, harapan semacam itu tidak dapat diterima: *“Of course, it should not be believed that you will adapt completely when you live in a country. That’s just impossible! [...] We don’t deny our identities!”*²⁷ (Tentu saja, tidak boleh dipercaya bahwa Anda akan beradaptasi sepenuhnya ketika Anda tinggal di suatu negara. Itu tidak mungkin! [...] Kami tidak menyangkal identitas kami!). Organisasi ini merujuk pada komunitas Belanda di Turki, yang juga memelihara tradisi negara asal mereka seperti Hari Ratu (Queens’ Day), sebagai bentuk perlawanan terhadap adanya tuntutan kepada mereka untuk beradaptasi.²⁸

Juga diungkapkan bahwa tidak seperti rekan mereka di Jerman, perwakilan Muslim di Belanda menolak opsi untuk menciptakan identitas baru di negara pemukiman yang baru. Dengan demikian, seperti yang ditunjukkan oleh Kortmann, mereka tidak mendukung gagasan untuk menggabungkan elemen-elemen dari budaya asli mereka

²⁷ Matthias Kortmann (2015), h.1069.

²⁸ Matthias Kortmann (2015), h.1069.

dengan aspek-aspek budaya tuan rumah untuk membentuk identitas baru seperti “Islam Belanda”. Bahkan mereka mengakui perlunya kerja sama antarbudaya atau antaragama. Namun, di sisi lain, mereka takut bahwa kerja sama ini dapat bertentangan dengan keinginan mereka untuk mempertahankan identitas mereka sendiri karena mereka menekankan perlunya melestarikan budaya asli mereka.²⁹

Dalam penelitian ini, Kortmann lebih lanjut menjelaskan bahwa perwakilan Muslim di Belanda menuntut emansipasi sosioekonomi dimana umat Muslim dapat menjadi pemilik nyata dari budaya, kekayaan dalam masyarakat, kesejahteraan dan juga sistem. Namun demikian, Kortmann menunjukkan, emansipasi ini perlu dibarengi dengan pelestarian identitas Islam seorang Muslim. Tantangannya adalah: Bagaimana seseorang melakukan emansipasi dan pada saat yang sama tetap menjadi seorang Muslim? Dalam pandangan perwakilan Muslim itu, kesempatan para imigran untuk melestarikan identitas mereka sendiri di Belanda adalah salah satu keuntungan terbesar dari masyarakat tuan rumah Belanda. Ini dapat digambarkan melalui adanya keberhasilan “hidup berdampingan secara damai” dengan contoh ibu kota Amsterdam, yang telah diperkaya oleh banyak budaya dan agama. Itu benar-benar dapat menyebut dirinya

²⁹ Matthias Kortmann (2015), h.1073.

sebagai tempat multi-agama dan multikultural. Perwakilan Muslim di Amsterdam bangga dengan diri mereka sendiri bahwa mereka dapat menunjukkan kepada dunia bahwa banyak budaya yang berbeda dapat hidup bersama di Amsterdam.³⁰

Kortmann menjelaskan bahwa model koeksistensi yang disukai oleh perwakilan Muslim di Belanda tersebut mirip dengan bagian multikultural dari kebijakan integrasi Belanda sebelumnya, yang memungkinkan untuk penanaman dan pelestarian atribut budaya atau agama dan membangun dialog dan kerja sama antara anggota-anggota elit kelompok-kelompok ini, *"similar to the multicultural parts of former Dutch integration policy, which allows for the cultivation and preservation of cultural or religious attributes and establishes dialogue and cooperation between elite members of these groups."*³¹ Dalam pandangan Kortmann, baik multikulturalis dan asimilasi telah mendukung definisi "integrasi" di mana identitas dipersepsikan sebagai entitas statis dan holistik yang terdiri dari faktor-faktor yang tidak dapat diubah, *"identity is perceived as a static, holistic entity made up of factors that cannot be changed."* Kemudian, Kortmann lebih lanjut menjelaskan bahwa kedua perspektif ini telah mengabaikan

³⁰ Matthias Kortmann (2015), h.1074.

³¹ Matthias Kortmann (2015), h.1078.

kemungkinan untuk menciptakan identitas "hibrida" atau "transnasional" dengan menggabungkan kembali aspek "budaya tuan rumah" dan "budaya asli". Kortmann memandang bahwa dalam peran mereka sebagai "aktor transnasional", organisasi Muslim dapat menjadi aktor yang tepat untuk mendorong penciptaan identitas-identitas ini. Dikatakan bahwa konsep "identitas" yang lebih fleksibel juga mungkin dapat membuka jalan untuk membedakan agama dari "budaya" secara analitis dan, karenanya, untuk menemukan jalan untuk mengintegrasikan agama Islam ke dalam masyarakat Barat secara lebih baik, *"to pave the way for distinguishing religion from 'culture' analytically and, hence, for finding ways to better institutionally integrate the Islamic religion into Western societies."*³² Kortmann menyatakan, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Belanda, bahwa menganggap Islam sebagai salah satu jenis budaya etnis minoritas agaknya tidak cocok ketika berhadapan dengan tantangan yang terkait dengan integrasi Islam di negara tuan rumah.³³

D. "Model Multikultural" Belanda dan Wacana Publik tentang Integrasi

Duyvendak & Scholten (2011) menyatakan bahwa sifat kunci dari model multikultural Belanda adalah ke-

³² Matthias Kortmann (2015), h.1078.

³³ Matthias Kortmann (2015), h.1078.

cenderungannya untuk melembagakan pluralisme budaya dengan keyakinan bahwa pembebasan budaya milik minoritas imigran adalah kunci untuk integrasi mereka ke dalam masyarakat Belanda, *"cultural emancipation of immigrant minorities is the key to their integration into Dutch society."*³⁴ Duyvendak & Scholten menambahkan, hal ini akan mencerminkan penerimaan yang tidak terbantahkan mengenai transformasi masyarakat Belanda menjadi masyarakat multikultural. Hal ini sering dihubungkan dengan sejarah Belanda yang khas tentang Pilarisasi, merujuk pada periode dari 1920-an hingga 1960-an ketika sebagian besar masyarakat Belanda disusun menurut pilar agama tertentu (Protestan, Katolik) atau sosial-budaya (sosialis, liberal).³⁵

Namun demikian, Duyvendak & Scholten berpendapat bahwa hubungan antara Kebijakan Minoritas Etnis Belanda dan sejarah pilarisasi harus diletakkan dalam perspektif bahwa masyarakat Belanda telah melakukan de-pillarisasi di banyak sektor sejak 1960-an dan 1970-an. Dengan demikian, pilarisasi Belanda dianggap sebagai sesuatu dari masa lalu. Namun, itu tidak mengesampingkan bahwa pemerintah menanggapi kedatangan pendatang baru dengan "refleks pilarisasi", maksudnya yaitu *"Dutch policy makers resorted to the traditional frame*

³⁴ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 337.

³⁵ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 337.

*of pillarization for providing meaning to the new issue of immigrant integration"*³⁶ (Pembuat kebijakan Belanda menggunakan kerangka tradisional pilarisasi untuk memberikan makna pada masalah baru integrasi imigran. Terjemah oleh penulis).

Dalam pandangan Duyvendak & Scholten, dalam kebijakan integrasi Belanda sendiri tidak pernah berorientasi pada pembangunan kelompok minoritas sebagai pilar. Demikian juga, minoritas juga tidak pernah mencapai tingkat organisasi (dan pemisahan) yang dicapai oleh minoritas nasional pada awal abad kedua puluh. Duyvendak & Scholten mengutip Rath *et al.* (1996) yang mengatakan: *"in terms of institutional arrangements, there is no question of an Islamic pillar in The Netherlands, or at least one that is in any way comparable to the Roman Catholic or Protestant pillars in the past"*³⁷ (dalam hal pengaturan kelembagaan, tidak ada pertanyaan tentang pilar Islam di Belanda, atau setidaknya sesuatu yang dengan cara apa pun dapat dibandingkan dengan pilar Katolik Roma atau Protestan di masa lalu. Terjemah oleh penulis). Duyvendak & Scholten menekankan bahwa "model multikultural nasional" tidak pernah benar-benar ada, karena mendefinisikan slogan sebagai "integrasi dengan pelestarian identitas budaya" sudah ditolak pada tahap awal

³⁶ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 338-339.

³⁷ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 339.

ini. Baru kemudian, slogan ini diproyeksikan pada periode ini dalam wacana publik dan akademik.³⁸

Kebijakan Minoritas, dalam pengamatan Duyvendak & Scholten, dibingkai ulang menjadi Kebijakan Integrasi yang menekankan partisipasi sosial-ekonomi para imigran sebagai warga negara atau '*allochthonous*' daripada emansipasi minoritas. Selanjutnya, mempromosikan kewarganegaraan yang 'baik' atau 'aktif' menjadi tujuan kebijakan utama, yang merangsang migran individu untuk memenuhi hak-hak kewarganegaraan mereka serta tugas mereka dan untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Duyvendak & Scholten mengungkapkan bahwa berikutnya, setelah pergantian milenium, asimilasionis giliran mengambil tempat atau terjadi dalam kebijakan integrasi Belanda. Ini ditunjukkan oleh adanya debat nasional luas yang kedua yang terjadi pada tahun 2000 sebagai tanggapan terhadap klaim bahwa kebijakan Belanda telah menjadi sebuah "tragedi multikultural" sebagaimana yang dipicu oleh Scheffer pada tahun 2000.³⁹

Duyvendak & Scholten menjelaskan bahwa hal itu (tragedi multikultural) telah menggerakkan perubahan ke giliran tahap asimilasi, yang dikodifikasikan dalam "Kebijakan Integrasi Gaya Baru." Mereka berpendapat bahwa

³⁸ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 339.

³⁹ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 339.

sementara kebijakan integrasi telah menekankan "kewarganegaraan aktif", Kebijakan Integrasi "Gaya Baru" lebih menekankan pada "Kewarganegaraan bersama", yang berarti bahwa kesatuan masyarakat harus ditemukan dalam kesamaan anggota, yaitu bahwa orang berbicara bahasa Belanda, dan bahwa seseorang mematuhi norma-norma dasar Belanda. Selain itu, menurut Duyvendak & Scholten, kebijakan integrasi lebih dan lebih terkait dengan perhatian publik dan politik yang lebih luas tentang pelestarian identitas nasional dan kohesi sosial di dalam masyarakat Belanda.⁴⁰

Penninx (2006) juga berkontribusi dalam diskusi tentang wacana integrasi di Belanda dengan melakukan studi yang baik tentang kebijakan terhadap imigran. Penninx menggambarkan tragedi nasional 2004 di Belanda sebagai serangan terhadap demokrasi di masyarakat Belanda. Pada 2 November 2004, pembuat film Theo van Gogh dibunuh oleh seorang Muslim radikal, seorang pemuda Belanda dari generasi kedua asal Maroko. Dalam pandangan Penninx, pembunuhan itu jelas direncanakan dan bermotivasi politis dan religius, sebagaimana dikonfirmasi oleh surat yang ditulis dalam bahasa Belanda yang sangat baik. Hal yang kemudian mengikuti serangan

⁴⁰ J. W. Duyvendak & P. W. A. Scholten (2011), h. 340.

ini adalah segera setelah peristiwa tersebut terjadi ada dua interpretasi muncul.⁴¹

Menurut Penninx, interpretasi yang pertama menafsirkan pembunuhan itu sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan dengan demikian juga serangan pada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Van Gogh dikatakan telah membuat pernyataan langsung tentang Islam dan Muslim baik dalam program penyiaran publik maupun dalam film pendek, *Submission*, dirancang dalam sebuah kolaborasi erat dengan Ayaan Hirsi Ali, seorang anggota parlemen Partai Liberal asal Somalia. Van Gogh juga dikatakan telah menggunakan gaya konfrontatif dalam film tersebut, menggambarkan "submission" (penyerahan) perempuan dalam Islam dengan menunjukkan di antara gambar-gambar wanita telanjang dengan teks dari Al-Qur'an yang tertulis padanya. Penninx menulis bahwa setelah film tersebut disiarkan di televisi publik Belanda, baik Van Gogh dan Hirsi Ali diancam dengan hukuman karena menghina Islam. Penninx mencatat bahwa menafsirkan pembunuhan tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi telah membenarkan teori Bolkestein sebelumnya bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat didamaikan. Penninx lebih lanjut menyatakan bahwa hal itu

⁴¹ Rinus Penninx (2006), "Dutch Immigrant Policies Before and After the Van Gogh Murder", *Journal of International Migration and Integration*, Vol.7, No.2, pp. 241-254, h. 250.

juga cenderung mengkonfirmasi konsep Fortuyn tentang Islam sebagai "budaya terbelakang." Pendek kata Islam sebagai agama menjadi tersangka.⁴² Interpretasi kedua dari pembunuhan itu, menurut Penninx, menjelaskan kebijakan integrasi dan mengekspos pembunuhan itu sebagai bukti utama kegagalan, terutama yang berkaitan dengan imigran Muslim, karena telah mengizinkan mereka untuk memisahkan diri di sekolah-sekolah Islam, untuk mengimpor imam yang intoleran dan fundamentalis, dan sebagainya.⁴³

Penninx menjelaskan bahwa logika interpretasi dominan ini mengarah pada serangkaian tindakan dan polarisasi lebih lanjut. Beberapa kelompok yang berafiliasi dengan gerakan sayap kanan dilaporkan telah mengeksploitasi situasi ini dengan menyerang simbol-simbol Islam, beberapa sekolah Islam dan beberapa masjid juga telah dibakar. Muslim dan organisasi mereka dikatakan telah sangat ditekan untuk menjauhkan diri mereka dari pembunuhan dan untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada demokrasi, kebebasan berbicara, dan integrasi. Menanggapi situasi itu, perwakilan dari komunitas dan organisasi Muslim dikatakan telah memenuhi sebagian besar dari tuntutan yang diminta. Mereka menyatakan diri

⁴² Rinus Penninx (2006), h. 250.

⁴³ Rinus Penninx (2006), h. 250-251.

mereka mendukung kebebasan berbicara tidak hanya untuk orang-orang seperti Van Gogh, tetapi juga untuk Muslim dan para pemimpin agama mereka. Mereka juga dikatakan telah menegaskan komitmen mereka untuk berintegrasi, tetapi menolak asimilasi dan tuntutan untuk melupakan agama mereka.⁴⁴

Penninx berpendapat bahwa interpretasi pembunuhan van Gogh dapat dilihat sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan demokrasi. Namun demikian, ia tampaknya tidak setuju bahwa itu dianggap sebagai serangan oleh Islam. Sebenarnya serangan itu dilakukan oleh seorang yang diradikalisasi atau mungkin sebuah kelompok yang mana pembunuhnya adalah seorang anggota darinya. Dia berpendapat bahwa kecenderungan kuat untuk menggeneralisasi peristiwa terisolasi untuk semua imigran Muslim dan Islam secara keseluruhan adalah interpretasi yang berbahaya.⁴⁵

Melanjutkan argumentasinya, Penninx menyatakan, jika interpretasi ini tidak berlaku, tidak ada alasan untuk menyalahkan kebijakan integrasi secara umum atau mengubahnya secara radikal berdasarkan insiden tersebut. Tentu saja, menurutnya, ada alasan bagus untuk lebih memperhatikan radikalisasi dalam bentuk apa pun yang merongrong masyarakat demokratis. Penninx

⁴⁴ Rinus Penninx (2006), h. 251.

⁴⁵ Rinus Penninx (2006), h. 251.

mengangkat satu poin bagus bahwa mencegah, mengisolasi, dan memerangi radikalisme Islam hanya dapat dicapai melalui kerja sama semua Muslim, dan kepercayaan adalah satu-satunya dasar di mana kerjasama ini dapat dimenangkan, *"preventing, isolating, and fighting Islamic radicalism can only be achieved through the cooperation of all Muslims, and trust is the only basis on which this cooperation can be won."*⁴⁶

Ada satu lagi studi atau kajian lain yang bagus tentang integrasi yang dilakukan oleh Uitermark (2012). Menurut Uitermark, "integrasi" baru menjadi topik yang hangat pada 1991. Namun, untuk memahami perkembangan dalam perdebatan sejak saat itu, penting untuk merekonstruksi evolusi konteks di mana debat berkembang.⁴⁷ Di dalam studinya, Uitermark memberikan tinjauan umum tentang evolusi ranah sipil Belanda secara luas dan merekonstruksi asal-usul bidang kebijakan untuk memerintah kaum minoritas. Dia mengatakan analisis ini didasarkan pada karya peneliti lain, penelitian arsip, dan wawancaranya sendiri.⁴⁸ Uitermark mengatakan bahwa selama periode tahun 1970-an dan 1980-an, hanya ada sedikit diskusi tentang integrasi minoritas dalam arena

⁴⁶ Rinus Penninx (2006), h. 252.

⁴⁷ Justus Uitermark (2012), *Dynamics of Power in Dutch Integration Politics. From Accommodation to Confrontation*, Amsterdam: Amsterdam University Press, h. 47.

⁴⁸ Justus Uitermark (2012), h. 48.

sipil. Dia mengamati bahwa kadang-kadang ada artikel muncul tetapi tidak ada perdebatan sengit antara politisi atau intelektual. Karena kurangnya perjuangan diskursif ini, menurutnya, bidang yang berkembang di sekitar kebijakan minoritas dapat mengembangkan aturan dan posisi serta oposisinya sendiri yang berbeda.⁴⁹

Uitermark menyatakan bahwa Belanda sering dianggap sebagai contoh teladan dari negara di mana multikulturalisme telah ditinggalkan demi kebijakan yang menuntut dan menegakkan integrasi. Uitermark mencatat bahwa sebagai pemimpin Liberal sayap kanan, Frits Bolkestein, dikatakan telah berpendapat pada tahun 1991 bahwa budaya Barat sangat berbeda, dan jauh lebih unggul dari budaya Islam, *"the culture of the West was very different from – and vastly superior to – the culture of Islam."* Dia dikatakan telah mengklaim bahwa integrasi minoritas telah gagal dan hal itu disebabkan oleh sikap yang terlalu akomodatif dari multikulturalis dan pekerja kesejahteraan. Uitermark menulis bahwa, sejak Bolkestein melakukan intervensi pada tahun 1991, maka serangan diskursif terhadap multikulturalisme, Islam, pekerja kesejahteraan dan kelompok kiri telah berkembang biak.⁵⁰

Dalam pemahaman Uitermark, wacana integrasi menetapkan bagaimana komunitas sipil akan dilindungi

⁴⁹ Justus Uitermark (2012), h. 75.

⁵⁰ Justus Uitermark (2012), h. 15.

dan siapa atau apa yang akan disucikan atau dikorbankan dalam proses tersebut. Selain itu, wacana-wacana integrasi juga menyarankan cara-cara untuk merancang lembaga-lembaga negara sehingga mereka lebih baik memberi sanksi pada identitas dan praktik sipil. Uitermark menambahkan bahwa melalui undang-undang, peraturan, dan dukungan material, ide-ide dan gagasan yang menyusun wacana integrasi dapat dituangkan ke dalam negara.⁵¹

Fatwa menentang klaim Rushdie dan Bolkestein atas superioritas peradaban dikatakan telah menempatkan Islam dalam agenda politik integrasi Belanda pada awal 1990-an. Demikian juga, gambar-gambar buku yang terbakar dan pernyataan Bolkestein dilaporkan telah secara dramatis mengangkat pertanyaan apakah keyakinan Islam dan keterlibatan sipil dapat hidup berdampingan. Karena Kulturalis berpendapat bahwa itu hal yang tidak mungkin, maka itu menyiratkan bahwa mengidentifikasi dengan Islam menghalangi keanggotaan dalam komunitas sipil Belanda. Setelah pembunuhan Pim Fortuyn, perdebatan integrasi tidak lagi terfokus pada "Orang asing" atau "minoritas" tetapi pada "Muslim". Fortuyn dikatakan telah menyebut Islam sebagai "budaya terbelakang" dan secara khusus menyatakan bahwa imigrasi

⁵¹ Justus Uitermark (2012), h. 24.

Muslim harus dihentikan.⁵² Uitermark berpendapat bahwa sejak perdebatan integrasi memanas, perhatian politik dan kebijakan difokuskan pada imigran dan Muslim yang berpotensi kriminal, radikal, terisolasi atau apatis. Dia menulis, "semua perilaku dan sikap ini dibingkai sebagai ekspresi dari kurangnya integrasi sipil." Mayoritas Muslim di Belanda memiliki status sosial ekonomi yang relatif rendah. Karena itu menjadi Muslim dikaitkan dengan karakteristik (negatif) lainnya, dan dipandang sebagai penghalang bagi integrasi.⁵³

Menurut Ersanilli & Koopmans, seperti juga diperdebatkan oleh beberapa sarjana, kebijakan integrasi dipengaruhi oleh tekanan untuk konvergensi internasional daripada oleh ideologi nasional, "*integration policies are influenced by pressures for international convergence rather than by national ideologies.*" Mereka mengatakan bahwa kebijakan integrasi imigran tidak diatur dalam batu dan telah berubah selama bertahun-tahun.⁵⁴ Kebijakan Belanda tentang imigran dikatakan menyerupai

⁵² Justus Uitermark (2012), h.138.

⁵³ Mieke Maliepaard, Marcel Lubbers & Mérove Gijsberts (2010), "Generational differences in ethnic and religious attachment and their interrelation. A study among Muslim minorities in the Netherlands", *Ethnic and Racial Studies*, 33:3, DOI: 10.1080/01419870903318169, h.467.

⁵⁴ Evelyn Ersanilli & Ruud Koopmans (2011), "Do Immigrant Integration Policies Matter? A Three-Country Comparison among Turkish Immigrants", *West European Politics*, 34:2, DOI: 10.1080/01402382.2011.546568, h. 212.

rezim multikulturalis dengan akses mudah ke kesetaraan hukum individu dikombinasikan dengan tingkat akomodasi keragaman yang tinggi. Belanda adalah negara yang paling jelas bergeser dari pandangan kewarganegaraan yang merangsang integrasi ke pandangan bahwa kewarganegaraan adalah mahkota bagi integrasi yang berhasil. Dari tahun 1983 hingga pertengahan 1990an pandangan dominan adalah bahwa akuisisi kewarganegaraan merangsang integrasi. Oleh karena itu Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru tahun 1985 menurunkan persyaratan untuk naturalisasi.⁵⁵

Karya Goodman (2010) juga telah berkontribusi pada studi wacana integrasi. Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan, Goodman membedakan integrasi dari kewarganegaraan dalam studinya. Dalam pandangannya, integrasi imigran "berkaitan terutama dengan kinerja dan tingkat penggabungan pendatang baru dalam masyarakat tuan rumah, sementara kewarganegaraan disibukkan dengan peraturan yang memperluas status hukum dan hak di berbagai 'gerbang masuk' keanggotaan negara". Dia melanjutkan pen-

⁵⁵ Evelyn Ersanilli & Ruud Koopmans (2010), "Rewarding Integration? Citizenship Regulations and the Socio-Cultural Integration of Immigrants in the Netherlands, France and Germany", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36:5, DOI: 10.1080/13691831003764318, h. 778.

kelasannya, tumpang tindih konseptual integrasi sipil belum menghalangi pemeriksaan kebijakan empiris (lembaga *think tank* dan peneliti Eropa telah luar biasa mengikuti perkembangan zaman), namun, menurutnya, "konsistensi tetap menjadi masalah di mana tujuan bagi para peneliti adalah untuk mengkategorikan perubahan dan mengukur dampak."⁵⁶

Meskipun kebijakan integrasi sipil masih berkembang di seluruh Eropa, Goodman berpendapat, mereka telah terbukti sebagai konsekuensi dan kontroversial. Dalam pandangan Goodman, kebijakan-kebijakan itu tidak hanya dapat menetapkan hambatan yang sangat tinggi untuk memperoleh berbagai status hukum, menghambat penyelesaian yang aman untuk para migran di berbagai negara bagian, tetapi mereka juga memberi tahu kita "sesuatu tentang pertemuan tekanan seputar imigrasi dan keanggotaan di negara-negara itu yang menerapkan persyaratan ketat untuk masuk, penyelesaian dan kewarganegaraan." Terlepas dari apakah kebijakan-kebijakan itu berfungsi, simbolis atau strategis, di dalam pandangan Goodman, integrasi sipil menghasilkan debat baru tentang keanggotaan dan identitas nasional yang menantang

⁵⁶ Sara Wallace Goodman (2010), "Integration Requirements for Integration's Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36:5, DOI: 10.1080/13691831003764300, h. 755-756.

komitmen pendatang baru dan koherensi komunitas nasional di mana mereka diminta untuk berintegrasi, "*civic integration is generating new debates about membership and national identity that challenge both the commitment of newcomers and the coherence of the national community into which they are required to integrate.*"⁵⁷

Karya Vasta (2007) memberikan diskusi yang menyeluruh dan menarik tentang masalah integrasi. Vasta menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir telah ada "kepanikan moral" yang tersebar luas di Eropa tentang imigrasi dan keragaman etnis. Menurut Vasta, politisi populis dan beberapa bagian media telah menggambarkan imigran sebagai ancaman terhadap keamanan, kohesi sosial dan sistem kesejahteraan. Demikian pula, politisi populis itu juga dikatakan telah mengklaim bahwa para imigran menolak untuk berintegrasi dan bahwa pemerintah telah kehilangan kendali.⁵⁸

Debat publik tentang imigran dan integrasi menjadi sangat panas. Pada tahun 2000 jurnalis Paul Scheffer dilaporkan telah menarik perhatian besar dengan klaimnya bahwa Belanda terlalu murah hati dengan tidak bersikeras menuntut imigran mempelajari bahasa Belanda,

⁵⁷ Sara Wallace Goodman (2010), h. 768.

⁵⁸ Ellie Vasta (2007), "From ethnic minorities to ethnic majority policy: Multiculturalism and the shift to assimilationism in the Netherlands", *Ethnic and Racial Studies*, 30:5, DOI: 10.1080/01419870701491770, h. 713.

budaya dan sejarah. Menurut garis pemikiran ini, Vasta menulis, bahwa dengan mendukung penerimaan berbagai identitas budaya yang beragam yang pada akhirnya akan menghancurkan kohesi sosial, orang Belanda dianggap telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi liberal dasar, *"the Dutch had ignored basic liberal democratic values in favour of the acceptance of diverse cultural identities which would ultimately destroy social cohesion."*

⁵⁹

Dalam pandangan Vasta, Belanda, seperti banyak negara Eropa lainnya, sedang mengalami efek buruk dari globalisasi, ancaman-ancaman terhadap keamanan, dan perubahan iklim politik. Vasta memfokuskan studinya pada Belanda karena pergeseran itu tampak lebih ekstrem daripada di tempat lain. Menurut Vasta, perubahan ini didasarkan pada gagasan bahwa pendekatan pluralis atau multikultural untuk penggabungan imigran telah gagal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh dua alasan. Pertama adanya toleransi yang salah tempat untuk perbedaan budaya di pihak Belanda. Kedua, adanya penolakan yang disengaja oleh beberapa imigran untuk merangkul budaya, bahasa dan nilai-nilai Belanda. Secara bersama-sama, Vasta melanjutkan, ini dianggap me-

⁵⁹ Ellie Vasta (2007), h. 714.

nyebabkan kurangnya integrasi beberapa kelompok imigran (terutama non-Eropa dan terlebih-lebih Muslim) ke pasar tenaga kerja dan di masyarakat pada umumnya.⁶⁰

Terungkap bahwa berbagai kelompok di Belanda menekankan berbagai aspek integrasi yang berbeda. Kelompok-kelompok konservatif dan populis dikatakan menyerukan integrasi budaya dengan "pandangan untuk memulihkan negara yang homogen (imajiner)," sementara kaum sosial demokrat lebih mementingkan kinerja yang berhasil dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja. Namun, menurut Vasta, mereka juga tampaknya "menyerukan secara tidak langsung untuk integrasi budaya karena ini dipandang sebagai prasyarat untuk keberhasilan sosial-ekonomi." Dalam jangka panjang, Vasta menulis, kedua pendekatan, menekankan adaptasi individu dan kesesuaian imigran sendiri merupakan sebuah permintaan yang mendekati asimilasionisme.⁶¹

Seperti yang telah ditunjukkan dalam diskusi di atas, integrasi tampaknya dipahami secara berbeda oleh kedua pihak: para imigran Muslim yang ingin mempertahankan identitas mereka sendiri, dan masyarakat tuan rumah yang ingin umat Muslim menghentikan identitas mereka dan untuk mengadopsi nilai-nilai masyarakat tuan rumah.

⁶⁰ Ellie Vasta (2007), h. 715.

⁶¹ Ellie Vasta (2007), h. 719.

Shavit & Wiesenbach dalam studi mereka (2012) menyimpulkan, antara lain, bahwa Islam di Barat bukanlah fenomena statis atau koheren. Minoritas Muslim terus mengembangkan teks, institusi, artefak dan praktik yang bertujuan untuk memungkinkan integrasi dalam kerangka hukum dan tradisi Islam. Shavit & Wiesenbach menilai bahwa meskipun didasarkan pada pembenaran agama, inisiatif-inisiatif ini juga membahas masalah etnis, budaya, keuangan dan motivasi.⁶²

Oleh karena itu, adalah masuk akal untuk berargumentasi apakah integrasi berarti penerimaan tanpa syarat terhadap norma-norma masyarakat penerima, atau apakah dimungkinkan untuk memodifikasi norma-norma tersebut. Apakah integrasi dapat dicapai melalui lembaga berbasis agama yang mengucilkan minoritas dari mayoritas adalah masalah lain yang harus diatasi. Selain itu, kemungkinan integrasi yang diinginkan oleh masyarakat Eropa dapat dicapai oleh individu yang mengakui hukum agama sebagai sistem yang mencakup semua dan mengikat masih dipertanyakan. Tuntutan dari masyarakat tuan rumah untuk melarang norma dan praktik imigran yang oleh banyak orang dianggap tidak liberal

⁶² Uriya Shavit & Frederic Wiesenbach (2012), "An 'Integrating Enclave': The Case of Al-Hayat, Germany's First Islamic Fitness Center for Women in Cologne", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32:1, DOI: 10.1080/13602004.2012.665621, h. 59.

sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma mereka sebagai masyarakat liberal.⁶³

E. Upaya Peningkatan Kualitas dan Dukungan Integrasi

Pertama-tama, harus dibuat jelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan integrasi. Integrasi dapat didefinisikan sebagai partisipasi kelompok atau individu dalam masyarakat sambil mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka sendiri yang mana bagian-bagian yang penting masih tetap utuh, "*the participation of groups or individuals in society while retaining and developing their own identity with its essential parts remaining intact*".⁶⁴ Ini dapat dilihat sebagai proses di mana pendatang baru atau minoritas dimasukkan ke dalam struktur sosial masyarakat tuan rumah.⁶⁵ Berbeda dari asimilasi yang dipaksakan, integrasi sosial berfokus pada sejauh mana para imigran beradaptasi dengan kebiasaan setempat, hubungan sosial, dan praktik sehari-hari. Biasanya

⁶³ Uriya Shavit & Frederic Wiesenbach (2012), h. 59.

⁶⁴ Chr. Elsas (1991), "Turkish Islamic Ideals of Education: Their Possible Function for Islamic Identity and Integration in Europe", dalam W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*. Kampen: Pharos, pp. 174-186, h. 176.

⁶⁵ Richard Alba & Victor Nee (1997), "Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration." *International Migration Review*, 31(4), 826-874.

diukur dengan melihat jejaring sosial, penggunaan bahasa, dan jumlah pernikahan antar teman.⁶⁶ Dalam banyak kasus, pendidikan digunakan sebagai mekanisme untuk mempromosikan integrasi sosial, dan inilah yang juga terjadi dengan lembaga pendidikan Islam di Belanda.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh sekolah dasar Islam di Belanda berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan mempromosikan integrasi, dalam studi ini penulis mengkaji dua masalah tersebut dan hanya terfokus pada sekolah dasar Islam di bawah yayasan Sekolah Islam Amsterdam (*Islamitische Scholen Amsterdam / ISA*) dan yayasan Noor Amsterdam. Alasan memilih sekolah di bawah yayasan-yayasan ini untuk dikaji dalam diskusi ini adalah karena mereka dikelola oleh salah satu manajer terbaik, yang telah memenangkan penghargaan sebagai manajer multikultural terbaik tahun 2011 di Belanda, Mr. Redouan Boudil, dan faktanya sekolah-sekolah di bawah manajemennya sekarang tumbuh berkembang ke tingkat yang lebih baik.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang upaya yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut berkenaan dengan peningkatan kualitas dan promosi atau seruan berintegrasi, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu identitas yayasan, dan identitas sekolah di bawah

⁶⁶ Jacob L. Vigdor (2008). *Measuring Immigrant Assimilation in the United States*. New York: NY: Manhattan Institute, Civic Report No. 53.

yayasan tersebut serta direktur pelaksana yayasan. Menurut informasi yang terdapat di situs web-nya, yayasan ISA, yang terletak di Derkinderenstraat 86, 1062 BJ Amsterdam, Telepon: 020-5110520, pada saat ini menjalankan atau mengelola tiga sekolah dasar Islam di empat lokasi berbeda. Sekolah tersebut adalah: (1) Sekolah Dasar Islam Al-Jawhara (sebelumnya Siddieq Oost), yang terletak di Sumatraplantsoen 15, 1095 HW Amsterdam, Telepon: 020-6168923, (2) Sekolah Dasar Islam Al-Yaqoet (sebelumnya Siddieq Noord), berlokasi di Dijkmanshuizenstraat 119, 1024 XJ Amsterdam, Telepon: 020-6168923, (3) Sekolah Dasar Islam Al-Maes (sebelumnya Siddieq Barat), berlokasi di Jan van Riebeeckstraat 11-13, 1057 ZW Amsterdam, Telepon: 020-6168923, (4) Sekolah Dasar Islam Al-Maes (sebelumnya Siddieq West, berlokasi di Cornelis Dirkszstraat 6-8, 1056 TR Amsterdam, Telepon: tidak tersedia.⁶⁷ Sementara yayasan Noor, yang terletak di Johan Huizinglaan 112, 1065 JE Amsterdam, sekarang mengelola lima sekolah dasar Islam. Mereka adalah: (1) Al-Hambra, berlokasi di Aziëlaan 157, 3526 SG Utrecht, Telepon: 030-2667751, (2) Al-Ihsaan, yang terletak di Schor 7, 8224 CM Lelystad, telepon: 032-0213849,⁶⁸ (3) Al-Iman, berlokasi di Harderwijkoever 3, 1324 HA Almere, telepon: 036-5304737,⁶⁹ (4) Ayoub di

⁶⁷ <http://www.as-siddieq.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

⁶⁸ <http://www.noorscholen.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

⁶⁹ <http://www.aliman.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

Hilversum, (5) Er-Riseleh, berlokasi di Stadhouderslaan 1B, 2313 AB Leiden, telepon: 071-512 8850.⁷⁰

Dua yayasan ini, ISA dan Noor, berada di bawah manajemen yang dipimpin oleh Mr. Redouan Boudil sebagai direktur-manajer mereka. Redouan Boudil adalah orang Maroko-Belanda yang lahir di Amsterdam. Ia menerima pendidikan Manajemen dan Administrasi Bisnis (MBA) di Amsterdam. Dia telah bekerja untuk beberapa perusahaan komersil termasuk bank ABN-AMRO sebelum akhirnya bergabung dalam pengelolaan pendidikan dasar Islam.⁷¹ Sebelum ia bergabung dengan yayasan ini, sekolah-sekolah di bawah yayasan tersebut dinilai sebagai "sekolah yang sangat lemah" oleh Inspeksi Pendidikan Belanda.⁷² Pilihannya untuk bergabung dengan manajemen pendidikan telah menciptakan dampak positif bagi sekolah. Dia telah diminta untuk bergabung dengan yayasan-yayasan ini, dan segera setelah itu dia membuat perubahan signifikan dalam hal menjalankan administrasi sekolah secara profesional dan meningkatkan kualitas pendidikan ke tingkat yang lebih baik. Setelah berjuang selama beberapa tahun, kualitas pendidikan sekolah-sekolah di bawah manajemennya bergerak ke

⁷⁰ <http://www.ibs-erriseleh.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

⁷¹ <http://www.socialetrfdagen.be/sprekers.html>. Retrieved 16 September 2017.

⁷² <http://www.socialetrfdagen.be/sprekers.html>. Retrieved 16 September 2017.

tingkat yang lebih baik. Kondisi sekolah-sekolah ini sekarang, sebagian karena upaya dan kerja kerasnya, telah menjadi salah satu sekolah terbaik di wilayah tersebut.⁷³

F. Komitmen untuk Memberikan Pendidikan Islam yang Berkualitas

Memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang baik telah menjadi perhatian besar dan tekad dari yayasan ISA, yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah naungan manajemennya. Sekolah As-Siddieq, misalnya, dalam situs webnya mengklaim bahwa sekolah tersebut telah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa sesuai dengan persyaratan di Belanda, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan penawaran kualitasnya:

*De As-Siddieqschool heeft als uitgangspunt het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen volgens de eisen die gesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Ons aanbod met betrekking tot het onderwijs wordt getoetst om aan de normen en standaarden te kunnen voldoen zoals gesteld door het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het onderwijs.*⁷⁴

(Sebagai titik awal, Sekolah As-Siddieq menyediakan pendidikan yang baik untuk siswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang

⁷³ <http://www.theotherbusinessman.nl/redouan-boudil-winnaar-tom-2011/>. Retrieved 16 September 2017.

⁷⁴ <http://www.as-siddieq.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

Pendidikan Dasar. Tawaran kami terkait dengan pendidikan telah diuji untuk memenuhi norma dan standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Inspektorat Pendidikan. Terjemah oleh penulis).

Dari kutipan di atas jelas bahwa Sekolah Dasar As-Siddieq telah menunjukkan komitmennya untuk hanya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para siswanya. Setidaknya, inilah yang telah ditulis di situs webnya. Masyarakat pengguna layanan pendidikan di sekolah tersebut (orang tua Muslim yang mengirimkan anaknya ke sekolah itu) punya hak untuk menuntut servis sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam pandangan As-Siddieq pendidikan yang berkualitas adalah penting karena itu adalah kunci untuk membuat anak-anak berkembang dengan baik di masyarakat. Ini ditekankan secara jelas dalam pernyataannya:

Goed onderwijs is de sleutel voor een goede ontwikkeling van een kind en van de samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. De As-Siddieqschool kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs en persoonlijke aandacht voor de leerlingen. De lessen worden gegeven door enthousiaste en bevoegde leerkrachten. Het team van de As-Siddieq ziet elke dag als een nieuwe

*uitdaging om het talent en ambities van onze leerlingen naar de top te brengen.*⁷⁵

(Pendidikan yang baik adalah kunci perkembangan anak dan masyarakat yang baik. Seorang anak yang mengikuti pendidikan yang baik menciptakan peluang untuk masa depan dan mendapatkan pengetahuan yang dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Sekolah As-Siddieq ditandai dengan pendidikan berkualitas baik dan perhatian pribadi untuk para siswa. Pelajaran diberikan oleh guru yang antusias dan kompeten. Tim As-Siddieq melihat setiap hari sebagai tantangan baru untuk membawa bakat dan cita-cita siswa kami ke tingkat atas. Terjemah oleh penulis).

Pendidikan telah dipandang sebagai investasi untuk masa depan anak-anak, oleh karena itu, As-Siddieq bersikeras hanya mempekerjakan guru-guru terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, sekolah telah terlibat aktif dalam kompetisi akademik apa pun. Sebagai contoh, siswa As-Siddieq, dengan tiga kantor di Amsterdam, telah berpartisipasi dalam kontes debat dan proyek-proyek lain yang ditandai dengan kewarganegaraan. Demikian juga, untuk menanamkan disiplin bagi para siswanya, sekolah memiliki aturan khusus. Dari mulai kelas 5, anak laki-laki dan perempuan dipisah sedapat mungkin dan jilbab diwajibkan

⁷⁵ <http://www.as-siddieq.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

untuk anak perempuan. Pakaian menutupi seluruh tubuh dan tangan kecuali wajah. Dari kelas 4, siswa harus ikut berpuasa selama Ramadhan. Menurut Geert Driessen, pendidik di Radboud University Nijmegen dan berspesialisasi dalam pendidikan untuk anak-anak imigran, sekolah-sekolah Islam barangkali positif dalam hal-hal tertentu karena anak-anak pergi ke sekolah di lingkungan yang dilindungi. Meskipun dia tidak setuju dengan peraturan sekolah untuk memisahkan anak laki-laki dari anak perempuan di kelas. Penelitiannya menunjukkan bahwa murid-murid dari sekolah-sekolah ini lebih baik dalam hal kewarganegaraan daripada anak-anak lain.⁷⁶ Tampaknya sekolah-sekolah dasar Islam di Amsterdam berkinerja baik secara umum. Tidak diragukan lagi bahwa permintaan pendidikan Islam di Amsterdam tinggi karena jumlah siswa juga terus bertambah.

G. Promosi Kewarganegaraan Aktif dan Integrasi Sosial melalui Misi Sekolah

Penulis beranggapan adalah adil untuk mengatakan bahwa sekolah dasar Islam di bawah yayasan ISA dan Noor (yang sengaja dipilih untuk dibahas dalam kajian ini) termasuk di antara sekolah-sekolah di Belanda yang cenderung mendukung integrasi ke dalam masyarakat

⁷⁶ Het Parool (9 Sep 2017), "Islambrugklas, risico of kans?" [Islamic bridge class, risk or chance?]. Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.

Belanda. Dalam paragraf-paragraf berikut penulis akan membahas, pertama, sekolah di bawah manajemen yayasan ISA dan, kemudian, sekolah di bawah manajemen yayasan Noor secara berurutan, dalam hal upaya-upaya mereka mempromosikan integrasi.

Mengenai sekolah-sekolah di bawah pengelolaan yayasan ISA, yang juga disebut sebagai sekolah As-Siddieq (yaitu al-Jawhara, al-Yaqoet, dan al-Maes), penulis berpendapat bahwa sekolah-sekolah tersebut telah melakukan sesuatu yang berarti dalam hal mempromosikan integrasi dan kohesi sosial ke dalam masyarakat Belanda. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dari visi dan misi sekolah. Di dalam pernyataan misinya dikatakan bahwa:

Onderwijs en opvoeding zijn beide belangrijke componenten binnen onze school. De opvoeding wordt in belangrijke mate bepaald door de waarden en normen vanuit de Islamitische belevingswereld (zoals die zijn opgeschreven in de Koran en overgeleverd in de Soenah) en de waarden die in het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn geformuleerd.⁷⁷

(Pendidikan dan pengasuhan keduanya merupakan komponen penting di sekolah kami. Pembinaan sangat ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma pengalaman dunia Islam (seperti yang ditulis dalam Al-Qur'an dan diturunkan dalam Sunnah) dan nilai-nilai

⁷⁷ <http://www.as-siddieq.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

yang dirumuskan dalam konteks kewarganegaraan aktif dan integrasi sosial. Terjemah oleh penulis).

Jelas bahwa sekolah As-Siddieq memiliki misi untuk menghasilkan murid yang tumbuh di bawah tidak hanya prinsip-prinsip norma dan nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga nilai-nilai kewarganegaraan aktif dan integrasi sosial di tengah masyarakat tuan rumah yakni Belanda.

Juga ditekankan dalam pernyataan misi itu bahwa anak-anak hendaknya dipersiapkan untuk dunia di mana mereka akan hidup, sebagaimana dinyatakan lebih lanjut, *"Het uiteindelijke leerdoel van het primair onderwijs is, dat het kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs en de wereld waarin het kind leeft"*⁷⁸ (Tujuan utama pendidikan dasar adalah agar anak dipersiapkan sebaik mungkin untuk pendidikan menengah dan dunia di mana anak itu tinggal). Menurut hemat penulis, ini adalah poin yang baik bagi pendidikan (sekolah-sekolah) Islam untuk beradaptasi dengan lingkungan lokal, yaitu masyarakat Belanda, karena itu adalah tempat di mana anak-anak akan tinggal dan hidup. Pernyataan misi ini berlaku untuk semua sekolah As-Siddieq (al-Jawhara, al-Yaqoet, dan al-Maes). Membuat tujuan pendidikan untuk menghasilkan dan mempersiapkan siswa

⁷⁸ <http://www.as-siddieq.nl>. Retrieved on 16 September 2017.

yang tumbuh dan memegang identitas Islam namun pada saat yang sama menjadi warga negara aktif yang bersedia untuk berintegrasi dan secara aktif berpartisipasi dalam masyarakat Belanda sebagai misi sekolah adalah pekerjaan hebat yang telah dilakukan oleh sekolah As-Siddieq.

Apa yang telah tertulis dalam pernyataan misi tersebut adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Namun, pada tataran praktis, itu harus diverifikasi oleh bukti nyata. Terlepas dari niat sekolah untuk mempromosikan integrasi, masih saja ada sebagian kelompok dari masyarakat Belanda yang ragu-ragu tentang hal itu. Ini bisa dilihat dari peristiwa ketika As-Siddieq ikut serta dalam kompetisi debat di Amsterdam pada April 2017.

Seperti dilaporkan di koran Belanda, *Het Parool*, ada kontes debat untuk siswa sekolah dasar di Amsterdam, di mana As-Siddieq juga berpartisipasi. Selama debat, murid-murid berusia sepuluh dan sebelas tahun tersebut mendiskusikan pernyataan yang berhubungan dengan masyarakat multikultural: apakah penting bagi anak-anak untuk terlibat dalam latar belakang satu sama lain. Para siswa terbukti sangat toleran. Siswa As-Siddieq juga membela pernyataan bahwa penting bagi anak-anak untuk tumbuh di antara budaya-budaya lain. Selama pertemuan dewan juri, ada penampilan lain yang dipersembahkan. Anak-anak memasuki panggung untuk melakukan tarian, tetapi kemudian siswa-siswa As-Siddieq segera pergi

keluar meninggalkan aula. Kepergian anak-anak itu sendiri berjalan lancar dan tidak mengganggu.⁷⁹ Murid-murid As-Siddieq meninggalkan aula sebelum pertunjukan penari jalanan itu dimulai karena didorong oleh keyakinan mereka bahwa para siswa atau murid tersebut tidak diizinkan untuk melihatnya.⁸⁰

Yang terjadi selanjutnya adalah debat tentang apakah kepergian siswa tersebut merupakan bentuk integrasi, atau hanya contoh pemisahan (*segregation*), sekolah menarik diri dari melihat penampilan tarian yang benar-benar normal di Belanda. Gubernur Simone Kukenheim (Pendidikan) diharapkan untuk dapat menyelidiki apa yang telah dilakukan sekolah Islam As-Siddieq itu dalam hal kewarganegaraan dan integrasi. Beberapa anggota dewan ingin memperjelas apa yang Amsterdam harapkan dari sekolah As-Siddieq.⁸¹ Apakah itu bisa dikatakan se-

⁷⁹ Michiel Couzy (15 April 2017), "Leerlingen islamitische school verlaten zaal bij dansoptreden" [Student of Islamic school left the hall before dance performance]. <https://www.parool.nl/amsterdam/leerlingen-islamitische-school-verlaten-zaal-bij-dansoptreden~a4487326/>. Retrieved 26 September 2017.

⁸⁰ Michiel Couzy (16 May 2017), "Voldoet school As-Siddieq aan ondergrens integratie?" [Does school As-Siddieq meet bottom-level integration?] <https://www.parool.nl/amsterdam/voldoet-school-as-siddieq-aan-ondergrens-integratie~a4495078/>. Retrieved 26 September 2017.

⁸¹ Michiel Couzy (16 May 2017), "Voldoet school As-Siddieq aan ondergrens integratie?" [Does school As-Siddieq meet bottom-level integration?] [https://www.parool.nl/amsterdam/voldoet-school-as-](https://www.parool.nl/amsterdam/voldoet-school-as-siddieq-aan-ondergrens-integratie~a4495078/)

buah integrasi utama bila para siswa As-Siddieq ambil bagian dalam sebuah debat dan orang lain mau mempertimbangkan keimanan mereka (siswa As-Siddieq)? Menurut Geert Driessen, keikutsertaan As-Siddieq dalam kompetisi debat adalah positif tetapi pergi meninggalkan ruangan ketika musik sedang ditampilkan adalah tidak baik, karena orang-orang hidup di dalam masyarakat dengan banyak musik. Dia menganggap itu sebagai bentuk segregasi.⁸² Perlu dicatat bahwa musik dan tarian mungkin tidak cocok dengan interpretasi fundamentalis Islam, tetapi menurut interpretasi arus utama Islam yang mayoritas, mendengarkan musik dan melihat tarian tidaklah dilarang.

Sekarang bagaimana dengan sekolah-sekolah di bawah manajemen yayasan Noor (al-Hambra di Utrecht, al-Ihsaan di Lelystad, al-Iman di Almere, Ayoub di Hilversum, dan Er-Risalah di Leiden), apakah mereka melakukan sesuatu dalam hal meningkatkan kohesi sosial dan integrasi? Pertama, mari kita periksa visi dan misi mereka. Dalam buku panduan sekolah dari sekolah-sekolah ini, visi dan misi disajikan secara jelas. Sekolah Al-

siddieq-aan-ondergrens-integratie~a4495078/. Retrieved 26 September 2017.

⁸² Michiel Couzy (2017, April 15), "Leerlingen islamitische school verlaten zaal bij dansoptreden" [Student of Islamic school left the hall before dance performance]. <https://www.parool.nl/amsterdam/leerlingen-islamitische-school-verlaten-zaal-bij-dansoptreden~a4487326/>. Retrieved 26 September 2017.

Hambra memiliki misi membekali siswa-siswanya sebanyak mungkin untuk mewujudkan bakat mereka dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan lingkungan. Mereka membedakan diri mereka dari sekolah lain dari sudut pandang filsafat Islam dan tempat kerja yang Islami. Visi pedagogisnya adalah bahwa kesetaraan di antara orang-orang adalah titik awal yang penting. Ini mendorong anak-anak yang belajar untuk menghormati nilai-nilai dan norma orang lain, membedakan diri mereka dari ras, status, kecacatan, budaya atau kepercayaan.⁸³

Sekolah Al-Iman menganggap misinya sebagai tujuan yang ditujukan untuk anak-anak, bahwa dua sumber bagi Muslim, Al-Qur'an dan Sunnah membentuk dasar pendidikan mereka dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Mereka yakin bahwa setiap anak pada dasarnya baik. Namun, setiap anak memiliki keunikan karena faktor bawaan dan lingkungan yang berbeda. Al-Iman berusaha untuk mengatur lingkungan sekolah untuk memenuhi kebutuhan setiap anak. Misi sekolah Al-Iman adalah sebagai berikut: *"Based on Islamic identity, we help our children in their social and cognitive development by providing them with high quality education so that they are able to contribute in a responsible and respectful way to the society*

⁸³ *Schoolgids Al-Hambra 2016-2017*, h. 7.

they are part of."⁸⁴ (Berdasarkan identitas Islam, kami membantu anak-anak kami dalam perkembangan sosial dan kognitif mereka dengan memberikan mereka pendidikan berkualitas tinggi sehingga mereka dapat berkontribusi dalam cara yang bertanggung jawab dan penuh hormat kepada masyarakat dimana anak tersebut menjadi bagian. Terjemah oleh penulis). Tampak jelas, mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab menjadi perhatian di sekolah dasar Al-Iman.

Sekolah Al-Ihsaan, dalam visinya, menekankan hak umat Muslim untuk mengatur kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan standar Islam yang berasal dari dua sumber, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena hukum dan peraturan-peraturan di Belanda mengizinkan Muslim untuk membangun fasilitas-fasilitas berdasarkan Islam, sehingga dengan demikian memungkinkan Muslim mengekspresikan identitas (keIslaman) mereka. Demikian juga, penting bagi Muslim untuk memanfaatkan semua peluang di Belanda sehingga mereka dapat berpartisipasi secara optimal. Muslim di Belanda memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan kelompok sosial lainnya dalam proses sosial, *"Muslims make use of all opportunities in the Netherlands so that they can participate optimally. Muslims in the Netherlands have as much responsibility as the*

⁸⁴ *Schoolgids Al-Iman 2016-2017*, h. 7.

other social groups in social processes".⁸⁵ Di sini, Al-Ihsaan juga menekankan pentingnya mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Ini berarti sekolah sudah melakukan upaya mempromosikan integrasi. Selanjutnya, mengenai sekolah Ayoub di Hilversum, situs webnya sedang tidak tersedia, oleh karena itu, penulis tidak dapat memasukkan sekolah tersebut dalam bahasan ini.

Di dalam *Schoolgids 2017-2018* milik sekolah Er-Riseleh di Leiden, disebutkan bahwa sebenarnya masyarakat Belanda menawarkan kepada kaum Muslim kesempatan untuk mengekspresikan identitas Islam mereka. Dari fakta ini dapat dipahami bahwa umat Islam dapat mengatur kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan standar Islam, karena hukum dan peraturan di Belanda memungkinkan umat Islam untuk membangun fasilitas berdasarkan Islam. Dua sumber Muslim, Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi Muhammad membentuk dasar partisipasi umat Islam dalam masyarakat. *Schoolgids* tersebut juga menyatakan bahwa umat Muslim harus dapat memanfaatkan semua peluang di Belanda agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal. Dijelaskan pula dalam *Schoolgids*, "Muslims in the Netherlands have as much responsibility as the other social groups in social processes. Education

⁸⁵ *Schoolgids* Al-Ihsaan 2015-2016, h.10.

should prepare and enable children to fully function and participate in Dutch society, with the emphasis to do this from their own philosophical and cultural backgrounds".⁸⁶ (Muslim di Belanda memiliki tanggung jawab sebanyak kelompok sosial lainnya dalam proses sosial. Pendidikan harus mempersiapkan dan memungkinkan anak-anak berfungsi penuh dan berpartisipasi dalam masyarakat Belanda, dengan penekanan untuk melakukan ini dari latar belakang filosofis dan budaya mereka sendiri). Visi Er-Riseleh ini terlihat mirip dengan Al-Ihsaan. *Schoolgids* dari sekolah-sekolah ini menegaskan bahwa siswa yang belajar di sekolah-sekolah tersebut sedang dipersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat Belanda. Semua sekolah dasar Islam di bawah yayasan ISA dan Noor (yang sengaja dipilih untuk dibahas untuk studi ini) secara eksplisit menyebutkan dalam pernyataan misi mereka untuk menghasilkan siswa yang cocok untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda. Tentunya, waktulah yang akan menjawab dan mengkonfirmasi apakah mereka akan berhasil mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat tuan rumah dengan baik.

H. Penguatan Posisi Masyarakat Muslim yang Berintegrasi Sosial

Yayasan ISA dan Noor telah berjuang sangat keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah di bawah

⁸⁶ *Schoolgids* Er-Risalah 2017-2018, h.9.

naungan manajemen mereka agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Belanda. Selain itu, yayasan juga secara aktif telah meningkatkan atau memperkuat posisi komunitas Muslim yang mencari integrasi ke dalam masyarakat Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang direktur pelaksana yayasan-yayasan ini, Mr. Redouan Boudil, dalam menanggapi debat yang panas baru-baru ini mengenai kehadiran Sekolah Menengah Islam Cornelius Haga Lyceum di Amsterdam yang mulai beroperasi pada September 2017.

Profesor (Emeritus) P.S. van Koningsveld, seorang ahli Islam yang pernah menduduki Chair Department of History of Religion in Western Europe di Universiteit Leiden, mengatakan kepada penulis bahwa pendirian sekolah Islam Cornelius Haga Lyceum merupakan satu hal yang kontroversi karena adanya beberapa penolakan dari beberapa pihak di dalam masyarakat Belanda. Bahkan masalah tersebut harus dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikan status hukum atau legalitas formalnya. Setelah hakim di pengadilan memutuskan menolak keberatan dari penggugat karena tidak adanya dasar yang kuat dan memutuskan legalitas pendirian sekolah tersebut, maka sekolah Islam Cornelius Haga Lyceum dapat beroperasi secara legal di Amsterdam dan membuka kelas

di tahun ajaran baru, yakni pada September 2017.⁸⁷ Inilah dinamika yang terjadi di Belanda. Setelah mendapat pengesahan dari pengadilan maka tidak ada alasan bagi dinas pendidikan kota untuk tidak memberikan izin baginya untuk beroperasi.

Setelah Dewan Negara menolak keberatan-keberatan terhadap pendirian Sekolah Menengah Islam bernama Cornelius Haga Lyceum pada musim panas 2017, sekolah Islam itu kemudian dapat membuka pintunya bagi para siswa Amsterdam. Bagi banyak orang, ini dapat dilihat sebagai kemenangan bagi Söner Atasoy, ketua dan pendiri Yayasan Pendidikan Islam (*Stichting Islamitisch Onderwijs / SIO*) dan merupakan kekalahan bagi semua orang tua, siswa dan guru di komunitas Muslim yang mencari integrasi ke dalam masyarakat Belanda.⁸⁸ Menanggapi hal itu, sejumlah sekolah dasar Islam di Amsterdam merekomendasikan siswa mereka untuk menghindari Cornelius Haga Lyceum. Perwakilan dari sekolah-sekolah itu menyarankan agar orang tua dapat memilih di antara banyak sekolah negeri atau sekolah Katolik atau Kristen Protestan di mana anak-anak mereka juga berhubungan dengan anak-

⁸⁷ Perbincangan informal dan wawancara Muslih (penulis buku ini) dengan Profesor (Emeritus) Dr. P.S. van Koningsveld pada Kamis, 14 September 2017 di Universitaire Bibliotheek (UB) Leiden, Universiteit Leiden, di Rapenburg 70, 2311 Leiden Nederland.

⁸⁸ *De Volkskrant*, (6 Sep 2017), Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.

anak dari berbagai latar belakang. Itu akan menjadi yang terbaik untuk integrasi anak-anak mereka.⁸⁹

Salah satu perwakilan dari 15 sekolah dasar Islam di wilayah Amsterdam yang memberikan reaksi keras terhadap pembukaan Sekolah Menengah Islam Cornelius Haga Lyceum di Amsterdam pada September 2017 adalah Redouan Boudil, direktur pelaksana yayasan ISA dan Noor. Dia memprakarsai ajakan pada orang tua Muslim untuk tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah Islam baru, Cornelius Haga di bawah manajemen Yayasan Pendidikan Islam (SIO). Boudil menganggap dewan SIO tidak memiliki pengalaman dan hubungan dengan pendidikan. Dia bahkan menyebut dewan SIO sebagai "koboi yang tidak melihat kepentingan publik".⁹⁰ Dalam sebuah pernyataan yang ia sampaikan kepada surat kabar, Boudil mengatakan bahwa ia telah bekerja keras untuk memoles citra pendidikan Islam, dan ia tidak akan membiarkan seseorang merusaknya. Dia menuduh manajer SIO, yang manaungi Sekolah Menengah Islam Cornelius Haga Lyceum, sebagai telah menyangkal "reputasi baik pendidikan Islam" yang telah dia bangun selama sembilan tahun

⁸⁹ De Volkskrant (6 Sep 2017), Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.

⁹⁰ De Volkskrant (31 Juli 2017), Retrieved on 16 September 2017.

terakhir. Boudil menyebut manajer SIO sebagai "bereksperimen dengan anak-anak" dan "mengancam generasi yang hilang".⁹¹

Sekolah dasar Islam dari wilayah Amsterdam dalam pernyataan bersama mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyarankan orang tua Muslim untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah menengah baru di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (SIO) karena mereka tidak percaya kepada dewan pengurus, yang menurut mereka, tidak memiliki pengalaman atau kedekatan dengan pendidikan. Redouan Boudil mengatakan bahwa para manajer SIO tidak pernah mengelola sekolah atau bahkan bekerja di bidang pendidikan. Karena itu, dia tidak ingin anak-anak membayar untuk sekolah di bawah naungan yayasan SIO.⁹² Demikian juga, anggota dewan SIO sebelumnya terlibat dalam yayasan Islamic College of Amsterdam (ICA), yang harus menutup sekolahnya pada tahun 2011 karena kualitas pendidikan yang buruk.⁹³ Selain itu, alasan utama lima belas sekolah dasar Islam, termasuk sekolah-sekolah di bawah manajemen ISA dan

⁹¹ Het Parool (9 Sep 2017), Retrieved using Lexis Nexis on 18 September 2017; Nederlands Dagblad (6 Sep 2017), Retrieved using Lexis Nexis on 16 September 2017.

⁹² NRC (30 Jul 2017), Retrieved using Lexis Nexis on 16 September 2017.

⁹³ Trouw (1 Aug 2017), Retrieved using Lexis Nexis on 16 September 2017.

Noor, untuk menolak keras sekolah menengah Islam Cornelius Haga adalah karena sekolah ini dikelola oleh yayasan SIO, yang salah satu anggota dewannya, Abdoe Khouliani, pernah mendukung secara terbuka kepada kelompok teroris Islamic State (IS) di akun facebook-nya pada tahun 2014.⁹⁴ Sementara itu, direktur pelaksana tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegahnya.

Ada dugaan kuat bahwa dewan pengurus SIO memiliki afiliasi dengan kelompok Salafi. Selain itu, ada keraguan apakah pendidikan kewarganegaraan ada di tangan yang baik dengan SIO, karena anggota dewan pernah menyatakan pandangan positif tentang Islamic State (IS) pada tahun 2014.⁹⁵ Orang tua yang masih memilih Cornelius Haga Lyceum harus menyadari bahwa mereka mengambil risiko tinggi yakni pendidikan tidak memadai dan bahwa guru akan mengindoktrinasi anak-anak mereka dengan ide-ide ekstremis. Jika majelis guru utama terdiri dari Muslim fundamentalis, ada risiko "kurikulum tersembunyi" yang bertentangan dengan nilai-nilai

⁹⁴ www.elsevierweekblad.nl. Retrieved on 26 September 2017; De Telegraaf (7 Sep 2017), Retrieved using Lexis Nexis on 16 September 2017; Het Parool (9 Sep 2017). Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.

⁹⁵ *Nederlands Dagblad* (6 Sep 2017). Retrieved using Lexis Nexis, on 16 September 2017; NRC (30 Jul 2017). Retrieved using Lexis Nexis, on 16 September 2017.

negara konstitusional yang demokratis.⁹⁶ Cornelius Haga Lyceum diduga memiliki kedekatan dengan salafisme, aliran fundamentalis dalam Islam yang mengabdikan dirinya melawan sistem nilai masyarakat demokratis bebas. Ketakutan dunia pendidikan Amsterdam bahwa Cornelius Haga Lyceum menjadi tempat berkembang biak bagi aktivisme Muslim melawan masyarakat Belanda bukanlah tidak berdasar.⁹⁷ Ada kekhawatiran bahwa sekolah menengah Islam Cornelius Haga menjadi tempat di mana anak-anak akan menerima indoktrinasi oleh Muslim radikal, karena salah satu dewan telah menunjukkan simpatinya kepada Islamic State (IS) di depan umum. Kecemasan ini tidak hanya datang dari komunitas Belanda tetapi juga dari komunitas Muslim yang mencari integrasi ke dalam masyarakat Belanda.

Pernyataan menentang manajemen SIO didukung oleh sekolah dasar Islam As-Siddieq, Yayasan Noor, sekolah dasar El-Amien dan Yayasan El-Amal. Total ada sekitar 4.000 anak yang bersekolah. As-Soeffah adalah satu-satunya sekolah dasar Islam di Amsterdam yang tidak bergabung dengan pernyataan itu. Sebenarnya, sekolah-sekolah ini ingin mendapatkan pendidikan menengah Islam, tetapi tidak yang dikelola oleh yayasan

⁹⁶ *De Volkskrant* (6 Sep 2017). Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.

⁹⁷ *De Volkskrant* (6 Sep 2017). Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.

SIO. Dalam waktu dekat, mereka akan membahas dengan sekolah menengah yang ada perihal kemungkinan mendirikan departemen Islam. Menurut Boudil, tindakan ini diambil untuk mencegah anak-anak Muslim mendapatkan pendidikan berkualitas rendah.⁹⁸ Sebagai direktur pelaksana yang bekerja di bidang pendidikan, Boudil telah melakukan yang terbaik dan menunjukkan komitmennya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas baik kepada komunitas Muslim. Dari sudut pandang gerakan keagamaan, reaksi keras yang ditunjukkan oleh Boudil (yayasan ISA dan Noor) terhadap yayasan SIO (yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok radikal) juga dapat diartikan sebagai pertarungan antara kelompok moderat atau demokrat yang ingin meningkatkan atau memperkuat posisi komunitas Muslim yang mencari integrasi ke dalam masyarakat Belanda melawan kelompok Salafi di negara ini.

Ketika umat Muslim ditantang oleh tuntutan integrasi, sekolah-sekolah Islam dapat bertindak sebagai "titik awal" untuk menciptakan kohesi sosial dan integrasi ke dalam masyarakat tuan rumah sambil menjaga identitas Muslim siswanya.⁹⁹ Apa yang telah dilakukan oleh para

⁹⁸ NRC (30 Jul 2017). Retrieved using Lexis Nexis, On 16 September 2017.

⁹⁹ Shah, S. (2012). Muslim schools in secular societies: persistence or resistance! *British Journal of Religious Education*, 34(1), 51-65. DOI: 10.1080/01416200.2011.601897, h. 56.

pemimpin dari lembaga pendidikan (sekolah) Islam dengan menekankan misi sekolah yang mendukung dan mempromosikan integrasi sosial seperti yang kita saksikan dalam kasus Yayasan ISA (sakolah As-Siddieq) dan Noor itu dapat dikategorikan dalam gerakan sosial sebagai sebuah "pembingkai" atau "*framing*". Menurut Bert Klandermans, sebagaimana dikutip oleh Tarrow, pembingkai atau *framing* adalah proses di mana para aktor sosial, media, dan anggota masyarakat bersama-sama menafsirkan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali keadaan urusan mereka, "*framing is a process in which social actors, media and members of a society jointly interpret, define and redefine states of affairs*".¹⁰⁰ Memang benar, para pemimpin komunitas Muslim imigran di Belanda perlu membingkai secara benar sekolah-sekolah Islam yang mereka operasikan di tengah-tengah masyarakat sekuler Belanda sehingga kesalahpahaman dapat dihindari dan pada gilirannya sekolah tersebut bisa diterima kehadirannya oleh masyarakat setempat.

¹⁰⁰ Sidney G. Tarrow (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Revised and Updated Third Edition, Cambridge: Cambridge University Press, h. 144.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari diskusi tentang topik yang sedang dibahas, dan menyajikan rangkuman kesimpulan dari apa yang telah dibahas panjang lebar di bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap topik kajian ini secara panjang lebar di bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut.

Secara historis, pendidikan Islam di Belanda mulai terlihat nyata sejak 1980-an. Pendidikan Islam mengambil bentuk dalam tiga jenis: pendidikan masjid, pendidikan agama Islam di sekolah umum, dan pendidikan di sekolah dasar Islam. Komunitas Muslim berhasil mendirikan sekolah dasar Islam pertama mereka di akhir 1980-an di Rotterdam dan Utrecht. Sekolah-sekolah tersebut sepenuhnya didanai oleh negara. Konstitusi Belanda yang menjamin kebebasan pendidikan memungkinkan bagi umat Muslim di negara ini untuk mendirikan sekolah mereka sendiri berdasarkan budaya dan agama mereka yakni Islam. Berdasarkan status hukum ini, umat Muslim berhak mendapatkan pendidikan agama Islam, dan orang tua Muslim dapat mengajukan permohonan pendidikan agama Islam untuk anak-anak mereka.

Berkenaan dengan pentingnya memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka dalam masyarakat multikultural seperti Belanda, dari pemeriksaan atau pengujian terhadap literatur yang tersedia selama masa penelitian, penulis telah menemukan fakta bahwa banyak orang tua Muslim yang ingin melindungi anak-anak mereka dari pengaruh dunia materialistik dan masyarakat sekuler dengan mengirim anak-anak Muslim tersebut ke dalam lingkungan keagamaan yang komprehensif, yaitu sekolah Islam, untuk menumbuhkan orientasi moral yang tinggi. Beberapa orang tua di Belanda ingin menjaga

anak-anak mereka supaya “tidak terkontaminasi” oleh masyarakat sekuler, dan untuk tujuan itu mereka menganggap satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah pendidikan Islam. Melalui pendidikan Islam (Sekolah Islam) orang tua Muslim ingin mentransmisikan dan melestarikan budaya dan nilai-nilai Islam dalam konteks negara sekuler Belanda, selain meningkatkan prestasi pendidikan anak-anak Muslim dengan memberikan perhatian lebih pada masalah khusus mereka. Dalam realitasnya, orientasi keagamaan lebih penting bagi orang tua Muslim dibandingkan dengan prestasi.

Pendapat masyarakat Belanda sebagai reaksi atas kedatangan atau keberadaan sekolah Islam di negara tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok: mendukung dan menolak. Debat tentang sekolah-sekolah Islam di Belanda tidak diragukan lagi terkait dengan ruang lingkup perdebatan yang lebih luas tentang Islam dan Muslim yang ada di masyarakat Belanda. Orang-orang yang mendukung sekolah Islam menganggap bahwa lingkungan yang ramah sebagai tempat siswa belajar dapat membuat siswa secara bertahap bersosialisasi dengan masyarakat luas dengan memperkuat identitas mereka. Sebaliknya, mereka yang menentang sekolah Islam berasumsi bahwa sekolah tersebut tidak memenuhi standar normal dan cenderung memarginalkan (atau, dalam kasus terburuk,

meradikalisasi) anak-anak muda Muslim. Sekolah tersebut dianggap hanya akan mencegah siswa Muslim untuk berintegrasi ke dalam masyarakat asli Belanda.

Kinerja sekolah dasar Islam di Belanda, dari akhir fase ketiga hingga sekarang, dapat dikatakan telah mengalami beberapa kemajuan. Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Pendidikan Belanda membuktikan bahwa banyak kelemahan dan kekurangan ditemukan pada catatan sekolah-sekolah Islam, seperti kualitas pendidikan yang tidak memadai dan salah urus keuangan. Namun demikian, tampaknya sekolah dasar Islam di Belanda telah belajar dari putusan atau vonis negatif yang mereka dapatkan dari Inspektorat Pendidikan. Seiring berjalannya waktu mereka meningkatkan kualitas diri mereka ke level yang lebih baik. Ada satu hal yang menggembirakan yakni bukti dari satu penyelidikan menyatakan bahwa ada sekolah-sekolah Islam yang berhasil dengan baik. Di beberapa sekolah dasar Islam ada bukti yang menunjukkan peningkatan kualitas akademik yang signifikan. Pada awal 2013 dua sekolah dasar Islam dianugerahi gelar "Sekolah Unggulan" oleh Kementerian Pendidikan Belanda. Tentunya, hal ini mendorong dan menginspirasi sekolah lain untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi.

Banyak upaya telah dilakukan oleh sekolah-sekolah dasar Islam di Belanda berkaitan dengan peningkatan

kualitas pendidikan dan seruan atau promosi integrasi sosial. Upaya tersebut meliputi usaha-usaha sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas baik kepada siswa mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar di Belanda. Mengenai peningkatan atau penguatan integrasi dan kohesi sosial, kegiatan yang dilakukan diantaranya termasuk memberikan dukungan kepada posisi komunitas Muslim yang berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda. Contoh yang jelas adalah ketika sejumlah dewan sekolah dasar Islam di wilayah Amsterdam sangat menentang sekolah menengah Islam yang baru dibuka di Amsterdam, yakni Cornelius Haga Lyceum, dan menyarankan orang tua Muslim untuk tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah itu, karena ada salah satu anggota dewan yang dianggap telah memiliki hubungan dengan kelompok Salafi. Tindakan ini dapat dipahami sebagai mempertahankan dan memperkuat posisi mereka sebagai pendukung integrasi ke dalam masyarakat Belanda.

B. Saran-saran

Penulis telah melakukan pengkajian dan melakukan analisis berkaitan dengan posisi umat Muslim yang hidup sebagai minoritas di tengah-tengah masyarakat Barat, yakni negeri Belanda. Penulis berharap hasil kajian yang dituangkan dalam buku ini akan memperkaya pengeta-

huan kita tentang kondisi nyata yang dialami oleh minoritas Muslim di salah satu negara di Eropa. Ini akan memberikan kita sebuah perbandingan yang baik dan pelajaran berharga tentang bagaimana Muslim sebagai mayoritas di Indonesia harus memperlakukan minoritas non-Muslim di negara kita. Namun demikian, keterbatasan waktu yang penulis miliki untuk melakukan penelitian atau pengkajian ini membuat hasil studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai saran, penulis mengharapkan agar peneliti berikutnya dapat masuk lebih dalam lagi dan menyelidiki atau mengkaji masalah ini secara lebih komprehensif dan menempatkannya pada level diskusi akademik ilmiah yang lebih serius lagi sehingga akan memperkaya khazanah pengetahuan di bidang ini.

C. Kata Penutup

Sebagai kata penutup, penulis mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis sepenuhnya sadar bahwa pekerjaan ini tidak sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari siapa pun selalu disambut dengan hangat demi perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi bagi

kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian keislaman (*Islamic studies*).
Wallahu A'lam bi al-Shawab...!

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Alba, Richard & Victor Nee (1997), "Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration", *International Migration Review*, 31(4), 826-874.
- Beck, Herman L. (2013), "Beyond Living Together in Fragments: Muslims, Religious Diversity and Religious Identity in the Netherlands", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 33:1, 111-127, DOI: 10.1080/136020-04.2013.779069.
- Berger, Maurits S. (2013), "The Third Wave: Islamization of Europe, or Europeanization of Islam?" *Journal of Muslims in Europe 2* (2013), 115-136, DOI: 10.1163/22117954-12341260.
- Boender, Welmoet (2013), "Embedding Islam in the 'Moral Covenants' of European States: The Case of a State-Funded Imam Training in the Netherlands", *Journal of Muslims in Europe 2* (2013) 227-247, DOI: 10.1163/22117954-12341265.
- Buijs, Frank J. (2009), "Muslims in the Netherlands: Social and Political Developments after 9/11", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 35:3, 421-438, DOI: 10.1080/13691830802704590.
- Driessen, Geert W. J. M. & Jeff J. Bezemer (1999), "Background and Achievement Levels of Islamic Schools

in the Netherlands: Are The Reservations Justified?", *Race Ethnicity and Education*, 2:2, 235-256, DOI: 10.1080/1361332990020205.

- Driessen, Geert & Michael S. Merry (2006), "Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?", *Interchange*, 37:3, 201-223, DOI: 10.1007/s10780-006-9001-0.
- Dronkers, Jaap (2016), "Islamic Primary Schools in the Netherlands", *Journal of School Choice*, 10:1, 6-21, DOI: 10.1080/15582159.2015.1131508.
- Duyvendak, J. W. & P. W. A. Scholten (2011), "Beyond the Dutch 'Multicultural Model' The Coproduction of Integration Policy Frames in The Netherlands", *Int. Migration & Integration*, 12:331-348, DOI: 10.1007/s-12134-010-0161-5.
- Ersanilli, Evelyn & Ruud Koopmans (2010), "Rewarding Integration? Citizenship Regulations and the Socio-Cultural Integration of Immigrants in the Netherlands, France and Germany", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36:5, 773-791, DOI: 10.1080/13691831003764318.
- Ersanilli, Evelyn & Ruud Koopmans (2011), "Do Immigrant Integration Policies Matter? A Three-Country Comparison among Turkish Immigrants", *West European Politics*, 34:2, 208-234, DOI: 10.1080/01402382.2011.546568.
- Genç, Fatih, Ina ter Avest, Siebren Miedema & Wim Westerman (2012), "A conversational analysis of developments in religious education in Europe and in Turkey", *British Journal of Religious Education*,

- 34:3, 281-297, DOI: 10.1080/01416200.2011.64-9346.
- Goodman, Sara Wallace (2010), "Integration Requirements for Integration's Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36:5, 753-772, DOI: 10.1080/13691831003764300.
- Halstead, Mark (2004), "An Islamic Concept of Education", *Comparative Education*, 40:4, 517-529, DOI: 10.1080/0305006042000284510.
- Kortmann, Matthias (2015), "Asking Those Concerned: How Muslim Migrant Organisations Define Integration. A German-Dutch Comparison", *Int. Migration & Integration*, 16:1057-1080, DOI: 10.1007/s12134-014-0387-8.
- Maliepaard, Mieke, Marcel Lubbers & Mérove Gijsberts (2010), "Generational differences in ethnic and religious attachment and their interrelation. A study among Muslim minorities in the Netherlands", *Ethnic and Racial Studies*, 33:3, 451-472, DOI: 10.1080/01419870903318169.
- Maussen, Marcel & Floris Vermeulen (2015), "Liberal Equality and Toleration for Conservative Religious Minorities. Decreasing Opportunities for Religious Schools in The Netherlands?", *Comparative Education*, 51:1, 87-104, DOI: 10.1080/03050068.2014.935576.
- McCreery, Elaine, Liz Jones & Rachel Holmes (2007), "Why do Muslim Parents Want Muslim Schools?", *Early*

- Years*, 27:3, 203-219, DOI: 10.1080/0957514070-1594350.
- Merry, Michael S. (2005), "Advocacy and Involvement: The Role of Parents in Western Islamic Schools", *Religious Education*, 100:4, 374-385, DOI: 10.1080/00344080500308512.
- Merry, Michael S. & Geert Driessen (2005), "Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure", *Comparative Education*, 41:4, 411-432, DOI: 10.1080/03050060500300931.
- Merry, Michael S. & Geert Driessen (2016), "On The Right Track? Islamic Schools in The Netherlands after An Era of Turmoil", *Race Ethnicity and Education*, 19:4, 856-879, DOI: 10.1080/13613324.2014.985586.
- Penninx, Rinus (2006), "Dutch Immigrant Policies Before and After the Van Gogh Murder", *Journal of International Migration and Integration*, Vol.7, No.2, pp. 241-254.
- Saharso, Sawitri (2007), "Headscarves: A Comparison of Public Thought and Public Policy in Germany and the Netherlands", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 10:4, 513-530, DOI: 10.1080/13698230701660204.
- Scholten, Peter (2016), "Between National Models and Multi-Level Decoupling: The Pursuit of Multi-Level Governance in Dutch and UK Policies Towards Migrant Incorporation", *Int. Migration & Integration*, 17:973-994, DOI 10.1007/s12134-015-0438-9.

- Shadid, Wasif A. (2006), "Public Debates over Islam and the Awareness of Muslim Identity in the Netherlands", *European Education*, 38:2, 10-22, DOI: 10.2753/EUE1056-4934380201.
- Shadid, Wasif A. & Pieter Sjoerd van Koningsveld (2006), "Islamic Religious Education in the Netherlands", *European Education*, 38:2, 76-88, DOI: 10.2753/EUE1056-4934380206.
- Shah, S. (2012), "Muslim schools in secular societies: persistence or resistance?", *British Journal of Religious Education*, 34(1), 51-65. DOI: 10.1080/01416200.2011.601897.
- Shavit, Uriya & Frederic Wiesenbach (2012), "An 'Integrating Enclave': The Case of Al-Hayat, Germany's First Islamic Fitness Center for Women in Cologne", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32:1, 47-61, DOI: 10.1080/13602004.2012.665621.
- Statham, Paul (2016), "How Ordinary People View Muslim Group Rights in Britain, The Netherlands, France and Germany: Significant 'Gaps' Between Majorities and Muslims?", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:2, 217-236, DOI: 10.1080/1369183X.2015.1082288.
- Sözeri, Semiha. Hülya Kosar-Altinyelken & Monique Volman (2017), "Mapping discourses on mosque education in the Netherlands: a content analysis of the Dutch press, 2010-2016", *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, DOI: 10.1080/01596306.2017.1316705.

- Sunier, Thijl (2005), "Constructing Islam: Places of Worship and the Politics of Space in The Netherlands", *Journal of Contemporary European Studies*, 13:3, 317-334, DOI: 10.1080/14782800500378409.
- Sunier, Thijl (2012), "Beyond the Domestication of Islam in Europe: A Reflection on Past and Future Research on Islam in European Societies", *Journal of Muslims in Europe* 1 (2012) 189-208, DOI: 10.1163/221-17954-12341236.
- Ter Avest, K. H. (Ina), & M. (Marjoke) Rietveld-van Wingerden (2016), "Half A Century of Islamic Education in Dutch Schools", *British Journal of Religious Education*, DOI: 10.1080/01416200.2015.1128391.
- Tinker, Claire (2009), "Rights, Social Cohesion and Identity: Arguments for and Against State-Funded Muslim Schools in Britain", *Race Ethnicity and Education*, 12:4, 539-553, DOI: 10.1080/13613320903364499.
- Tinker, Claire & Andrew Smart (2012), "Constructions of collective Muslim identity by advocates of Muslim schools in Britain", *Ethnic and Racial Studies*, 35:4, 643-663, DOI: 10.1080/01419870.2011.577899.
- Torrekens, Corinne & Dirk Jacobs (2016), "Muslims' religiosity and views on religion in six Western European countries: does national context matter?", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42:2, 325-340, DOI: 10.1080/1369183X.2015.1103032.
- Van der Noll, Jolanda & Vassilis Saroglou (2015), "Anti-Islam or Anti-religion? Understanding Objection

against Islamic Education", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41:2, 219-238, DOI: 10.1080/136-9183X.2014.931219.

Van Genugten, Saskia (2013), "The Netherlands and Islam: In Defence of Liberalism and Progress?", *The International Spectator*, 48:1, 72-85, DOI: 10.1080/039-32729.2013.758906.

Van Tubergen, Frank (2007), "Religious Affiliation and Participation among Immigrants in A Secular Society: A Study of Immigrants in The Netherlands", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 33:5, 747-765, DOI: 10.1080/13691830701359181.

Vasta, Ellie (2007), "From ethnic minorities to ethnic majority policy: Multiculturalism and the shift to assimilationism in the Netherlands", *Ethnic and Racial Studies*, 30:5, 713-740, DOI: 10.1080/0141987070-1491770.

Vellenga, Sipco & Gerard Wiegers (2013), "Polarization or bridging? Responses of Muslim and non-Muslim organizations to criticism of Islam in the Netherlands", *Islam and Christian-Muslim Relations*, 24:1, 111-128, DOI: 10.1080/09596410.2013.742220.

Verkuyten, Maykel & Jochem Thijs (2002), "Multiculturalism among Minority and Majority Adolescents in the Netherlands", *International Journal of Intercultural Relations*. Vol. 26, Issue 1, February 2002, pp. 91-108.

Buku:

Abdullah, Irwan (2007), *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anderson, Benedict (1983), *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, New York: Knop Doubleday Publishing Group.

Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arnold, Kathleen (2004), *Homelessness, Citizenship, and Identity*, Albany: State University of New York Press.

Aslan, Ednan (2013), "Series Editor's Foreword", in Ednan Aslan / Margaret Rausch (eds.), *Islamic Education in Secular Societies*, Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 9-11.

Babbie, Earl R. (2010), *The Practice of Social Research* (12th ed.), Wadsworth: Cengage Learning.

Berglund, Jenny (2013), "Islamic Education in Sweden" in Ednan Aslan / Margaret Rausch (eds.), *Islamic Education in Secular Societies*, Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 163-181.

Berglund, Jenny (2015), *Publicly Funded Islamic Education in Europe and the United States*, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World: Center for Middle East Policy.

Bertossi, Christophe, Jan Willem Duyvendak & Peter Scholten (2015), "The Coproduction of National Models of Integration: A View from France and the Netherlands", in Peter Scholten, Han Entzinger, Rinus Penninx, Stijn Verbeek (eds.), *Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues*, Dordrecht: Springer, pp. 59-76.

- Beyer, Peter (2007), 'Religion and Globalization' in George Ritzer (ed.), *The Blackwell Companion to Globalization*, Malden, MA: Blackwell Publishing.
- De Koning, Martijn (2014), "Netherlands", in Jørgen S. Nielsen (Editor-in-Chief), *Yearbook of Muslims in Europe Volume 1*, Leiden: Brill, pp. 439-458.
- Elsas, Chr. (1991), "Turkish Islamic Ideals of Education: Their Possible Function for Islamic Identity and Integration in Europe", in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, pp. 174-186.
- Esposito, John L. (2016), "Foreword", in Robert Mason (ed.), *Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy*, New York: Palgrave Macmillan, pp. ix-xiv.
- Gellner, E. (1983), *Nations and Nationalism*, Oxford: Blackwell.
- Govers, Cora and Hans Vermeulen (1997), *The Politics of Ethnic Consciousness*, New York: McMillan Press.
- Holsti, Ole R. (1969), *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hussain, Amjad (2010), "Islamic Education in the West: Theoretical Foundations and Practical Implications", In Kath Engebretson, Marian de Souza, Gloria Durka and Liam Gearon (eds.), *International Handbook of Inter-religious Education Part One*, Dordrecht: Springer, pp. 235-248.

- Lucassen, J. and R. Penninx (1997), *Newcomers, Immigrants and their Descendants in the Netherlands 1550-1995*, Amsterdam: Het Spinhuis.
- Mandaville, P. (2007). "Islamic education in Britain: Approaches to religious Knowledge in a Pluralistic Society". In R. Hefner & M. Z. Qasim (Eds.), *Schooling Islam: The culture and politics of modern Islam*, Oxford & Princeton: Princeton University Press.
- Masud, Muhammad Khalid. (2002), 'Religious Identity and Mass Education' in Johan Meuleman (ed.), *Islam In The Era Of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity And Identity*, London: Curzon.
- Nicholson, Linda (2008), *Identity Before, Identity Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nielsen, Jørgen S. (2015), "Citizenship Education in Multicultural Societies", in Ednan Aslan and Marcia Hermansen (eds.), *Islam and Citizenship Education*, Dordrecht: Springer, pp. 57-66.
- Penninx, R., and H. Vermeulen (eds). (2000), *Immigrant Integration. The Dutch Case*. Amsterdam: Het Spinhuis.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman (2010), *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (1991a), "Blaming the System or Blaming the Victim? Structural Barriers Facing Muslims in Western Europe", in W.A. Shadid

- & P.S. van Koningsveld (eds.), *The integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, 2-21.
- Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (1991b), "Institutionalization and Integration of Islam in The Netherlands", in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, 89-121.
- Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (1991c), "Integration and Change: Some Future Prospects", in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, 228-239.
- Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (1992), "Islamic Primary School" in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *Islam in Dutch Society: Current Developments and Future Prospects*, Kampen: Kok Pharos, pp.107-122.
- Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (1996), "Dutch Political Views on the Multicultural Society", in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe*, Kampen: Pharos, 93-113.
- Tarrow, Sidney G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, Revised and Updated Third Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Uitermark, Justus (2012), *Dynamics of Power in Dutch Integration Politics: From Accommodation to Confrontation*, Amsterdam: Amsterdam University Press.

- Verbeek, Stijn, Han Entzinger, and Peter Scholten (2015), "Research-Policy Dialogues in the Netherlands", in Peter Scholten, Han Entzinger, Rinus Penninx, Stijn Verbeek (eds.), *Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues*, Dordrecht: Springer, pp. 213-231.
- Vigdor, Jacob L. (2008), *Measuring Immigrant Assimilation in the United States*. New York: NY: Manhattan Institute, Civic Report No. 53.
- Wagtendonk, K. (1991), "Islamic Schools and Islamic Religious Education: A Comparison between Holland and Other West European Countries", in W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds.), *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*, Kampen: Pharos, pp. 154-173.
- Surat Kabar:**
- Couzy, Michiel (2017, May 16), "Voldoet school As-Siddieq aan ondergrens integratie?" [Does school As-Siddieq meet bottom-level integration?] <https://www.parool.nl/amsterdam/voldoet-school-as-siddieq-aan-ondergrens-integratie~a4495078/> .Retrieved 26 September 2017.
- Couzy, Michiel (2017, April 15), "Leerlingen islamitische school verlaten zaal bij dansoptreden" [Student of Islamic school left the hall before dance performance]. <https://www.parool.nl/amsterdam/leerlingen-islamitische-school-verlaten-zaal-bij-dansoptreden~a4487326/> .Retrieved 26 September 2017.

- De Telegraaf (2017, September 7). "Maskers af" [Masks off]. Retrieved using Lexis Nexis, on 16 September 2017.
- De Volkskrant (2017, Juli 31). Pieter Hotse Smit. "Islamitische basisscholen verzetten zich tegen nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam" [Islamic Primary School Reject New Islamic Secondary School in Amsterdam]. <https://www.volkskrant.nl/binnenland/islamitische-basisscholen-verzetten-zich-tegen-nieuwe-islamitische-middelbare-school-in-amsterdam~a4508957/>. Retrieved on 16 September 2017.
- De Volkskrant (2017, September 6). "Haga Lyceum" [Haga Lyceum]. Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.
- Elsevierweekblad (2017). "Salafistische school trekt amper leerlingen" [Salafist school attracts almost students]. <http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/09/salafistische-school-in-amsterdam-trekt-amper-leerlingen-540390/>. Retrieved on 26 September 2017.
- Het Parool (2017, September 9). "Islambrugklas, risico of kans?" [Islamic bridge class, risk or chance?]. Retrieved using Lexis Nexis, on 18 September 2017.
- Nederlands Dagblad (2017, September 6). "Moslimkoepel haalt uit naar school salafisten in Amsterdam" [Muslim dome speaks out to school salafists in Amsterdam]. Retrieved using Lexis Nexis, On 16 September 2017.

- NRC (2017, Juli 30). Mirjam Remie. "Moslimbasisscholen: mijd middelbare islamschool SIO" [Muslim primary schools: middle secondary school SIO]. Retrieved using Lexis Nexis, On 16 September 2017.
- Trouw (2017, August 1), "Islamitische basisscholen ontraden inschrijving bij nieuw lyceum" [Islamic primary schools refused enrolment at new lyceum]. Retrieved using Lexis Nexis, On 16 September 2017.

Internet:

- <http://www.as-siddieq.nl>. Retrieved on 16 September 2017.
- <http://www.socialetrfdagen.be/sprekers.html>. Retrieved 16 September 2017.
- <http://www.theotherbusinessman.nl/redouan-boudil-winnaar-tom-2011/>. Retrieved 16 September 2017.
- Schoolgids Al-Hambra 2016-2017, Utrecht: Al-Hambra. Downloaded from (<http://www.noorscholen.nl>)
- Schoolgids Al-Iman 2016-2017, Almere: Al-Iman. Downloaded from (<http://www.aliman.nl>)
- Schoolgids Al-Ihsaan 2015-2016, Lalystad: Al-Ihsaan. Downloaded from (<http://www.noorscholen.nl>).
- Schoolgids Er-Riseleh 2017-2018, Leiden: Er-Riseleh Leiden. Downloaded from (<http://www.ibs-erriseleh.nl>).

INDEKS

A

Afghanistan, 29
 Afrika, 30
 Al-Ghozali, 94
 al-Hambra, 159
 al-lhsaan, 159
 al-lman, 159
 al-Jawhara, 155, 156
 al-Maes, 155, 156
 Almere, 149, 159, 193
 Al-Waqf al-Islami, 81
 al-Yaqoet, 155, 156
 Amerika Serikat, 89, 113
 Amsterdam, 21, 24, 29,
 31, 52, 84, 89, 90, 121,
 122, 127, 137, 148,
 149, 150, 153, 157,
 158, 164, 165, 166,
 167, 169, 177, 189,
 190, 192, 198, 206,
 214
 Asia, 30
 Asimilasi, 125, 198
 Ayoub, 149, 159, 162

B

Belanda, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
 10, 11, 12, 14, 15, 17,
 20, 24, 25, 27, 28, 29,
 30, 31, 32, 34, 35, 36,
 37, 38, 39, 41, 42, 43,
 44, 49, 50, 51, 53, 54,
 57, 58, 61, 62, 63, 64,
 65, 66, 67, 68, 69, 71,
 72, 73, 74, 75, 76, 77,
 78, 79, 81, 82, 83, 84,
 86, 87, 88, 89, 90, 91,
 92, 93, 95, 96, 97, 100,
 101, 103, 104, 105,
 106, 107, 109, 110,
 111, 112, 113, 115,
 120, 121, 123, 124,
 125, 126, 127, 128,
 129, 130, 131, 132,
 133, 134, 137, 138,
 139, 140, 143, 144,
 145, 148, 150, 151,
 154, 155, 156, 157,
 158, 161, 162, 164,
 165, 169, 170, 171,
 174, 175, 176, 177,
 198, 199, 210, 215

Black school, 198

C

Cornelius Haga Lyceum,
 164, 165, 166, 177

D

Den Haag, 31
 Dronkers, 84, 96, 97, 98,
 99, 103, 104, 105,
 106, 181
 Duyvendak, 14, 67, 111,
 112, 113, 123, 124,
 125, 129, 130, 131,
 132, 133, 181, 187

E

Eropa, 2, 4, 12, 13, 24,
 28, 30, 37, 45, 48, 50,
 52, 53, 79, 83, 88, 89,
 142, 143, 144, 146,
 178
 Er-Risalah, 159, 163

F

Frits Bolkestein, 138
 Fundamentalism, 198

G

Geert Driessen, 2, 5, 6,
 10, 11, 15, 21, 30, 31,
 32, 35, 36, 38, 43, 46,
 66, 69, 72, 73, 74, 76,

77, 78, 81, 82, 89, 92,
 100, 102, 104, 106,
 107, 108, 154, 159,
 183
 Gellner, 18, 188
 George Elwert, 115, 116,
 117

H

Hartmut Esser, 115, 117
Het Parool, 154, 157,
 167, 168, 192
 Hilversum, 150, 159,
 162
 Hirsi Ali, 113, 134
 Hussain, 18, 19, 80, 81,
 188

I

Identitas, 16, 32
 Inggris, 55, 57, 91, 121,
 211
 Inspektorat Pendidikan
 Belanda, 5, 66, 176
 Integrasi, 109, 110, 132,
 147, 154, 198, 214
 Irak, 29
 Iran, 29
 Islam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 10, 11, 15, 17, 18, 19,
 20, 24, 25, 27, 28, 30,
 31, 32, 33, 34, 35, 36,
 37, 38, 39, 41, 42, 43,
 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 55, 56, 57,
58, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 81,
82, 83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 95,
96, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105,
106, 107, 109, 127,
129, 131, 134, 135,
136, 137, 138, 139,
146, 147, 148, 149,
150, 154, 155, 156,
158, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 167,
169, 170, 174, 175,
176, 180, 184, 185,
186, 188, 189, 190,
191, 198, 199, 200,
210, 212, 213, 215,
216

Islamic College of
Amsterdam, 167
Islamitische Scholen
Amsterdam, 148

J

Jan-Peter Balkenende,
88
Jerman, 113, 125, 126
Johan Meuleman, 17, 42,
86, 189

K

Katolik, 64, 68, 78, 87,
105, 130, 131, 165,
199
Kortmann, 111, 113,
114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121,
125, 126, 127, 128,
129, 182
Kuda Troya, 88
Kurdi, 29

L

Latin, 7
Leiden, 21, 24, 30, 63,
70, 71, 150, 159, 162,
164, 165, 188, 193,
210, 214, 215, 217
Lelystad, 149, 159
Liberal, 72, 77, 134, 138,
182, 198, 213

M

Maroko, 2, 5, 10, 24, 29,
31, 32, 37, 69, 133,
150, 199
McCreery, 91, 92, 182
Mesir, 30
Michael S. Merry, 2, 5, 6,
10, 11, 15, 21, 30, 31,
32, 35, 36, 38, 43, 44,
45, 46, 66, 69, 72, 73,
74, 76, 77, 78, 80, 81,

82, 89, 92, 100, 102,
104, 106, 107, 108,
181

Minderhedenbeleid, 198
Minoritas, 130, 132, 146
Multikultural, 129
Muslim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 62, 65,
66, 67, 68, 69, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 81,
82, 83, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 93, 94, 95,
105, 109, 110, 113,
114, 115, 122, 125,
126, 127, 128, 133,
134, 135, 136, 137,
139, 140, 145, 146,
152, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166,
167, 168, 170, 174,
175, 177, 180, 182,
184, 185, 186, 188,
189, 192, 193, 198,
199, 212, 214, 216

P

Participation, 63, 186
Paul Scheffer, 113, 143

Pendidikan Islam, 8, 21,
25, 165, 166, 167,
174, 213, 214, 215
Pilarisasi, 25, 61, 62, 65,
130, 199
Pim Fortuyn, 89, 139
Protestan, 64, 78, 105,
130, 131, 165

R

Redouan Boudil, 148,
150, 164, 166, 167
Rotterdam, 31, 37, 84,
94, 121, 174
Ruud Lubber, 87

S

Scholten, 14, 67, 87, 88,
111, 112, 113, 121,
122, 123, 124, 125,
129, 130, 131, 132,
133, 181, 183, 187,
191
Schoolgids, 160, 161,
162, 163, 193
Sekolah As-Siddieq, 151,
153
Sekolah Dasar Islam, 8,
10, 149
Sekolah Unggulan, 82,
107, 176
Sekuler, 66
Shadid, 5, 6, 7, 10, 11, 15,
20, 31, 34, 35, 36, 37,

40, 41, 50, 51, 73, 74,
75, 93, 147, 184, 188,
189, 190, 191
Solidaritas sosial, 69
Somalia, 29, 134
Söner Atasoy, 165
Statham, 12, 13, 14, 19,
53, 54, 184
*Stichting Islamitisch
Onderwijs*, 165, 200
Submission, 134, 199
Suriah, 30
Suriname, 2

T

Tarrow, 58, 69, 71, 80,
90, 94, 95, 105, 171,
190
Theo van Gogh, 76, 88,
89, 92, 113, 122, 133,
199
Thijs, 14, 186
Turki, 2, 5, 10, 14, 24, 29,
31, 32, 37, 69, 126

U

UIN Walisongo, 9, 210,
211, 213, 214, 217

Uni Eropa, 30
Universiteit Leiden, 21,
165, 210, 215
Universiteit van, 21, 89,
90, 206, 214
Universiteit van
Amsterdam, 90
Utrecht, 31, 149, 159,
174, 193

V

Van Koningsveld, 40
Verkuyten, 14, 186

W

Wiegers, 21, 89, 90, 93,
186

Y

Yayasan Noor, 169

Z

Zwarte school, 44, 197,
198

GLOSARIUM

Asimilasi: pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

Black school: Bahasa Belanda *Zwarte school*, adalah sekolah untuk anak-anak non-pribumi Belanda.

Fundamentalis: Muslim yang mempraktikkan keagamaan yang cenderung tidak mentoleransi kelompok di luar dirinya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

ICA (*Islamic College of Amsterdam*): Kolej Islam Amsterdam.

Inspektorat Pendidikan Belanda: Inspektorat yang bertugas mengawasi atau mengontrol kualitas pendidikan di negeri Belanda.

Integrasi: proses di mana pendatang baru atau minoritas dimasukkan ke dalam struktur sosial masyarakat tuan rumah.

ISA (*Islamitische Scholen Amsterdam*): Yayasan Sekolah Islam Amsterdam.

Liberal: Karakteristik sekolah Islam di Belanda yang berorientasi pada masyarakat Belanda yang liberal.

Minderhedenbeleid: Kebijakan minoritas (minority policy).

Moderat: Muslim yang menerapkan praktik keagamaan yang moderat dan tidak fanatik pada salah satu mazhab.

Ortodoks: Karakteristik sekolah Islam di Belanda yang berorientasi pada masyarakat Muslim yang sesuai ajaran Islam.

Pilarisasi: Pillarisation (dari bahasa Belanda *verzuiling*) adalah segregasi politik-kelompok keagamaan dari suatu masyarakat, atau pemisahan suatu masyarakat menjadi kelompok-kelompok oleh agama dan kepercayaan politik yang terkait. Masyarakat secara "vertical" dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dikenal sebagai pilar.

Sekolah denominasi: Sekolah yang didirikan dan dikelola oleh kelompok masyarakat berdasarkan agama dan keyakinannya. Misalnya Sekolah Katolik, sekolah Kristen, Sekolah Islam, dll. Sekolah denominasi juga didanai oleh pemerintah Belanda sama seperti sekolah publik (sekolah negeri).

Submission: Judul film pendek arahan sutradara Theo van Gogh yang kontroversial karena dianggap menyinggung keyakinan dan agama Islam. Setelah dirilis film ini Theo van Gogh dibunuh oleh seorang Muslim radikal keturunan Maroko.

Queens' Day: Dalam bahasa Belanda *Koninginnedag*, adalah acara karnaval yang unik pada akhir April setiap

tahun, diperingati oleh warga Belanda untuk ratu yang memimpin negeri Belanda.

Peristiwa 9/11: Peristiwa serangan bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok militant Islam, al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden, dengan menabrakkan pesawat terhadap menara kembar WTC di New York City dan gedung pertahanan di Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Sekitar 3000 orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa yang dikenal dengan tragedy 9/11.

SIO (*Stichting Islamitisch Onderwijs*): Yayasan Pendidikan Islam.

APPENDIX

Appendix 1: Recommendation Letter



Dr. Moelih, MA
 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK),
 Universitas Islam Negeri (UIN) Walidongo Semarang,
 Faculty of Education and Teacher Training,
 State Islamic University of Walidongo Semarang,
 Jl. Prof. Dr. Hamka Karangas II, Ngaliyan, Semarang 50135, INDONESIA

Re: your research paper

Leiden, 18 October 2016

To inform of your admission

This is to indicate that I am willing to supervise Dr. Moelih on his proposed research, entitled ISLAMIC EDUCATION IN THE NETHERLANDS: RECONSTRUCTION OF MUSLIM IDENTITY IN MULTICULTURAL SOCIETY, which will take place at Leiden University from 27 November 2016 – 24 February 2017

Since Dr. Moelih has a full scholarship, we will not contribute anything to his stay in the Netherlands and he has to make his own arrangements

Yours sincerely,

Dr. Nico J.G. Kaptein
 Leiden University Institute for Area Studies
 Mathias de Vriesdijk 1, 3512 JZ
 2311 RZ Leiden
 The Netherlands

Living address: 3512 JZ Leiden, The Netherlands
 011 484 4111 (0031 71) 484 4111
 www.uin-walisongo.ac.id
 www.leidenuniv.nl
 www.leidenuniv.nl/area-studies



UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Faculteit der Geesteswetenschappen Faculty of Humanities
 Department of Theology, Islamic Studies & Religious Studies
 Utrecht, Campus Media van Religieuze Studies

Religieuze Studies

Prof. Dr. G. A. Wiegman
 Universiteit van
 Amsterdam
 Postbus 15703
 1077 XG Amsterdam
 T +31 (0) 20 691 9111

Dr. Moelih
 Faculty of Teacher and Educational Science
 State Islamic University Walidongo Semarang
 Jl. Prof. Dr. Hamka Karangas II Ngaliyan
 Semarang 50135
 Republic of Indonesia

Amsterdam, 9 March 2017

Dear Dr Moelih,

This is to confirm that in my capacity as professor of Religious Studies and Islamic studies in the University of Amsterdam and chair I am happy to welcome you to join us at the Department for Religious Studies in the University of Amsterdam. It will be a pleasure to cooperate with you within the framework of the joint research project you have proposed. You will for the time of your stay be a member of the research programme in Religious Dynamics and Cultural Diversity at the Amsterdam School for Historical Studies (ASH). You will be able to use the research facilities and have access to the libraries of the University of Amsterdam and have a work place at our department.

In view of our long-standing cooperation and your qualities as a researcher it will be a great pleasure to renew our cooperation. I look forward to welcoming you in Amsterdam, and wish you success with the application.

With best wishes,

Prof. Dr. Gerard Wiegman

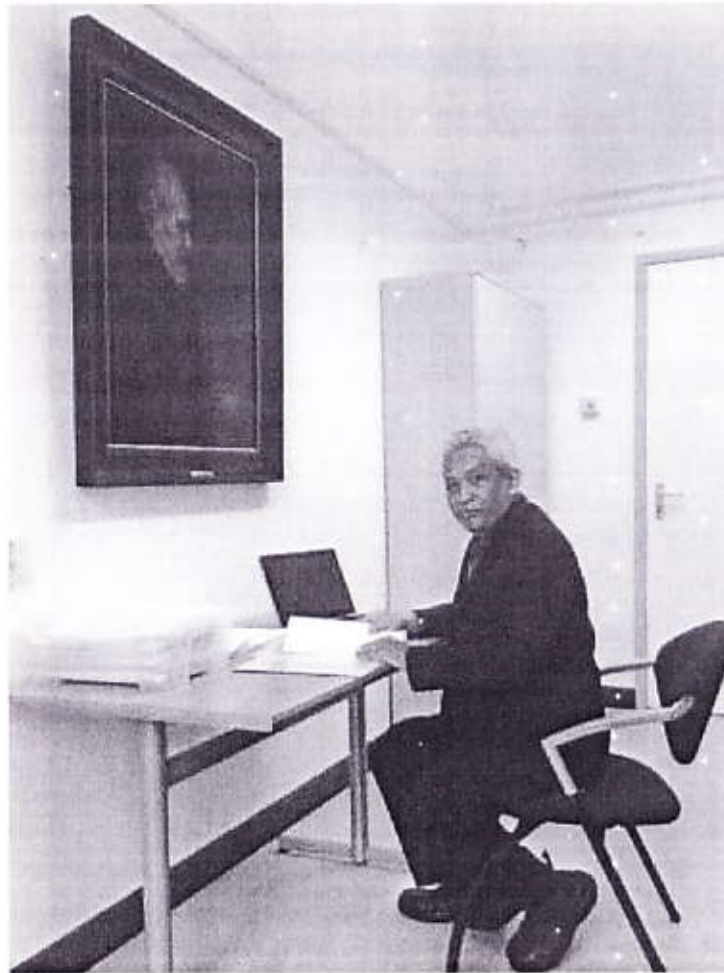
Appendix 3: Bibliotheek dengan UvA Staff ID-Card



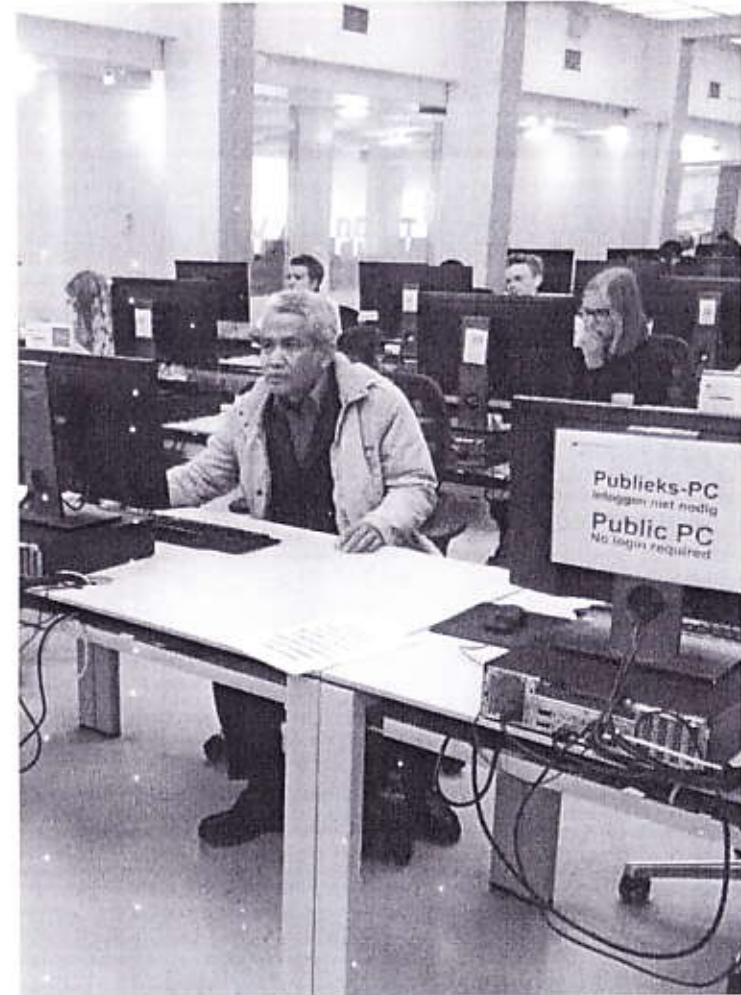
Appendix 4a: Kegiatan Penelitian di Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (UvA). Kloveniersburgwal 48.



*Appendix 4b: Kegiatan Penelitian di ruang kerja UvA
(Room: D1.10A)*



Appendix 4c: Kegiatan Penelitian di Perpustakaan UvA



Appendix 4d: Peneliti di Ruang Perpustakaan UB UvA



BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Muslih MZ, M.A. lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 13 Agustus 1969. Ia adalah dosen profesional bersertifikat dengan Pangkat IV-a / Lektor Kepala di FITK UIN Walisongo Semarang.

Ia menempuh Program Sarjana (S.1) di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Islam Negari (IAIN) Walisongo Semarang, lulus pada tahun 1993 dengan predikat *cum-laude*. Dia melanjutkan studinya untuk Master (S.2) dalam Studi Islam di Faculteit der Letteren (Fakultas Sastra) dan Faculteit der Godgeleerheid (Fakultas Teologi), Universiteit Leiden, Belanda, lulus pada tahun 1999. Kemudian, dia melanjutkan studinya untuk program Doktor (S.3) dalam Studi Islam di Faculteit der Godgeleerdheid (Fakultas Teologi), Universiteit Leiden, Belanda, lulus pada tahun 2006. Baik program Master dan Dokornya didanai oleh beasiswa dari INIS (Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies). Selain itu, penulis juga pernah menerima beasiswa untuk kursus singkat atau pelatihan. Di antaranya adalah beasiswa dari NUFFIC Belanda untuk berpartisipasi dalam Training on Mediation & Conflict Resolution di Wagenigen University (April-May 2007); Beasiswa dari NUFFIC Belanda untuk melakukan Kursus

Singkat untuk Peace Study in European Peace University (EPU) Austria (September-Desember 2009); Beasiswa dari Islamic Development Bank (IsDB) of IAIN Walisongo Semarang untuk Post-doctoral research di Queensland University (November-October 2013); Beasiswa dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia untuk berpartisipasi dalam program Postdoctoral Fellowship Program for Islamic Higher Education (POSFI) 2015 di University of Auckland (September-November 2015).

Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo (dulu Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo) sejak tahun 1996 hingga sekarang. Penulis pernah menjadi Ketua Program Studi Jurusan Bahasa Inggris (TBI) Fakultas Tarbiyah (2007-2008). Pernah menjadi Sekretaris Program Studi Doktor Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang (2008-2011). Penulis juga merupakan asesor untuk program sertifikasi guru, LPTK IAIN Walisongo (2007 hingga sekarang). Penulis juga asesor pada Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi (BAN-PT) Jakarta (2009 hingga sekarang). Selain itu, penulis adalah anggota Pusat Mediasi Walisongo (WMC) (2009 hingga sekarang) dan anggota dewan editor jurnal *Ihya Ulum al-Din* dari IAIN Walisongo. Penulis telah ditunjuk untuk kedua kalinya sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Walisongo Semarang

(2014-2015), dan sekarang ini penulis adalah Ketua Program Studi (prodi) Manajemen Pendidikan Islam (MPI) program pascasarjana (magister) UIN Walisongo Semarang (2015-2019).

Penulis telah menerbitkan beberapa artikel ilmiah seperti: "The International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA: A think tank of Muslim Intellectual Movement", (*Journal Ihya 'Ulum al-Din*, IAIN Walisongo Semarang, Vol.8, No.1, Jun. 2006); "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan" (*Journal Ihya 'Ulum al-Din*, IAIN Walisongo Semarang, Vol.8, No.2, Dec. 2006); "Mecca Conference: An Effort to Find out Solution to Crises in Islamic Education" (*Journal Ihya' Ulum al-Din*, Vol.10, No.1, Jun. 2008, pp. 51-67); "Kontroversi Seputar Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan" (*Jurnal Teologia*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Vol.21, No.2, Jul.2010, 219-236); "Menggagas Universitas Islam Ideal: Studi terhadap Pemikiran Syed Ali Ashraf, (*MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, IAIN Sumatera Utara, Medan, Vol.39, No.1, Jan-Jun 2015, 184-198); "Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT pada Lembaga Pendidikan Non-Formal TPQ", (*Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol.16. No.2, 2016, 215-234); "Empowering Teacher of Religious Education In Multicultural Society", (*Walisongo: Jurnal penelitian sosial keagamaan*, Vol. 25, No.1, 2017, 173-202); "Upaya Pengembangan Kurikulum Prodi S.2

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Walisongo Semarang", (*NADWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No.1, 2018, 155-108); "Islamic schooling, migrant Muslims and the problem of integration in The Netherlands", *Upcoming: (British Journal of Religious Education)*.

Penulis telah melakukan beberapa penelitian, beberapa di antaranya adalah: "Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pencalegan Anggota DPRD Jawa Tengah", (Walisongo Mediation Center [WMC] Semarang, 2008); "Reintegrasi Mantan Kombatan dan Transformasi Konflik di Aceh Paska MoU Helsinki" (Walisongo Mediation Center [WMC] Semarang, 2009); "Budaya Damai Masyarakat Karimunjawa", sebagai anggota peneliti, (Walisongo Mediation Center [WMC] Semarang, 2010); "Gagasan Mewujudkan Universitas Islam: Studi terhadap Pemikiran H.H. Bilgrami dan S.A. Ashraf dalam Monografinya *The Concept of An Islamic University*" (DIPA IAIN Walisongo Semarang 2011); "The Use of Information Search Method to Improve Student Ability in Narrative Reading Skill: A Class-room Action Research at the First Year Student of English Dept. of Tarbiyah Faculty Walisongo State Institute for Islamic Studies in the Academic Year of 2011-2012" (DIPA IAIN Walisongo Semarang 2012); "The Compatibility of Liberal Ideology within Islamic Education" (IsDB of IAIN Walisongo Semarang 2013); "Kontekstualisasi Integrasi Ilmu dalam Sistem

Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Monograf Islamization of Knowledge)" (DIPA FITK IAIN Walisongo Semarang 2014); "Melacak Akar Radikalisme Beragama Di Sekolah: Analisis Buku Ajar PAI SMA Di Kota Semarang" (DIPA UIN Walisongo Semarang 2015); "Respon dan Pandangan User Terhadap Alumni Konsentrasi Pendidikan Islam dan Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam Program Magister FITK UIN Walisongo Semarang", sebagai anggota peneliti, (DIPA FITK UIN Walisongo 2016); penulis juga pernah menerima hibah untuk penelitian sabbatical dari Kementerian Agama RI yang berjudul "Islamic education in the Netherlands: Reconstruction of Muslim identity in Multicultural society" (a sabbatical research in Leiden university, 2016); "The role of Islamic education in the process of Muslim integration in The Netherlands", (Penelitian Pengembangan Global di Universiteit van Amsterdam, DIPA BOPTN LP2M UIN Walisongo, 2017). Selain itu, penulis juga pernah melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Bagi Guru TPQ Se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang" (DIPA UIN Walisongo 2016).

Penulis telah menerbitkan beberapa buku, seperti: "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek" dalam M. Mukhsin Jamil (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center [WMC],

2007), 105-127; *Understanding Islam: English for Islamic Studies*, (Semarang: Walisongo Press, 2009); *Islamization of Knowledge and Islamic Educational Reform: Understanding of al-Faruqi's Thought*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009); *Islamic Revivalism in The West: Study on the Role of International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010); *Sejarah Peradaban Islam* (ISBN: 978-602-9029-24-6. Semarang: Walisongo Press, 2018); Akan segera terbit: *Pendidikan Islam di Negeri Belanda: Sejarah, Tantangan dan Prospek* (2019).

Penulis telah mengambil bagian dan terlibat dalam beberapa pelatihan, seperti: "Academic and TOEFL Preparation Classes" di Yayasan LIA Slipi, Jakarta (June-August 1997); "English Language Course I" di Inter Consultancy Bureau (ICB) Reijksuniversiteit Leiden, Nederland, (17 September 1997 - 11 December 1997); "English Language Course II" di Inter Consultancy Bureau (ICB) Reijksuniversiteit Leiden, Nederland, (4 February 1998 - 20 May 1998); "English Academic Writing Course" di Inter Consultancy Bureau (ICB) Reijksuniversiteit Leiden, Nederland, (4 February 1999 - 27 May 1999); "Dutch Course" di Taal Centrum Universiteit Leiden dan "Dutch Course" di ROC Leiden, The Netherlands (2002); "English Language Training" di Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Surabaya (January-March 2007); "Training on Me-

diation and Conflict Resolution" di Wageningen University, The Netherlands (20 April - 28 May 2007); "Short-course on Peace Study" di European Peace University (EPU), Austria (27 September - 20 December 2009); "Research skills program for international university academics" di University of Queensland (7 Oct. - 1 Nov. 2013); "Postdoctoral Fellowship Program for Islamic Higher Education" (POSFI) di University of Auckland, New Zealand (15 Sep - 26 Nov 2015).

Penulis telah menghadiri beberapa seminar dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti: "International Conference on Muslim Education in Europe" di Bonn, Germany (2002); International Conference (Fifth Annual Conference) on "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies", Organized by Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), held in Wyndham Hotels & Resort, Washington, DC. (28-29 May, 2004); National seminar on "Sertifikasi Guru Antara Harapan dan Realita", sebagai pembicara, diselenggarakan oleh MAN Magelang, (29 Maret 2008); International Conference on "Mediation and its Future in Indonesia" diselenggarakan oleh Walisongo Mediation Center [WMC] IAIN Walisongo in cooperation with NUFFIC, The Netherlands, held in Novotel Hotel Semarang on 30 November - 1 December 2010, as moderator; International Conference on "Is Indonesian Islam Different? Islam in Indonesia

in a Comparative International Perspective”, diselenggarakan oleh the Training of Indonesia's Young Leaders Programme (Leiden University) in Cooperation with the Ministry of Religious Affairs (MORA) and Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, held in Novotel Hotel Bogor from 23-26 January 2011, sebagai pembicara. Selain itu, penulis juga telah memberikan kuliah dan menjadi pembicara dalam beberapa kesempatan. Seperti pembicara dalam seminar di “Islam in Indonesia” di University of Auckland pada November 2015; Pembicara pada the Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16, pada 1-4 November 2016 di IAIN Bandar Lampung; Pembicara pada International seminar on Islamic education in multicultural society di UIN Walisongo Semarang pada 19-20 November 2016; Pembicara pada the Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17, pada 20-23 November 2017 di Jakarta (*Indonesia Convention Exhibition* (ICE), BSD City, Tangerang Selatan).

Penulis pernah menerima penghargaan “Satyalancana Karya Satya X Tahun” pada 2010 dan “Satyalancana Karya Satya XX Tahun” pada tahun 2017 dari Presiden Republik Indonesia. Penulis pernah menjadi pembicara tamu di program TV Voice of America (VOA) Washington DC (2004). Penulis dapat dihubungi melalui email: muslih mz@gmail.com atau muslih@walisongo.ac.id